

16 DEC 1997

UNIVERSITAS DIPONEGORO

**BEKERJANYA HUKUM DI BIDANG PERLINDUNGAN
HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

TESIS

*DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
DERAJAT MAGISTER PADA PROGRAM STUDI S-2 (MAGISTER)
BIDANG ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO*

OLEH

J. S. MURDOMO

NIM. B. 102.94.0063

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM STUDI S-2 (MAGISTER) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1997**

16 DEC 1997

UNIVERSITAS DIPONEGORO

**BEKERJANYA HUKUM DI BIDANG PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**JS. MURDOMO
NIM. B.102.94.0063**

Semarang, Juli 1997

Mengetahui

**Ketua Program Pascasarjana
Bidang Ilmu Hukum UNDIP**



Prof. PURWAHID PATRIK, SH

NIP. 130 307 058

**Disetujui
Pembimbing,**

Dr. I.S. SUSANTO, SH

NIP. 130 324 139

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Secara lahiriah dengan penuh kerendahan hati ingin penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Dr. I.S. Susanto, SH selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini. Sebagai pakar hukum yang sangat penulis kagumi, dengan penuh kesabarannya memberika arahan, bimbingan, serta petunjuk-petunjuk yang sangat berharga, sehingga dengan segala kerelaannya penulis dapat mewujudkan tesis ini.

Sangat disadari bahwa perlindungan hak-hak anak merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Namun perlindungan yang diberikan belum secara optimal, karena dalam praktek masih banyak anak-anak pelaku tindak pidana di perlakukan dengan keji, kasar dan merendahkan nilai-nilai martabat manusia. Dari aspek bekerjanya hukum, maka nampak lembaga atau organisasi yang terlibat dalam penegakan hukum pidana masih berorientasi pada kepentingan lembaganya sendiri. Atas dasar hak tersebut, maka penulis berusaha untuk mengkaji sejauhmana keterlibatan lembaga penegak hukum dalam memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak perlaku tindak pidana. Agar dapat melihat secara obyektif pelaksanaan penegakan hukum,

maka harus melihat unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP yang telah membantu untuk penyusunan tesis ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada rektor Universitas Diponegoro Prof. Dr. H. Muladi, SH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH, serta seluruh pembina program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak mencurahkan perhatiannya.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Janabadra; Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti pendidikan program pascasarjana di Universitas Diponegoro. Begitu pula rekan-rekan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Janabadra, yang selalu memberikan semangat dan dorongan hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta; Ketua Pengadilan Negri Kotamadya Yogyakarta; Ketua Pengadilan Negri Bantul; Ketua Pengadilan Negri Sleman; Kepada Kejaksaan Negri Kotamadya Yogyakarta; Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta; Kepala Rumah Tahanan Wirogunan Yogyakarta serta kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan anak (BISPA).

Begitu pula ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Ibunda tercita yang selalu memberikan dorongan;

bimbingan serta mendampingi pada saat penulis menghadapi masalah.

Akhirnya tidak ada kata-kata yang pantas penulis sampaikan selain ucapan rasa bahagia dan terimakasih atas semua dorongan serta pengorbanan istriku yang tercinta Rini Murtiningsih; Kakak-kakaku serta adikku.

Kepada anak-anakku Soni dan Luki yang selalu menjadi inspirasi dalam menyelesaikan tesis ini.

Harapan penulis, semoga tulisan ini walaupun masih sederhana, dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, serta bagi mereka yang selalu mendambakan adanya kehidupan yang baik bagi anak-anak Indonesia di masa yang akan datang.

Yogyakarta, akhir Juni 1997.

Penulis

(JS. Murdomo)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
RINGKASAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
E. Kerangka Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	26
a. Pendekatan.....	26
b. Spesifikasi Penelitian.....	28
c. Lokasi Penelitian.....	28
d. Populasi dan Sampel Penelitian.....	29
e. Analisis Data.....	30
G. Sistematika Penulisan Tesis.....	31
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	35
A. Hakekat Bekerjanya Hukum Dalam Birokrasi Pengadilan.....	35
B. Hakekat Perlindungan Hak-Hak Anak.....	65
C. Sistem Peradilan Pidana sebagai Sistem Integralistik.....	81

D. Sistem Peradilan Pidana Sebagai Organisasi Birokrasi.....	85
 BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	 94
A. Sikap Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.....	94
1. Perlakuan Polisi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.....	95
a. Perlakuan Polisi Terhadap Anak dalam Penyidikan.....	99
b. Perlakuan Polisi Terhadap Anak dalam Pemeriksaan Pendahuluan.....	103
c. Perlakuan Polisi Terhadap Anak Dalam Penahanan Sementara.....	106
2. Perlakuan Jaksa Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.....	120
Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Proses Peradilan Pidana.....	120
3. Persepsi Hakim Terhadap Anak Dalam Sidang Pengadilan Anak.....	130
a. Sidang Pengadilan Anak Dalam Peradilan Umum.....	130
b. Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan Anak.....	146
c. Putusan Hakim Dalam Sidang Pengadilan Anak.....	154

4. Peranan Bispa Dalam Proses Peradilan Anak	163
a. Gambaran Umum Fungsi dan Tugas Bispa..	163
b. Keterlibatan Bispa Dalam Perkara Pidana Anak.....	168
5. Bantuan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan Anak.....	179
a. Perlunya Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Anak.....	179
b. Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana.....	184
1) Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Peme- riksaan di Kepolisian.....	187
2) Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Peme- riksaan di Kejaksaan.....	189
3) Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Peme- riksaan di Pengadilan.....	189
6. Perlakuan Penegak Hukum Di Lembaga Pema- syarakatan Wirogunan Yogyakarta Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.....	194
a. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.....	195
1) Kondisi Bangunan Fisik dan Fasilitas Yang Tersedia.....	195
2) Sumber Daya Manusia Yang Tersedia Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan...	201
3) Perlakuan Petugas lembaga Pemasyara- katan Terhadap Anak.....	204

4) Perlindungan Hukum Terhadap Anak	
Dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogu-	
nan.....	228
B. Ketentuan Internasional Mengenai Perlindu-	
ngan Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan	
Pidana.....	228
1. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Internasional	231
2. Hak-hak Anak Dalam Proses Pemeriksaan	
dan Putusan Hakim.....	235
3. Penahanan Aparat Penegak Hukum	
Terhadap Perkembangan Hukum Interna-	
sional.....	243
BAB IV. PENUTUP.....	246
A. Kesimpulan.....	246
1. Kesimpulan Umum.....	246
2. Kesimpulan Khusus.....	247
B. Saran-Saran.....	250
DAFTAR PUSTAKA.....	

RINGKASAN

Bekerjanya hukum di dalam proses peradilan pidana merupakan masalah yang selalu menarik perhatian dan tidak pernah habis untuk dibicarakan. Bekerjanya hukum pada hakekatnya sangat terkait dengan penegakkan hukum, dimana dalam penegakan hukum melibatkan unsur-unsur yang penting guna mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

Sesuai dengan judul tesis ini yaitu bekerjanya hukum dibidang perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, maka ada pembatasan ruang lingkup yang dibicarakan yaitu khusus mengenai bekerjanya hukum di bidang perlindungan hak-hak anak. Perlindungan hak-hak anak itu sendiri pada hakekatnya adalah perlindungan hak-hak anak sebagaimana hak anak pada umumnya maupun secara khusus hak-hak anak pelaku tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diamati bagaimana bekerjanya hukum yang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain organisasi penegakan hukum, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana hukum dapat memberikan perlindungan hak-hak anak pelaku tindak pidana? Seberapa jauh pemahaman aparat penegak hukum, yang terkait dalam sistem peradilan pidana, memahami tentang ketentuan nasional maupun internasional yang memberikan perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana?

Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan harapan dapat memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yang terlibat di dalamnya, dan tentunya hasil penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak anak yang merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya, karena dalam praktek masih banyak anak-anak pelaku tindak pidana di perlakukan dengan keji; kasar; yang pada intinya merendahkan nilai-nilai martabat manusia. Hal ini bisa terjadi karena masing-masing lembaga yang terkait dalam birokrasi peradilan pidana, nampak sebagai organisasi cenderung berorientasi kepada kepentingan organisasi sendiri, bukan kepentingan untuk melindungi hak-hak anak.

Bekerjanya hukum di dalam perlindungan hak-hak anak nampak adanya perlakuan penegak hukum yang cenderung mengabaikan perlindungan hak-hak anak, hal ini tercermin bahwa anak dianggap sebagai obyek bukan sebagai subyek yang harus di hormati.

Ditinjau dari sarana dan prasarana bagi perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, nampak belum adanya sarana dan perasaan yang memadai. Dengan minimnya sarana dan prasarana ini secara tidak

langsung akan menghambat adanya perlindungan hak-hak anak. Apalagi ditambah dengan minimnya pengetahuan, yang dimiliki aparat penegak hukum terhadap segala aspek ketentuan yang memberikan perlindungan hak-hak anak akan membawa pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Gambaran bekerjanya hukum terhadap perlindungan hak-hak anak tersebut diatas, maka saran yang diajukan adalah perlunya perbaikan perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Hal ini akan tercapai apabila ada perbaikan sarana dan prasarana hukum.

Perlu dicari upaya untuk meluruskan persepsi aparat penegak hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, hal ini akan tercapai dengan meningkatkan sumber daya manusia para aparat penegak hukum. Adapun langkah-langkah yang bisa ditempuh yaitu dengan cara pendidikan, penyuluhan, pembinaan yang tepat, menyeluruh dan proporsional.

Saran yang lain dan tidak kalah penting adalah dengan memperbaiki sistem dalam proses peradilan pidana, sehingga lembaga yang terlibat dalam proses peradilan pidana tidak berorientasi pada kepentingan lembaganya sendiri, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan anak. Secara tidak langsung kalau sistemnya baik akan dapat mewujudkan kinerja yang baik bagi aparat penegak hukum, yang pada akhirnya mampu mengembalikan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi badan peradilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH :

Dalam GBHN 1993 ditegaskan kembali bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Dengan demikian program-program pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu kepada terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu komponen guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan memperhatikan faktor manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan, dan salah satunya yaitu dengan memperhatikan sektor pembinaan anak dan remaja.

Pembinaan anak dan remaja merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan anak dan remaja merupakan tanggung jawab bersama orang tua atau keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah, serta anak dan remaja sendiri sangat menentukan kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan

perkembangan jasmani, rohani serta pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan mental anak dan remaja sebagai kader penerus perjuangan bangsa.

Dalam Pelita keenam kebijaksanaan sektor anak dan remaja antara lain meliputi peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama, minat belajar, daya cipta, hidup sehat dan idealisme, pembinaan anak sejak dalam kandungan, pembinaan anak usia sekolah dan remaja serta peningkatan kesadaran orang tua.

Sehubungan dengan hal itu, maka dalam Repelita VI dirumuskan berbagai kebijaksanaan yang antara lain meliputi :

- a. Peningkatan status gizi dan kesehatan.
- b. Peningkatan pendidikan.
- c. Penumbuhan wawasan iptek.
- d. Penumbuhan dan peningkatan idealisme serta patriotisme.
- e. Peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan.
- f. Peningkatan peranan keluarga dan masyarakat.
- g. Pembinaan dan perlindungan hukum anak dan remaja.

(GBHN 1993).

Kebijaksanaan tersebut di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai program pembangunan. Penelitian ini memprioritaskan pada kebijaksanaan dalam pembinaan dan perlindungan hukum anak dan remaja.

Memang dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektor anak dan remaja sudah diterbitkan Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, namun permasalahannya apakah Undang-undang Kesejahteraan anak tersebut sudah cukup bisa dipakai untuk melindungi anak dan remaja.

Mengingat bahwa anak Indonesia sebagai warga negara Indonesia dan sebagai generasi penerus diharapkan dapat memperkokoh kejayaan negara dan bangsa Indonesia pada masa mendatang harus mendapatkan perhatian secara khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Perhatian secara khusus ini penting agar anak sebagai generasi penerus yang akan menentukan kehidupan bangsa dan negara di masa depan, mendapat perlindungan terhadap kepentingan mental, intelektual, fisik, sosial, ekonomi dan hukum, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Kehidupan anak oleh hukum telah diatur oleh berbagai peraturan, misalnya dalam bidang hukum perdata, ketentuan yang berkaitan dengan anak-anak terdapat dalam Burgerlijke Wetboek (Kitab Undang-undang perkawinan), PP. No. 17 tahun 1951 LN. 1951 No. 29 (PP tentang Tunjangan Anak) dan sebagainya. Dalam bidang kesejahteraan, ketentuan yang berkaitan dengan anak-anak terdapat dalam UU. No. 6 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, UU. No. 2 tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang mengatur masalah anak baik yang berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan/Keputusan Menteri.

Meskipun di berbagai bidang kehidupan anak telah diatur dalam berbagai peraturan, namun dibidang hukum pidana dirasa masih kurang adanya ketentuan yang dapat memberi perlindungan hukum anak terutama dalam proses peradilan, baik itu dalam peradilan anak (peradillaan yang mengadili anak sebagai terdakwa) atau dalam peradilan umum yang melibatkan anak (misalnya sebagai saksi korban kejahatan).

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ketentuan yang menyangkut anak-anak hanya diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 45, 46 dan 47. Sedangkan dalam KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ketentuan yang menyangkut anak-anak diatur dalam pasal 153 ayat (3) dan (5), dan 171 huruf "a". Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut belum cukup memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang tersangkut dalam proses peradilan pidana karena yang diatur sangat terbatas/belum menyeluruh (menyangkut segala aspek) dan beberapa rumusan dalam ketentuan-ketentuan tersebut masih belum sempurna.

Permasalahan yang sering timbul dalam praktek peradilan yang pertama-tama adalah penentuan batas usia anak-anak yang dapat diajukan ke Pengadilan karena

telah melakukan tindak pidana. Dalam pasal 45 KUHP ditentukan bahwa penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 489, 490, 532, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Jadi dalam hal ini ada batas yaitu sebelum berumur enam belas tahun seorang anak dapat dituntut di pengadilan. Sedangkan mengenai batas minimumnya tidak ditentukan. Sedangkan pasal 153 ayat (1) KUHP menentukan bahwa hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

Maka tidaklah mengherankan apabila pernah terjadi seorang anak yang berusia dibawah lima tahun diajukan kesidang pengadilan dengan tuduhan penganiayaan. Kasus ini menimbulkan pendapat yang pro dan kontra. Meskipun secara psikologis (pandangan terhadap akibatnya bagi

perkembangan jiwa anak tersebut) banyak yang menyayangkan kasus tersebut namun apabila ditinjau dari sudut hukum, Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan anak balita tersebut dan hakim yang mengadilinya tidak bisa dipersalahkan karena tidak ada ketentuan yuridis formal yang mengatur tentang batas usia minimum terhadap seorang anak yang dapat diajukan kemuka sidang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun demikian perlu diingat bahwa hukum bukan hanya undang-undang saja, dengan demikian hakim harus penuh tanggungjawab di dalam menjalankan tugasnya. Faktor kepantasan, faktor kejiwaan masa depan si anak harus selalu diperhatikan.

Ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang ada sekarang ini juga belum mengatur mengenai mulai usia berapa tahun seorang anak dapat diajukan sebagai saksi dalam persidangan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kekuatan keterangannya sebagai alat bukti namun terutama berkaitan dari pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa si anak tersebut, misalnya bagaimana seorang harus memberikan keterangan mengenai sesuatu yang belum saatnya diketahui oleh mereka, meskipun anak tersebut melihat atau mengalaminya sendiri (misalnya dalam kasus kejahatan dengan kekerasan atau kejahatan kesusilaan/seksual).

Masih banyak lagi hal lain yang belum diatur dalam perundang-undangan hukum pidana hingga saat ini,

antara lain yang berkaitan dengan proses/prosedur/tata cara peradilan anak mulai dari penangkapan, penyidikan, penuntutan hingga peradilannya di muka sidang pengadilan, pengertian dan batasan dari kejahatan atau kenakalan anak, dan lain sebagainya.

Hukum pidana senantiasa ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang diancam oleh tindak pidana termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, namun demikian anak-anak merupakan "*a generation who will one day become our national leader*" demikian menurut Benjamine Fine¹ perlu mendapatkan perlindungan khusus demi masa depannya sekalipun ia terbukti telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Meskipun Undang-Undang tentang Pengadilan anak sudah terbit , namun penegak hukum terutama hakim harus mampu menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada guna menangani kasus-kasus tindak pidana / kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak. Seperti yang ungkapkan dalam Penjelasan pasal 14 ayat (1) UU. No 14 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap memahami Hukum, Pencari Keadilan datang padanya untuk mohon keadilan, Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak*

1. Romli Atma Sasmita, Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja, 1984, hal. 7.

tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara", maka seharusnya hakim dalam putusannya tidak sekedar menerapkan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan/kenakalan yang sesuai dan sebanding dengan perbuatannya namun sebagai hakim yang bijaksana harus pula mempertimbangkan segi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut.

Mengenai penegakan hukum acara pidana yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak dalam proses persidangan menurut I.S Susanto paling tidak ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu disamping undang-undangnya, maka penegakan hukum secara konkrit melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum, didalam suatu hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial, ekonomi dan budaya pada suatu situasi tertentu.²⁾

Studi tentang perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan belum banyak dilakukan, dengan demikian penelitian ini sangat penting dan relevan guna

²⁾ I.S. Susanto. **Pemahaman Kritis terhadap Realitas Sosial** (Dalam Majalah "Masalah-masalah Hukum" No.9 tahun 1992. hal.17.

memberikan sumbangan terutama pengembangan ilmu hukum pidana dan memberikan sumbangan pemikiran bagi hakim yang secara langsung mengimplementasikan peraturan-peraturan hukum, khususnya bagi perlindungan hak-hak anak.

Kecuali itu masih sering dijumpai adanya ketidaksesuaian antara apa yang dicita-citakan dalam undang-undang dengan kenyataan dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Dengan kata lain terdapat perbedaan antara "law in book" dengan "law in action".

Berangkat dari uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bekerjanya hukum dibidang perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan berbagai dimensi dalam membahas masalah penegakan hukum di atas, penulis terutama akan memfokuskan perhatian dari dimensi penegak hukum dalam hal ini pengadilan. Disini akan dikaji berbagai aspek yang mempengaruhi hakim dalam memberikan perlindungan hak-hak tersangka selama proses peradilan, khususnya yang berkaitan dengan faktor organisasi peradilan, faktor sosial dan personal, serta persepsi hakim terhadap hak-hak anak manusia dan terhadap fungsi dan tujuan penegakan hukum.

Mengingat sedemikian kompleksnya masalah yang berkaitan dengan proses peradilan anak peneliti akan membatasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bekerjanya hukum dibidang perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan ?

Disini akan diberikan gambaran mengenai kondisi-kondisi yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dibidang perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan.

2. Bagaimana persepsi hakim terhadap hak-hak anak, khususnya bagi anak pelaku kejahatan. Permasalahan ini dikemukakan untuk mengetahui proses terbentuknya persepsi hakim terhadap perlindungan hak-hak anak. Sebab tindakan atau perbuatan seorang hakim sangat dipengaruhi oleh persepsi atau pandangannya terhadap sesuatu, yang diperoleh melalui proses sosial.

3. Faktor internal dan eksternal apakah yang mempengaruhi hakim di dalam memberikan perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan.

Permasalahan ini dikemukakan untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang sering kali muncul, sehingga mempengaruhi proses perlindungan hak-hak anak.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh aspek organisasi pengadilan terhadap sikap dan pandangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.
2. Persepsi Hakim terhadap hak-hak anak dan persepsi

Hakim terhadap fungsi dan tujuan penegakan hukum.

3. Faktor-faktor sosial dan personal yang mempengaruhi Hakim dalam memberikan perlindungan penegakan hak-hak anak dalam proses persidangan.

Sejalan dengan hal itu, maka penelitian yang berkaitan dengan bekerjanya hukum dalam bidang perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan amat penting, yakni dilihat dari sisi:

1. Aspek pengembangan teoritis, yaitu menambah pengetahuan yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak-hak anak, karena aspek perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan jarang sekali diperhatikan.
2. Aspek pengembangan praktis, memberikan masukan kepada pengadilan, sehingga bisa dipakai sebagai landasan kebijakan dalam memberikan keadilan kepada anak-anak yang bermasalah.

Kontribusi praktis ini amat relevan karena akhir-akhir ini banyak putusan pengadilan yang dianggap tidak adil dan tidak memberikan perlindungan hak-hak anak.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum (pidana) khususnya dalam proses peradilan.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian pada bidang Ilmu Hukum Pidana/Kriminologi dari dimensi sosiologis.

E. KERANGKA TEORI

Masalah perlindungan anak sebenarnya sudah cukup lama dibicarakan tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia Internasional. Secara umum perlindungan anak diartikan sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya³⁾

Dengan disahkannya Deklarasi Hak-hak Anak (*Declaration of the Right of the Child*) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 yang terdiri dari sepuluh prinsip, maka dari sepuluh prinsip tersebut kiranya yang perlu mendapat perhatian adalah prinsip kedua yang berbunyi:

"The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and other means, to enable him to develop physically, morally, spiritually, and socially in a healthy, and normal manner in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration".⁴⁾

3) Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, 1987, hal. 18.

4) Resolusi PBB no 138, Declaration of The Rights of Child, 1958.

Prinsip kedua dari deklarasi inilah yang melatarbelakangi dan mendasari disahkannya Undang-Undang RI tentang kesejahteraan Anak (UU. No. 4 tahun 1979). Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang mengusahakan perlindungan bagi anak adalah masyarakat dan pemerintah (Pasal 11 ayat (2) UU. No. 4 tahun 1979).

Upaya pemerintah dalam menyelenggarakan Perlindungan bagi anak salah satunya diwujudkan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan senantiasa mempertimbangkan hak-hak anak dalam setiap peraturan perundangan baik yang dibuat khusus berkaitan dengan perlindungan anak maupun yang bersifat umum.

Dibidang peradilan, perlindungan anak dimaksudkan sebagai perlindungan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang pada anak-anak yang karena kesalahannya diajukan ke sidang pengadilan dengan diperlakukan secara khusus. bertujuan untuk mengembalikan sikap mental anak kejalan yang benar sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat.⁵⁾

Di bidang Peradilan Pidana, KUHP mengatur mengenai anak dalam Pasal-pasal 45,46 dan 47.

Dalam KUHP disebutkan bahwa Hakim dapat menentukan tindakan terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana

5) Bismar Siregar, Telaah, Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak Dan Wanita, 1986, hal. 7.

sebelum berumur 16 tahun (belum cukup umur/minderjarig) berupa:

1. Dikembalikan kepada orang tuanya/walinya tanpa pidana apapun. (Pasal 45 KUHP).
2. Diserahkan kepada pemerintah untuk dimasukkan ke dalam rumah pendidikan negara. (Pasal 45 jo 46 KUHP)
3. Dipidana dengan maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. (Pasal 45 jo 47 KUHP).

Dalam KUHP ketentuan yang berkaitan dengan anak diatur dalam Pasal 153 ayat (3) yang menyebutkan bahwa *untuk keperluan pemeriksaan, Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak*, kemudian disebutkan pula bahwa *Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang*. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga supaya anak yang masih dibawah umur tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, lebih-lebih dalam perkara kejahatan berat (Penjelasan pasal 153 ayat (5) KUHP). Selain itu diatur pula dalam Pasal 171 huruf 'a' yang pada dasarnya menyebutkan bahwa *anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah*.

Ketentuan-ketentuan tersebut dirasa masih belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Sebenarnya pemerintah RI sudah lama (sejak tahun 1967) memikirkan mengenai perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan seperti yang tertuang dalam RUU tentang peradilan anak. Sayang RUU tersebut hingga kini belum juga disahkan sebagai Undang-Undang. Oleh karena itu sambil menunggu Undang-undang tentang peradilan anak, pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman RI telah mengeluarkan *Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 06-UM. 01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang*, yang dalam Bab II-nya diatur mengenai "Tata Tertib Sidang Anak".

Dalam Permenkeh tersebut antara lain diatur bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal-hal tertentu dan pemeriksaannya dilakukan dengan pintu tertutup namun putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 10). Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum bersidang tanpa Toga (Pasal 11). Dipersidangan anak diperiksa dengan kehadiran orang tua/wali/orang tua asuh dan untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak, hakim dapat menugaskan kepada pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman untuk membuat laporan sosial anak yang bersangkutan (Pasal 12).

Diketahui bahwa hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Didalam kaidah-kaidah atau hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum.⁶⁾

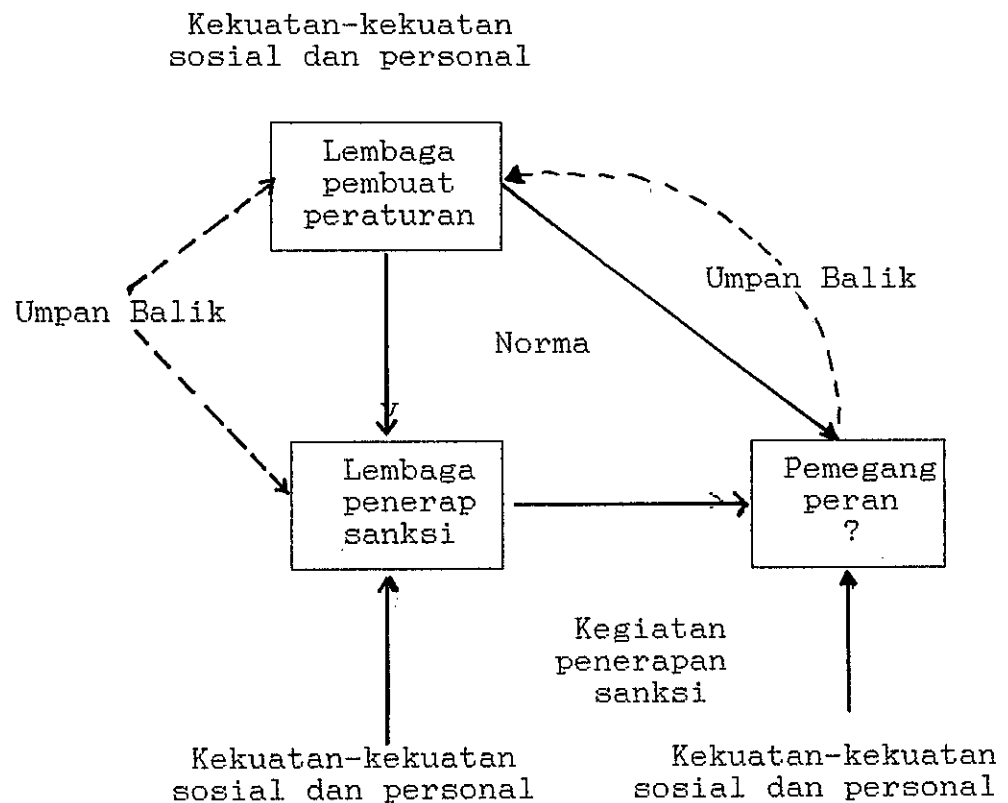
Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Demikian dikatakan oleh Radbruch. Dengan demikian apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene abstrak itu. Dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti : Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Perundang-undangan.⁷⁾.

⁶⁾ Satjipto Raharjo, tanpa tahun, **Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)**, Bandung : Sinar Baru, hal. 5.

⁷⁾ Ibid. hal. 15 - 17.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa aspek organisasi penegak hukum merupakan titik sentral dari bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dijelaskan dengan teori yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman. Teori tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Dalam teori tersebut terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut meliputi (1). Lembaga pembuat peraturan; (2). Lembaga Penerap Peraturan; dan (3). Pemegang peran. Dari ketiga komponen dasar tersebut Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut :

- 1). Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak.
- 2). Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- 3). Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.
- 4). Bagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.⁸⁾

Oleh karena dalam penelitian ini akan mengkaji dari dimensi penegak hukum, maka dari ketiga komponen pendukung bekerjanya hukum atau proses penegakan hukum diatas, pembahasan selanjutnya akan lebih ditekankan pada komponen Lembaga penerap sanksi atau Organisasi/ Birokrasi. Dengan demikian apabila kita membicarakan hukum dalam konteks organisasi, akan membuka pintu bagi pengkajian tentang bagaimana lembaga hukum yang disertai tugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum itu bekerja. Dengan mengamati bekerjanya organisasi tersebut, maka kita sudah mulai turun dari peringkat

⁸⁾ Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung : Alumni, hal.27.

pembicaraan hukum yang abstrak kepada peringkat yang lebih konkret. Konkret disini dimaksudkan pembicaraan yang menyangkut proses bagaimana tujuan-tujuan hukum itu diwujudkan dalam konteks organisasi. Oleh karena itu dalam konteks organisasi berarti mempermasalahkan orang, tingkah laku orang-orang, membicarakan fasilitas serta kultur suatu organisasi.⁹⁾

Apabila kita sudah berbicara mengenai organisasi, maka satu hal yang pokok adalah bagaimana organisasi itu akan "dibuat berjalan". Proses ini tidak lain merupakan kegiatan manajemen. Manajemen menurut Shrode dan Voich diartikan sebagai seperangkat kegiatan atau suatu proses untuk mengkoordinasi atau mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi dan dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi.¹⁰⁾

Organisasi peradilan merupakan organisasi yang bersifat birokratis, karena organisasi ini merupakan jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis.

⁹⁾ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hal. 16 - 19.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hal. 115 - 17.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk dapat memahami peradilan sebagai suatu organisasi, ia dapat diperinci ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :¹¹⁾

Unsur-unsur organisasi	Yang menjalankan
1. Orang-orang	Para pelaksana tugas
2. Teknik-teknik	Teknologi yang dipakai untuk menjalankan tugas.
3. Informasi	Pengetahuan yang dipakai untuk menjalankan tugas
4. Struktur	Pengaturan tugas
5. Tujuan	Alasan bagi menjalankan tujuan

Dari unsur-unsur organisasi di atas, unsur orang atau manusia merupakan unsur yang paling esensial dalam bekerjanya suatu organisasi dan memiliki kedudukan yang unik. Dalam hubungan ini Van Doorn mengatakan sebagai berikut :

"Ia merupakan kebersamaan dan keadaan keterikatan dari sejumlah manusia, yang tidak hanya keluar dari kerangka organisasi, karena manusia selalu cenderung untuk keluar dari setiap bentuk konstruksi organisasi, melainkan juga karena setiap kali terjatuh di luar skema (organisasi), disebabkan oleh karena cenderung untuk memberikan tafsirannya sendiri mengenai fungsinya dalam organisasi, berdasarkan kepribadiannya, asal-usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya, serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri."¹²⁾

¹¹⁾ Satjipto Rahardjo. Op.cit., hal. 70.

¹²⁾ Satjipto Rahardjo, Op. cit, hal. 26.

Untuk dapat memahami bekerjanya suatu organisasi, maka harus dilihat variabel-variabel yang mempengaruhi atau yang terlibat didalam pengambilan putusan atau tindakan. Kadang kala akan di jumpai kesulitan didalam menentukan variabel mana yang merupakan sebab dan variabel yang ada saling terkait satu sama lain dan variabel-variabel tersebut mempunyai potensi untuk saling mempengaruhi. Hal ini merupakan tantangan untuk bisa mengetahui bagaimana kompleksitas hubungan-hubungan yang terjadi dalam proses suatu organisasi.

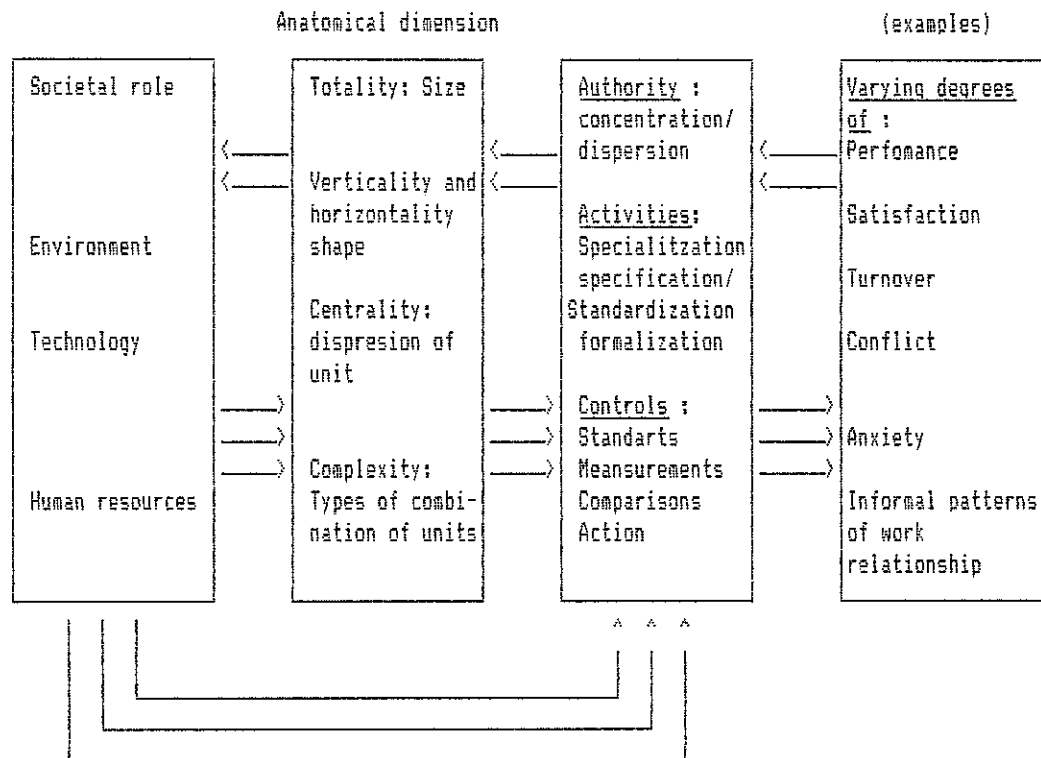
Menurut Porter dalam bukunya *behavior in organisation*, banyak faktor yang mempengaruhi bekerjanya suatu organisasi, hal ini dapat dilihat dalam skema sebagai berikut:¹³⁾

¹³⁾ Porter, Lyman W. 1975 *Behavior in Organisations*.

CONTEXT FACTORS

STRUCTURAL FACTORS

BEHAVIOR CONSEQUENCES



Skema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Peranan Masyarakat disertai dengan lingkungan, teknologi dan sumberdaya manusia merupakan faktor-faktor lingkungan yang saling mempengaruhi (context factors). Dalam pelaksanaannya (operational features) suatu organisasi dijalankan oleh suatu kekuasaan yang bentuknya bermacam-macam yaitu: kekuasaan yang dipusatkan atau kekuasaan yang dibagi-bagi sesuai dengan bentuk organisasi tersebut. Organisasi tersebut juga melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan spesialisasi, spesifikasi, standardisasi, formalisasi. Selanjutnya kegiatan-kegiatan tersebut

diawasi berdasarkan pedoman-pedoman, ukuran-ukuran, perbandingan-perbandingan dan tindakan-tindakan dari organisasi itu.

Pelaksanaan suatu organisasi dengan kekuasaan dan kegiatan-kegiatannya tersebut (yang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor) menimbulkan akibat yang berupa : penampilan organisasi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap organisasi tersebut, hasil yang diperoleh oleh organisasi tersebut. Kemungkinan dari akibat yang ditimbulkan dapat juga berupa konflik-konflik atau kegelisahan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Bentuk-bentuk perilaku yang merupakan hasil yang saling mempengaruhi ini disebut pola-pola informal adanya dari adanya hubungan-hubungan kerja. Sebagai suatu totalitas, behavioral consequence akan mempengaruhi pula operational featural, yang selanjutnya juga mempengaruhi anatomical dimension yang berhubungan ukuran, bentuk, dan lain sebagainya dari suatu organisasi. Selanjutnya secara totalitas anatomical dimension akan mempengaruhi juga context factors yang ada pada organisasi tersebut.

Sedangkan menurut Peter M. Blau dan Marshal W. Meyer dalam bukunya Birokrasi dalam masyarakat modern mengatakan sebagai berikut:

"Dimensi-dimensi analisis yang biasanya digunakan dalam mempelajari birokrasi terdiri dari beberapa macam. Pertama dimensi peranan (Role dimension). Kedua

dimensi kelompok (group dimension). Ketiga dimensi organisasi (organisation dimention)". 14)

Dimensi peranan memperhatikan ciri-ciri dan tingkah laku individu dalam peranan mereka sebagai anggota organisasi. Sedangkan dalam dimensi kelompok yang seringkali disebut dengan dimensi "Struktural", memperhatikan pengaruh aktivitas seseorang atau beberapa orang terhadap tingkah laku orang lain, biasanya juga ditujukan kepada proses-proses sosial yang mewarnai organisasi-organisasi informal dalam kelompok-kelompok kerja. Dengan hal ini untuk menyelidiki apakah kelompok-kelompok pekerja kooperatif atau kompetitif adalah lebih produktif, informasi tentang kelompok-kelompok tersebut nampaknya lebih tepat.

Pada dimensi organisasi, perhatian terpusat kepada organisasi secara utuh, bukan kepada individu-individu atau kelompok-kelompok kerja. Untuk dapat mengetahui organisasi mana yang paling tepat bagi pelaksanaan pekerjaan secara efisien maka harus dapat memahami organisasi sebagai kesatuan yang utuh.

Atas dasar hal tersebut maka dimensi analisis dalam membahas organisasi peradilan ini adalah dimensi peranan (role dimension). Karena disini ingin diketahui

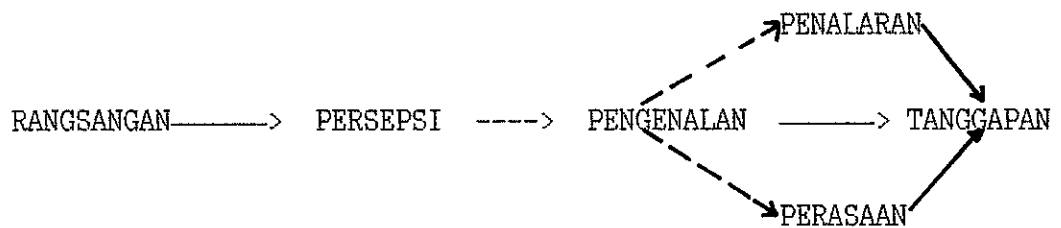
¹⁴⁾Blau, Peter M. 1987. Birokrasi dalam Masyarakat Modern, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (41 - Press).

bagaimana kondisi-kondisi yang ada dalam organisasi birokratis serta faktor-faktor sosial dan personal, mempengaruhi sikap dan tingkah laku anggota-anggotanya. Dengan kata lain disini akan diteliti bagaimana kondisi-kondisi yang ada dalam birokrasi peradilan, serta faktor-faktor sosial dan personal, mempengaruhi sikap dan tingkah laku para hakim sebagai anggota dari birokrasi tersebut.

Aspek lain yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang persepsi hakim terhadap hak-hak asasi tersangka dan persepsi hakim terhadap fungsi dan tujuan penegakan hukum.

Tindakan atau perbuatan manusia adalah tindakan atau perbuatan tentang orang terhadap sesuatu, sementara "warna" tindakan itu sendiri dipengaruhi oleh persepsi atau pandangannya terhadap sesuatu. Sedangkan pengetahuan yang dimiliki setiap orang merupakan hasil pengalaman yang unik sebagai seorang pribadi dalam lingkungan hidup bersama orang lain. Artinya pandangan atau orang tentang sesuatu diperoleh melalui proses sosial.

Mengenai proses terbentuknya persepsi dapat diterangkan dengan salah satu teori psikologi yang dikenal sebagai teori Rangsangan - Tanggapan (atau "Stimulus - Respon"), yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Sedangkan persepsi ("perception") dapat didefinisikan sebagai cara manusia menangkap rangsangan. Kognisi ("cognition") atau pengenalan adalah cara manusia memberikan arti kepada rangsangan lainnya pada tingkat pembentukan psikologis. Perasaan ("feeling") adalah konotasi emosional yang dihasilkan oleh rangsangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan rangsangan lain pada tingkat kognitif atau konseptual.¹⁵⁾

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis sosiologis, karena data yang diperlukan tidak hanya undang-undang tetapi juga berpijak pada segi sosiologisnya, yaitu keadaan lingkungan yang mempengaruhi perlindungan hak-hak anak.

¹⁵⁾ Bernard Hennessy. 1989. *Pendapat Umum*. Jakarta : Penerbit Erlangga, hal. 117 -118.

Pendekatan yang yuridis-sosiologis memberikan akibat bahwa dalam penelitian ini tidak hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis saja, tetapi juga memperhatikan faktor sosiologis sehingga dalam penelitian ini disamping mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan juga dipergunakan data primer yang diperoleh dilapangan. Dengan demikian hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.¹⁶⁾

Adapun metode yang dipakai adalah metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu hakim, dan anak-anak yang terlibat dalam proses persidangan tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya

¹⁶⁾Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 34 - 35.

sebagai bagian dari suatu keutuhan.¹⁷⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Secara spesifik penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menjelaskan fenomena tentang masalah perlindungan hak-hak anak dalam proses persidangan. Fakta-fakta yang ada dengan suatu interpretasi, evaluasi pengetahuan umum, karena fakta tidak mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.¹⁸⁾ Dengan deskriptif analisis ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai bekerjanya hukum di bidang perlindungan hak-hak anak, khususnya bagi anak yang terlibat dalam proses persidangan.

3. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipilihnya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penelitian ini, disamping faktor dana, personal dan waktu, juga karena menurut pandangan penulis pemilihan lokasi tertentu sudah cukup lengkap dan memadai untuk menyajikan informasi yang intensif baik dalam hal kedalamannya maupun proses-

¹⁷⁾ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990, hal.3.

¹⁸⁾ I.S. Susanto. 1990. *Kriminologi*. Semarang : F.H. Undip, hal. 15.

proses sosial. Hal ini sesuai dengan type informasi dalam penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sanapiah Faisal yakni untuk memahami keadaan yang terbatas jumlahnya, dengan fokus yang mendalam dan rinci.¹⁹⁾

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta dan anak-anak yang diadili di pengadilan karena telah melakukan kejahatan atau pelanggaran serta anak-anak sebagai saksi korban kejahatan, yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai informan awal adalah Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua-Ketua Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel/informan berikutnya berkembang mengikuti prinsip "bola salju", dan pilihan sampel berakhir setelah terdapat indikasi tidak adanya lagi informan yang dapat dijangkau.
- b) Sebagai informan awal yang lain adalah responden anak yang bermasalah baik sebagai pelaku kejahatan atau kenakalan dan anak yang

¹⁹⁾ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Edisi I, Cetakan I Malang : Yayasan Asih Asah Asuh (Y A 3), 1990, hal. 22.

menjadi saksi korban kejahatan. Mereka mengalami proses persidangan di pengadilan.

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, sampel tersebut tidak bersifat limitatif akan tetapi dapat berkembang mengikuti prinsip "bola salju", dan akan berakhir setelah terdapat indikasi "tak munculnya" variasi/informasi baru.²⁰⁾

5. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan :

- a. Wawancara tidak berstruktur atau "unstructured interview", yaitu pertanyaan diajukan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan tujuan agar arahnya lebih terbuka dan bisa didapatkan informasi yang lebih luas, serta wawancara dapat berlangsung secara luwes.
- b. Observasi yang tak partisipatif atau "non-participant observation". Dalam hubungan ini peneliti berdiri "sebagai orang luar" dalam situasi sosial yang tengah diobservasi.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara yang sesuai dengan penelitian yang bersifat

²⁰⁾Lihat Sanapiah Faisal, Ibid. hal.158-159.

kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis domain, taksonomi, komponensial dan tema.

Dengan analisis domain dimaksudkan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di dalam masalah perlindungan anak.

Analisis taksonomi memfokuskan pada masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan, khususnya dalam sidang pengadilan.

Setelah diperoleh cukup banyak fakta tentang masalah perlindungan terhadap anak didalam proses peradilan pidana, maka dilakukan analisis komponensial.

Analisis yang terakhir adalah analisis tema, yaitu untuk menarik "benang merah" yang mengintegrasikan faktor-faktor yang berpengaruh di dalam pelaksanaan peraturan-peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak-hak anak dalam proses persidangan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Guna memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, maka perlu dijelaskan sistematika penulisan tesis ini. Tesis ini terdiri atas lima bab yang masing-masing Bab disusun secara sistematis dan berkesinambungan satu sama lain.

Pada Bab I berisi mengenai latar belakang masalah penulisan tesis, yang diikuti dengan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan tesis ini. Bab I juga memuat kerangka teori dan dilengkapi dengan metode penulisan secara singkat, sebagai alat untuk menentukan langkah-langkah penulisan dalam pencarian, pengumpulan dan analisa data guna mewujudkan pokok kerangka penulisan tersebut secara lebih kongkrit.

Pada Bab II bagian tesis ini berisikan tentang kajian teori terhadap pokok permasalahan yang ada, dan selanjutnya kajian tersebut dipergunakan untuk menganalisis data. Bab II terdiri atas lima sub bab, yaitu sub bab mengenai hakekat bekerjanya hukum dalam birokrasi peradilan, yang menyajikan gambaran tentang bagaimana penerapan hukum dalam organisasi peradilan.

Pada bagian lain juga disajikan tentang hakekat perlindungan hak-hak anak, yang pada dasarnya menggambarkan bagaimana idealnya anak-anak memperoleh hak-haknya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga anak dapat berkembang secara optimal menjadi manusia yang dewasa dan bertanggungjawab.

Sub bab selanjutnya menyajikan faktor interval dan eksteral hakim yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan. Gambaran faktor interval dan eksteral hakim pengaruhnya terhadap setiap putusan

pengadilan. Gambaran faktor internal dan eksternal hakim pengaruhnya terhadap setiap putusan mencerminkan potret atau wajah pengadilan di Indonesia. Sedangkan sub bab terakhir adalah sistem Peradilan Pidana sebagai sistema integralistik, yang menggambarkan bagaimana sistem Pengadilan Pidana secara ideal sebagai lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan secara optimal terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Pada bab III menyajikan hasil penelitian dan Analisis data. Bab ini dapat dikatakan inti dari tesis, karena di dalamnya diuraikan dan dianalisis mengenai temuan-temuan dilapangan sehubungan dengan bekerjanya hukum dibidang perlindungan hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana.

Guna memudahkan pemahaman uraian bab III ini, maka dibagi dalam beberapa sub bab, yang saling berkaitan antara sub bab yang satu dengan yang lain. Memang tujuan bab III ini dimaksimalkan menjawab pokok permasalahan sebagaimana diuraikan pada bab I. Adapun bab III ini terdiri dari sub-bab perlakuan penegak hukum terhadap anak-anak dalam proses peradilan pidana yang berusaha menguraikan secara empiris perlakuan aparat penegak hukum mulai dari polisi; jaksa; hakim; petugas Binsa dan lembaga bantuan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Sub bab kedua adalah perlakuan penegak hukum terhadap anak yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Secara empiris pada sub bab ini menguraikan bagaimana hak-hak anak sesungguhnya dilindungi oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Hal mana LP Wirogunan sebetulnya LP untuk orang dewasa.

Sub bab ketiga adalah menyajikan gambaran hukum internasional terhadap perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, pada sub bab ini berusaha menggambarkan bagaimana kepedulian masyarakat internasional terhadap masalah perlindungan hak-hak anak.

Bab IV adalah bab penutup yang terdiri dari sub bab yaitu bab-bab kesimpulan, dimaksudkan untuk menyimpulkan secara umum dan khusus terhadap hasil penelitian dan analisa dalam tesis ini, yang selanjutnya diikuti dengan saran-saran terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Akhirnya sebagai pertanggung jawab ilmiah penulisan tesis ini, pada bagian akhir disertakan daftar pustaka yang dipergunakan sebagai dasar acuan dalam penulisan tesis ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. HAKEKAT BEKERJANYA HUKUM DALAM BIROKRASI PENGADILAN

Salah satu ciri negara modern adalah adanya struktur atau birokrasi untuk mengatur, mengelola dan mengoperasikan sub-sub sistem pendukung penyelenggaraan negara dengan baik (efektif, efisien dan sistematis dalam mencapai tujuan).

Disamping adanya birokrasi pemerintahan sebagai sub sistem yang urgent dalam suatu negara modern, diperlukan juga birokrasi peradilan sebagai sarana penting dalam penyelenggaraan penegakan keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Birokrasi Peradilan dalam penyelenggaraan Pengadilan di Indonesia terdiri dari Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpusat pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Birokrasi Peradilan erat kaitannya dengan sistem peradilan yang menempatkan Lembaga Kehakiman dalam posisi yang independen/mandiri.

Konstitusi Indonesia secara jelas mengakui kemandirian hakim yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, serta secara tidak

langsung tersirat dalam peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan peradilan. Namun dalam kenyataannya akhir-akhir ini kemandirian hakim secara langsung maupun tidak langsung kembali dipersoalkan. Banyak pengamat meragukan eksistensi kemandirian hakim dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena dari beberapa kasus (sebut saja misalnya kasus dalam persidangan gembong GPK Fretilin Xanana Guzman, kasus persidangan gugatan warga Kedung Ombo, kasus persidangan perkara-perkara korupsi Bapindo-Golden Key dan lain-lain) menampakkan adanya pengaruh dari luar (kekuasaan) yang menghalangi keberadaan kemandirian hakim.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kemandirian hakim ini termasuk dengan meningkatkan kesejahteraan hakim (dengan menaikkan gaji dan tunjangan hakim, dengan konsep untuk menjadikan hakim sebagai pejabat negara dengan segala konsekuensinya). Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Purwoto S. Gandasubrata berpendapat bahwa sudah saatnya Kedudukan dan keuangan Hakim diatur dalam Peraturan tersendiri di luar peraturan tentang Pegawai Negeri lainnya.²¹⁾ Namun itu semua ternyata belum sepenuhnya cukup untuk menyelesaikan masalah.

Masih banyak faktor yang perlu dikaji untuk mencari hal-hal yang mempengaruhi kemandirian hakim.

²¹⁾Kompas, 23 Januari 1995, Halaman 6.

Misalnya saja status hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil (Anggota KORPRI) atau sebagai Militer (Anggota ABRI) dengan segala konsekuensinya, mau-tidak mau juga dapat mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu menarik sekali mengkaji masalah kemandirian hakim dari sisi Lembaga dan Pranata Hukum yang berkaitan dengan peradilan. Kajian Pranata tersebut akan mengarah pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengadilan (Khususnya UU No. 14 Tahun 1970) sedangkan kajian Lembaga akan mengarah pada analisis terhadap Birokrasi Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970, maka Badan Peradilan di Indonesia terdiri dari :

1. Lingkungan Peradilan Umum;
2. Lingkungan Peradilan Agama;
3. Lingkungan Peradilan Militer;
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat badan peradilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi (Pasal 10 ayat (2)).

Hal-hal yang berkaitan dengan organisatoris, administratif dan finansial pada Badan-badan peradilan tersebut, ada dibawah departemen yang bersangkutan (Pasal 11 ayat (1)) kecuali Mahkamah Agung karena

kedudukannya sebagai Lembaga Tinggi Negara maka mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri (Pasal 11 ayat (2)). Selanjutnya mengenai susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan Peradilan tersebut diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

1. Mahkamah Agung (MA).

Susunan, kekuasaan serta acara dari Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 73). Dalam penjelasan umum Undang-Undang ini antara lain disebutkan bahwa salah satu prinsip yang telah diletakkan dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970, adalah bahwa peradilan harus menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Seiring dengan prinsip tersebut di atas serta sebagai upaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di negara hukum RI maka dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan. Selanjutnya untuk memperoleh Hakim Agung yang merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar, diperlukan persyaratan sebagai mana diatur dalam undang-undang ini yaitu bahwa pada prinsipnya pengangkatan Hakim Agung berdasarkan sistem karier

dan tertutup.

Undang-undang ini memberi keleluasaan untuk menetapkan pembagian tugas dalam susunan organisasinya (dalam arti secara organisatoris, administratif dan finansial ditentukan oleh Mahkamah Agung sendiri, tidak berada di bawah suatu Departemen), oleh sebab itu dalam tubuh Mahkamah Agung selain ada Panitera yang lebih memusatkan perhatiannya kepada tugas-tugas yang bersifat teknis peradilan, juga terdapat Sekretaris Jenderal yang berkonsentrasi pada tugas-tugas yang bersifat administratif.

Dengan susunan organisasi seperti yang telah diuraikan di atas serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kekuasaan Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985 Kemandirian Hakim Agung lebih baik eksistensinya.

2. Peradilan Umum

Susunan dan kekuasaan peradilan umum diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sedangkan Hukum Acaranya secara umum diatur dalam HIR/Rbg (untuk peradilan Perdata) dan KUHAP (untuk peradilan pidana).

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No 2/1986) yang dilaksanakan oleh : (Pasal 6).

- a. Pengadilan Negeri, sebagai peradilan tingkat pertama;
- b. Pengadilan Tinggi, sebagai peradilan tingkat Banding.

Dalam penjelasan umumnya antara lain disebutkan bahwa Undang-undang No. 2 Tahun 1986 ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Hal ini juga dapat dibuktikan dari ketentuan Pasal-Pasalnya yang tetap mengacu pada Undang-undang No. 14 Tahun 1970.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 maka dalam UU. No. 2 tahun 1986 disebutkan bahwa dalam pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Pasal 5 ayat (1) UU. No. 2/1986) artinya dalam bidang yustisial Pengadilan berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 5 ayat (2) UU. No. 2/1986) artinya dalam hal organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan berada dibawah Departemen Kehakiman. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Departemen Kehakiman, maka Pembinaan Pengadilan dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam kaitannya dengan masalah kemandirian hakim maka secara normatif tetap dijamin dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU. No. 2/1986 yang menegaskan bahwa "*Pembinaan sebagaimana dimaksud kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara*". Ketentuan demikian dipertegas lagi dalam Pasal 13 UU. No. 2/1986 dalam kaitannya pembinaan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Tinggi sebagai Pegawai Negeri Sipil dibawah Departemen Kehakiman.

3. Peradilan Agama

Susunan dan kekuasaan peradilan Agama diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sedangkan Hukum Acaranya secara umum diatur dalam HIR/Rbg sebagai *lex generalis* dan dalam Bab IV (Pasal 54 sampai dengan Pasal 91) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagai *lex specialis*.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yaitu : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadagah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (Pasal 2 jo. Pasal 49 UU. No. 7/1989). Dalam pelaksanaannya peradilan agama dilakukan oleh: (Pasal 6).

- a. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
- b. Pengadilan Tinggi Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Dalam penjelasan umumnya antara lain disebutkan bahwa Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan NO. 14 Tahun 1970. Hal ini juga dapat dibuktikan dari ketentuan Pasal-Pasalnya yang tetap mengacu pada Undang-undang No. 14 Tahun 1970.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan pasal 11 ayat (1) UU. No. 14 tahun 1970 maka dalam UU. No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa dalam pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Pasal 5 ayat (1) UU. No. 7/1989) artinya dalam bidang yustisial Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama (Pasal 5 ayat (2) UU. No. 7/1989) artinya dalam hal organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama berada dibawah Departemen Agama. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama, maka Pembinaan Pengadilan Agama berada dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Dalam kaitannya dengan masalah kemandirian hakim maka secara normatif tetap dijamin dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU. No. 7/1989 yang menegaskan bahwa "*Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara*". Ketentuan demikian dipertegas lagi dalam Pasal 12 UU. No. 7/1989 dalam kaitannya pembinaan Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Tinggi Agama sebagai Pegawai Negeri Sipil dibawah Departemen Agama.

4. Peradilan Militer

Susunan dan kekuasaan peradilan Militer sampai saat ini masih diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1950 Tentang Menetapkan "Undang-undang Darurat Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan". Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Federal. Sedangkan Hukum Acaranya secara umum diatur dalam Undang-undang No. 1/Drt/1958 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan sebagai *lex specialis* dan KUHP (UU. No. 8 Tahun 1981) sebagai *lex generalis*.

Dilihat dari tahun pemberlakuannya sebenarnya Undang-undang tentang Peradilan Militer ini sudah

tidak memadai lagi, apalagi Undang-undang ini dibentuk jauh sebelum UU. No. 14 tahun 1970 lahir dan (karena keadaan saat itu) masih berlandaskan Konstitusi Sementara. Namun karena berbagai hal Undang-undang ini masih dipergunakan dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu agar sedapat mungkin tidak bertentangan dengan UU. 14 tahun 1970, UUD 1945 dan Pancasila²²⁾, misalnya penyesuaian nama/istilah.

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi Anggota Angkatan bersenjata Republik Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan ABRI atau warga sipil dengan persetujuan antara Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan Menteri Kehakiman berkaitan dengan perkara Pidana terhadap Kejahatan dan Pelanggaran (Pasal 3 ayat (1) UU. No. 5/1950). Dalam pelaksanaannya peradilan Militer dilakukan oleh :

- a. Mahkamah Militer, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bagi anggota ABRI yang berpangkat Kapten ke bawah (Pasal 10 UU.No.5/1950);
- b. Mahkamah Militer Tinggi, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bagi anggota ABRI yang berpangkat

²²⁾ Chanada Achsani (Kepala Mahkamah Militer II/11 Yogyakarta) dalam ceramahnya pada para peserta Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) - LBH Yogyakarta, 16 Juli 1993.

Mayor ke atas (Pasal 16 UU.No.5/1950) dan Pengadilan Tingkat Banding bagi perkara-perkara yang diputus oleh Mahkamah Militer (Pasal 18 UU.No.5/1950);

- c. Mahkamah Militer Agung, sebagai Pengadilan Tingkat Banding bagi perkara yang diputus oleh Mahkamah Militer Tinggi (Pasal 30 UU.No.5/1950) dan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir bagi Anggota ABRI yang menjabat sebagai Menhankam, PANGAB, Kepala Staf Angkatan dan dipersamakan (Pasal 31 UU.No.5/1950).

Dalam Surat Keputusan Panglima ABRI No. Kep/01/P/1984 antara lain disebutkan bahwa pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dari Mahkamah Militer dilakukan oleh Panglima ABRI, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Menteri Pertahanan dan Keamanan sebagai pembina personil ABRI yang berwenang melakukan pembinaan terhadap Hakim Militer sebagai Anggota ABRI.

Berkaitan dengan masalah kemandirian hakim, tidak ada ketentuan dalam UU.No 5 Tahun 1950 yang jelas mengaturnya, bahkan apabila dicermati ada beberapa Pasal yang memungkinkan turut campurnya Presiden dalam peradilan, ini jelas bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU.No.14/1970.

Ini dapat dipahami karena kondisi Negara Republik Indonesia Serikat pada saat Undang-Undang ini dibentuk menempatkan Presiden dengan kekuasaan yang sangat besar. Oleh sebab itu dalam Pasal 3 Sub Lampiran IV, V dan VI Lampiran "K" S.K. PANGAB No. Kep/01/P/1/1984, ditegaskan bahwa Bamahil (Badan Mahkamah Militer dalam hal ini adalah Mahmil, Mahmilti dan Mahmilgung) bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bebas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan ABRI. Jadi sebenarnya secara normatif, sekalipun hanya setingkat S.K. Pangab, kemandirian hakim di lingkungan Peradilan Militer juga diakui keberadaannya.

5. Peradilan Tata Usaha Negara

Susunan dan kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Hukum Acaranya diatur dalam Bab IV (Pasal 53 sampai dengan Pasal 141) UU. No. 5 Tahun 1986.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 14 UU.No.5/1986). Dalam pelaksanaannya peradilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh : (Pasal 8)

a. Pengadilan Tata Usah Negara, sebagai Pengadilan

Tingkat Pertama;

- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Dalam penjelasan umumnya antara lain disebutkan bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Hal ini juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal-Pasalnya yang tetap mengacu pada Undang-undang No. 14 Tahun 1970.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970 maka dalam UU. No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa dalam pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Pasal 7 ayat (1) UU.No.5/1986) artinya dalam bidang yustisial Pengadilan Tata Usaha Negara berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat (2) UU.No. 5/1986) artinya dalam hal organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Tata Usaha Negara berada dibawah Departemen Kehakiman.

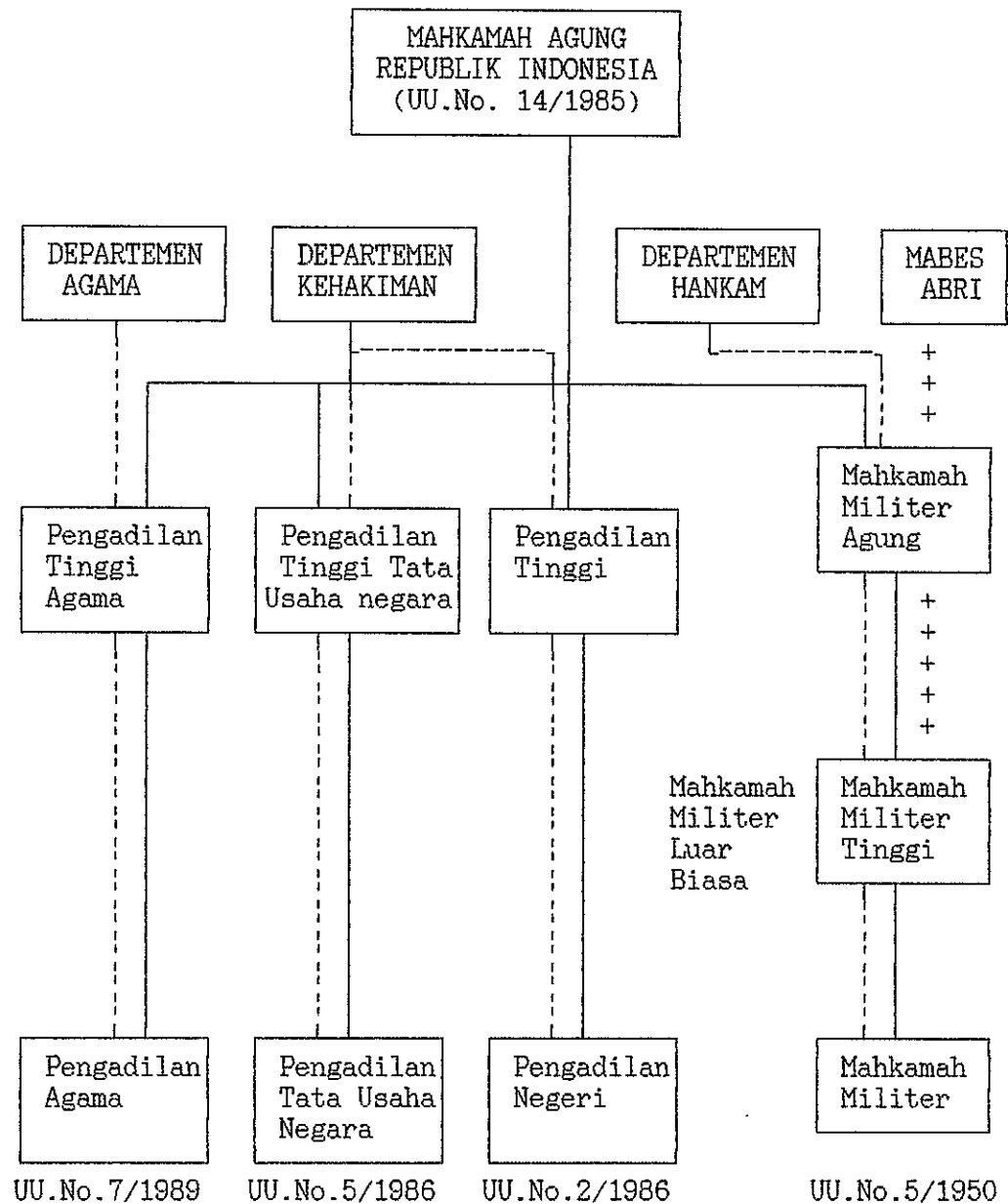
Dalam kaitannya dengan masalah kemandirian hakim maka secara normatif tetap dijamin dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU.No.5/1986 yang

menegaskan bahwa "*Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara*". Ketentuan demikian dipertegas lagi dalam Pasal 13 UU.No.5/1986 dalam kaitannya pembinaan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Tinggi Tata Usaha negara sebagai Pegawai Negeri Sipil dibawah Departemen Kehakiman.

Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa secara normatif kemandirian hakim atau kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya diakui dan dijamin dengan Undang-undang pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara demikian pula pada lingkungan peradilan peradilan militer sekalipun hanya diatur dalam S.K. PANGAB. Namun apabila dalam pelaksanaan ketentuan tersebut ternyata masih belum mampu untuk menghilangkan pengaruh yang menghalangi kemandirian hakim, maka hal ini yang dikaji oleh penulis dalam sub bab selanjutnya melalui analisis terhadap birokrasi pengadilan.

Selanjutnya untuk memperjelas uraian tersebut di atas maka susunan badan peradilan di Indonesia berdasarkan UU. No. 14 tahun 1970 beserta Peraturan Pelaksanaannya dapat digambarkan melalui Bagan sebagai berikut :

SUSUNAN BADAN PENGADILAN DI INDONESIA
BERDASARKAN UU.NO. 14 TAHUN 1970
DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA



Keterangan :

- Hubungan Teknis Yustisi
- Hubungan Organisatoris,
Administratif, Finansial
- +++++ Garis Komando Operasional

Birokrasi Badan Pengadilan Antara Konsep Dan Implementasinya

Birokrasi yang ideal menurut Max Weber adalah birokrasi yang memiliki ciri-ciri :²³⁾

1. Adanya pembagian tugas yang jelas dan Spesialisasi;
2. Menetapkan prinsip hirarkis wewenang;
3. Adanya sistem peraturan yang abstrak yang konsisten;
4. Sikap "*sine ira et studio*" (formal dan tidak bersifat pribadi);
5. Jenjang karir dikaitkan dengan senicritis atau prestasi kerja atau gabungan keduanya;
6. Menonjolkan efisiensi administrasi.

Setiap organisasi formal minimal harus memiliki ciri-ciri birokrasi type ideal seperti tersebut di atas. Namun demikian penerapan terlalu kaku sering kali menjebak organisasi tersebut dalam ketidak-efisienan. Weber sendiri dalam perkembangannya banyak mendapat kritikan terhadap teorinya tentang konsep birokrasi ideal.

²³⁾Peter M, Blau dan Marshall W, Birokrasi dalam Masyarakat Modern, UI-Press, Jakarta, 1987, Halaman 27-32.

Pengadilan sebagai organisasi formal sebaiknya juga memiliki keenam ciri birokrasi ideal tersebut agar pelayanan masyarakat pencari keadilan dapat terselenggara dengan baik.

Prinsip pembagian tugas dan spesialisasi juga dikenal dalam birokrasi pengadilan di Indonesia. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Badan Peradilan di Indonesia terdiri atas empat yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pada hakekatnya merupakan pembagian tugas berkaitan dengan jenis perkara, justisiabel peradilan dan hukum serta prosedur yang dijadikan aturan mainnya. Disamping pembagian tugas tersebut konsep pelaksanaan peradilan di Indonesia juga dimungkinkan adanya spesialisasi hakim ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya karena keterbatasan jumlah personil hakim yang tersebar di seluruh Indonesia spesialisasi sulit diterapkan disamping mobilitas hakim (karena mutasi) relatif tinggi. Prinsip pembagian tugas dan spesialisasi tidak terlalu berpengaruh terhadap masalah kemandirian hakim, bahkan jika diterapkan secara konsekuen dapat dijadikan sarana untuk memperkuat kemandirian hakim.

Birokrasi badan peradilan di Indonesia memiliki hirarkis kewenangan yang unik dimana di satu sisi hirarki badan peradilan berpuncak pada Mahkamah Agung disisi lain hirarki badan peradilan berpuncak pada

Departemen terkait. Kondisi demikian menempatkan hakim pada posisi sebagai Yuris dengan segala otonominya sekaligus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota ABRI dengan konsekuensi hubungan hirarki atasan-bawahan-nya. Posisi yang dualisme hirarki pada diri hakim tersebut yang sering dianggap sebagai halangan untuk mempergunakan kemandiriannya.

Di sisi lain hirarki dualisme pada birokrasi badan peradilan juga memiliki kelebihan-kelebihan. Ditinjau dari konsepnya, maka dengan pembagian hirarki tersebut, Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi dapat berkonsentrasi pada pembinaan teknis yustisi terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya. Tugas utama ini sangat penting karena pengadilan merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan. Sedangkan Departemen terkait melaksanakan tugas lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pembinaan bidang organisatoris, administratif dan keuangan.

Jadi sekali lagi dualisme hirarki dari konsepnya memang diperlukan disamping dari faktor historisnya sudah mapan dan dari faktor sumber finansialnya. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi tumpang tindih wewenang yang mengkaburkan jalur hirarki tersebut, misalnya dalam hal mutasi hakim yang sebenarnya merupakan masalah administratif dan merupakan kewenangan Menteri (jalur Departemen) namun dalam pelaksanaannya justeru penentu kebijakan ada pada

Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat dari prosedur hakim yang ingin pindah atau mengajukan permohonan peninjauan kembali S.K. Mutasinya, seringkali melakukan pendekatan ke Mahkamah Agung dari pada ke Departemen. Contoh lagi misalnya masalah Pengaturan mengenai Tata Tertib Persidangan yang sebenarnya menyangkut teknis yustisi justru diatur dengan S.K. Menteri Kehakiman. Oleh sebab itu untuk menyesuaikan dengan lingkungan peradilan yang lagi Undang-undang Peradilan Militer (UU.No.5 Tahun 1950) masih tetap berlaku sambil menunggu Undang-undang Peradilan Militer yang baru (yang sesuai dengan UU.No. 14/1970) dengan penyesuaian-penyesuaian melalui peraturan pelaksanaannya.

Peraturan-peraturan yang bervariasi yang dipergunakan dalam penyelenggaraan peradilan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap eksistensi kemandirian hakim.

Sebagai lembaga yang independen dan mengutamakan keobyektifan maka birokrasi badan peradilan harus menghindari segala sesuatu yang bersifat pribadi. Weber mengatakan bahwa agar pedoman-pedoman yang rasional bisa mempengaruhi jalannya pelaksanaan tugas, maka di dalam organisasi (terutama dalam menghadapi klien-klien), seseorang harus menampilkan pendekatan yang tidak mempunyai ikatan.²⁴⁾ Salah satu sikap yang harus

²⁴⁾Ibid, Halaman 29.

dimiliki oleh seorang hakim adalah adil dan tidak memihak, dalam hukum acarapun ditentukan bahwa antara hakim dengan para pihak atau dengan terdakwa tidak boleh ada hubungan darah. Lebih jauh lagi sebagaimana diatur dalam Kode Kehormatan Hakim, seorang hakim tidak boleh mempunyai hubungan emosi dengan perkara yang ditanganinya. Dalam hal ini pejabat pengadilan terutama hakim tidak boleh terpengaruh dengan perasaan-perasaan dendam, nafsu, simpati yang berlebihan atau pengaruh opini-opini yang dapat mempengaruhi kebebasannya dalam menjatuhkan putusan.

Namun hubungan formal dalam birokrasi peradilan disisi lain juga dapat menjebak hakim dalam posisi yang sulit. Di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara status hakim adalah Pegawai Negeri Sipil, suatu status yang menekankan pada birokrasi hubungan atasan bawahan dan kesetiaan pada korps (KORPRI). Kondisi lingkungan budaya Indonesia (Jawa) yang *ewuh-pakewuh*, semakin memperkuat pengaruh yang kurang menguntungkan bagi kemandirian hakim. Terlebih lagi di lingkungan Peradilan Militer dimana baik Hakim Militer maupun Hakim Perwira-nya berstatus anggota ABRI. Disatu sisi sebagai hakim harus bersikap independent disisi lain sebagai prajurit harus menjunjung tinggi Sapta Marga yang salah satunya adalah keharusan untuk taat pada perintah atasan.

Jelaslah bahwa hubungan formal dan tidak pribadi dalam birokrasi badan peradilan satu sisi sangat mendukung eksistensi kemandirian hakim namun di sisi lain menimbulkan kondisi kurang menguntungkan bagi kemandirian hakim. Keadaan yang demikian hanya dapat diatasi dengan sikap pribadi hakim itu sendiri, kapan dia menempatkan dirinya sebagai PNS/ABRI dan dia menempatkan dirinya sebagai hakim.

Baik dalam Undang-undang Mahkamah Agung maupun dalam Undang-Undang Peradilan pada semua lingkungan peradilan ditentukan bahwa Hakim merupakan jabatan karier, artinya bahwa jenjang karier hakim ditentukan oleh prestasi maupun senioritasnya. Misalnya untuk menduduki jabatan tertentu dalam suatu pengadilan seorang hakim disamping diuji kemampuan/potensinya juga disyaratkan telah bertugas sekian tahun pada jabatan sebelumnya.

Kini penentuan jabatan berdasarkan jenjang politis di lingkungan peradilan berangsur-angsur mulai berganti dengan jenjang karier. Kemandirian hakim sangat didukung oleh sikap hakim untuk menempatkan dirinya pada posisi yang tidak memihak. Sikap ini tentu saja memerlukan kemampuan dan pengalaman yang cukup panjang yang sangat sulit dilakukan oleh pejabat yang tidak berasal dari lembaga kehakiman yang secara politis diangkat sebagai hakim. Dengan kata lain dalam hal ini jenjang karier dengan berbagai alasan dirasa

lebih menguntungkan.

Ciri yang terakhir dari suatu birokrasi yang ideal dan sekaligus merupakan tujuannya adalah efisiensi yang tinggi. Dengan hirarki yang dualisme pada birokrasi pengadilan diharapkan akan mencapai efisiensi yang tinggi karena masing-masing hirarki berkonsentrasi pada bidang binaan masing-masing. Akan tetapi pembagian kewenangan atau program-program yang saling terkait seringkali menimbulkan overlapping yang akhirnya justru semakin membuat tidak efisien misalnya berkaitan dengan program pelatihan untuk meningkatkan kualitas hakim/calon hakim di bidang hukum, Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman masing-masing menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan dalam waktu yang tidak bersamaan. Dalam hal pengawasan terhadap hakim seringkali antara Mahkamah Agung dengan Departemen terkait saling mencampuri. Artinya karena tidak jelas batas kewenangan antara kedua hirarkis dalam birokrasi pengadilan seringkali menyebabkan penggandaan pekerjaan maupun anggaran untuk rencana atau tujuan yang sama.

Birokrasi Tunggal Dalam Badan Peradilan, Antara Konsep, Realita Kemampuan Dan Alternatif Pemecahannya

Organisasi merupakan unsur yang terpenting dari suatu birokrasi. Suatu organisasi didesain berkaitan dengan banyak faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini Porter berpendapat :

*"By 'organization design' we mean primarly the particular arrangement of the structural factors that constitute the basic form and nature the organization....All these factors together constitute the designs of organisations design that are shaped by both forces and events beyond the control of the organizations them selves and by the deliberate decisions of those who control the resources of the organizations"*²⁵⁾

Faktor-faktor tersebut juga yang menyebabkan berbagai organisasi yang telah berkembang menjadi birokrasi modern, memiliki bentuk, wajah atau penampilan yang berbeda-beda sekalipun pada awalnya didesain sama.

Birokrasi badan peradilan di Indonesia yang memiliki hirarki yang dualisme misalnya, berbeda dengan birokrasi Pengadilan di Amerika atau berbeda dengan birokrasi Kejaksaan yang memiliki hirarki tunggal.

Seperti diketahui bahwa peradilan di Amerika Serikat benar-benar bisa mandiri (dengan sendirinya menjamin kemandirian hakim-hakimnya) karena berawal dari bersikap :

*"...the judiciary has been characterized by three important characteristics : independence, desentra-
lization individualism"*²⁶⁾. Dengan demikian semua badan pengadilan di Amerika mulai dari *District Courts*,

²⁵⁾ Lyman W. Porter, Edward E. Lawler III, J. Richard Hackman, *Behavior in Organizations*, Mc Graw Hill Book Company, New York, 1975, Halaman 221.

²⁶⁾ Robert A. Carp and Ronald Stidham, *Judicial Process in Amerika*, Congressional Quarterly Inc (CQ-Press), Washington, D.C., 1990, Halaman 59.

Courts of Appeals, baik yang berupa *Trial Courts of General Jurisdiction* maupun *Trial Courts of Limited Jurisdiction*, semua langsung dibawah *Supreme Court*. Otonomi dan kemandirian U.S. Courts tersebut juga didukung oleh tingginya kesadaran hukum warga Amerika sehingga penyelenggaraan peradilan dapat dilaksanakan dengan tanggungan biaya perkara (*Courts Cost*) yang cukup memadai.²⁷⁾

Satu perbandingan lagi yaitu Birokrasi Kejaksaan di Indonesia yang disusun dalam suatu birokrasi tunggal dibawah koordinasi Jaksa Agung RI di bidang teknis yustisinya maupun di bidang organisatoris, administrasi dan kuangannya.

Pertanyaan muncul berkaitan dengan perbandingan di atas adalah : apakah diperlukan suatu *reorganisasi* pada birokrasi pengadilan di Indonesia dalam rangka peningkatan otonomi dan kemandirian hakim Indonesia ?²⁸⁾

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sebagai organisasi

²⁷⁾ Ibid, Halaman 51.

²⁸⁾ Penulis pernah mendiskusikan masalah ini dengan beberapa rekan sejawat, prasarana yang diajukan oleh penulis adalah bahwa reorganisasi pada birokrasi tersebut dalam satu atap yaitu Mahkamah Agung. Sebagai konsekuensinya Departemen Kehakiman dihapuskan. Pertimbangannya tidak sekedar hilangnya Direktorat Jenderal Pembinaan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, namun juga dengan pertimbangan bahwa dilihat dari substansinya pola kerjanya Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan (Dirjenkumundang) lebih mendekati Lembaga Sekretariat Negara (SekNeg), Direktorat Jenderal Pemasarakatan cenderung ke Departemen Sosial, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat berintegrasi dengan Departemen

yang mewadahi inspirasi dan kepentingan para hakim di seluruh Indonesia pernah memperjuangkan masalah ini (sekalipun tidak se-ekstrem pendapat penulis tersebut diatas. Dalam dua kali Musyawarah Nasionalnya yaitu Munas (Luar Biasa) Ikahi IV (Jakarta, 23-30 Nopember 1966) dan Munas Ikahi V (Yogyakarta, 18-20 Oktober 1986), Ikahi memperjuangkan agar Peradilan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Menteri Kehakiman. Dalam salah satu butir keputusannya berbunyi :

"Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang langsung melayani kepentingan rakyat pada umumnya dan berhubungan dengan hak-hak azasi manusia mutlak harus teknis, organisatoris, administratif dan finansil ada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan tidak dibawah Departemen Kehakiman, sedangkan Peradilan Agama dan Peradilan Militer sebagai peradilan yang khusus, teknis dibawah pimpinan Mahkamah Agung tetapi organisatoris, administratif dan finansil dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan"²⁹⁾

Bahkan dalam Musyawarah Kerja (Muker) Ikahi yang diadakan di Jakarta pada tanggal 14-15 Pebruari 1970, Butir keputusan tersebut di atas di ajukan kepada DPR-GR sebagai usul/konsep/memorandum untuk dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) RUU Ketentuan Pokok

...Luar Negeri dan Badan Pembinaan Hukum Indonesia (Banbinkumnas) dapat dijadikan bagian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau dimasukkan ke dalam Litbang. M.A.

²⁹⁾Lihat: Ikahi, Buku Peringatan 35 Tahun Ikatan hakim Indonesia, Jakarta, 1988, Halaman 26, Halaman 32, dan Halaman 43. Dalam Keputusan yang dinamakan sebagai "Keputusan Tentang Kebebasan Kekuasaan Kehakiman dan Hakim seluruh Indonesia Sebagai Penegak Hukum, Kebenaran dan Keadilan" dari Munas IV Ikahi sampai Munas V Ikahi, butir tersebut ditulis sama persis.

Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam perkembangannya ternyata butir yang diperjuangkan oleh Ikahi dalam rangka menghapus dualisme tersebut akhirnya kandas. Undang-undang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1970 yang muncul kemudian tetap menentukan bahwa secara teknis semua badan peradilan ada dibawah Mahkamah Agung dan secara organisatoris, administrasi dan finansial tetap berada dibawah Departemen yang terkait. Perjuangan Ikahi tersebut hanya menghasilkan dokumen yang memuat konsensus, bahwa akan diadakan atau dibentuk Direktorat Jenderal ini sudah matang, akan diserahkan kepada Mahkamah Agung. Namun itu hanyalah sebuah konsensus di luar Undang-Undang, oleh karena itu konsensus tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada sanksinya apabila tidak dilaksanakan³⁰⁾, dan kenyataannya sampai saat ini Dirjen. Pembinaan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara tetap berada dibawah Departemen Kehakiman, sekalipun dijabat oleh seorang Hakim Agung³¹⁾.

Penulis sendiri berpendapat bahwa reorganisasi pada birokrasi badan peradilan pada saat ini belum saatnya diperlukan atau barangkali bahkan tidak perlu. *Reasoning*-nya adalah :

30) *Ibid*, Halaman 51-52.

31) Saat tesis ini ditulis, Direktur Jenderal Pembinaan Umum dan Tata Usaha Negara dijabat oleh Ibu Lies Sugondo. Selain menjabat sebagai Dirjen di lingkungan Departemen Kehakiman R.I., beliau juga menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung R.I.

1. Birokrasi peradilan di Indonesia dengan ciri dualisme hirarkinya sudah terlanjur *mapan*, baik karena faktor historisnya maupun karena faktor sumber finansialnya. Status Hakim di Indonesia merupakan kelanjutan dari Status *Rechtsambtenaar* pada jaman kolonial akibat tidak memungkinkannya sumber dana penyelenggaraan peradilan diandalkan dari para pencari keadilan sehingga dana itu sepenuhnya sampai saat ini.
2. Perubahan atau reorganisasi dalam suatu birokrasi seringkali justru menimbulkan penurunan dan terganggunya efisiensi³²⁾.
3. Sekalipun terbentuk birokrasi tunggal pada badan peradilan tetap tidak akan menambah jaminan terhadap eksistensi kemandirian hakim, jika tidak disertai perbaikan faktor-faktor lainnya, misalnya kesejahteraan hakim, intelektualitas - hakim, mentalitas hakim, sistem penegakan keadilan dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk dapat memahami peradilan sebagai suatu organisasi, ia dapat diperinci ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :³³⁾

³²⁾Peter M. Blau and Marshall W. Meyer, *Op.Cit*, Halaman 50.

³³⁾Satjipto Rahardjo. *Op.cit.*, hal. 70.

Unsur-unsur organisasi	Yang menjalankan
1. Orang-orang	Para pelaksana tugas
2. Teknik-teknik	Teknologi yang dipakai untuk menjalankan tugas.
3. Informasi	Pengetahuan yang dipakai untuk menjalankan tugas
4. Struktur	Pengaturan tugas
5. Tujuan	Alasan bagi menjalankan tujuan

Dari unsur-unsur organisasi di atas, unsur orang atau manusia merupakan unsur yang paling esensial dalam bekerjanya suatu organisasi dan memiliki kedudukan yang unik. Dalam hubungan ini Van Doorn mengatakan sebagai berikut :

"Ia merupakan kebersamaan dan keadaan keterikatan dari sejumlah manusia, yang tidak hanya keluar dari kerangka organisasi, karena manusia selalu cenderung untuk keluar dari setiap bentuk konstruksi organisasi, melainkan juga karena setiap kali terjatuh di luar skema (organisasi), disebabkan oleh karena cenderung untuk memberikan tafsirannya sendiri mengenai fungsinya dalam organisasi, berdasarkan kepribadiannya, asal-usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya, serta keyakinan, politik dan pandangan hidupnya sendiri."³⁴⁾

Untuk dapat memahami bekerjanya suatu organisasi, maka harus dilihat variabel-variabel yang mempengaruhi atau yang terlibat didalam pengambilan putusan atau tindakan. Kadang kala akan di jumpai kesulitan didalam

³⁴⁾ Satjipto Rahardjo, Op. cit, hal. 26.

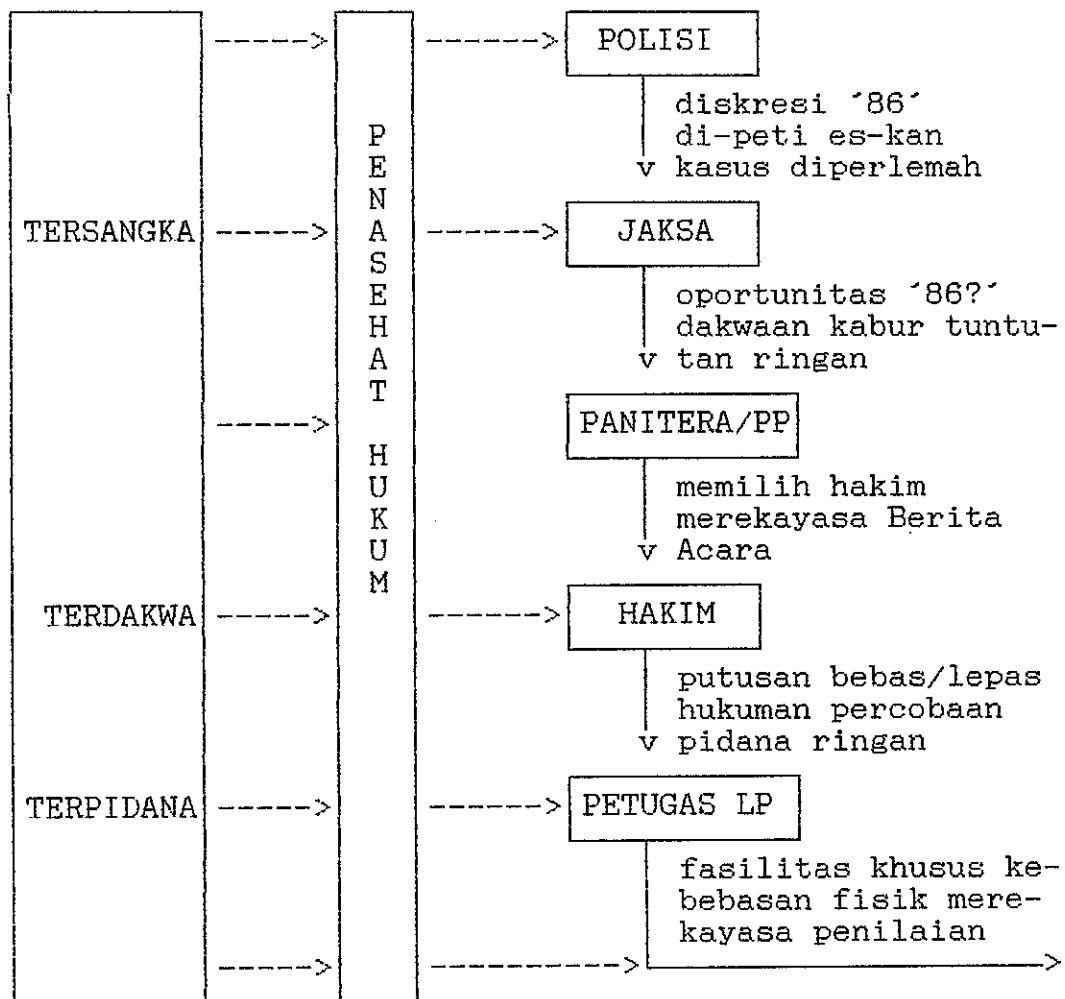
menentukan variabel mana yang merupakan sebab dan variabel yang ada saling terkait satu sama lain dan variabel-variabel tersebut mempunyai potensi untuk saling mempengaruhi. Hal ini merupakan tantangan untuk bisa mengetahui bagaimana kompleksitas hubungan-hubungan yang terjadi dalam proses suatu organisasi.

Dalam proses peradilan pidana, maka banyak melibatkan organisasi badan peradilan antara lain Kepolisian; Kejaksaan; Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara juga memiliki peran yang cukup penting, hal ini mengingat bahwa LP dan RUTAN merupakan bagian dari peradilan pidana.

Menurut Wisnubroto dalam bukunya Badan Peradilan dalam berbagai perpektif mengatakan bahwa Peradilan merupakan unsur yang sangat vital dalam penyelenggaraan negara yang bersendikan hukum. Lemahnya lembaga peradilan jelas akan membahayakan kelangsungan hidup suatu negara. Dengan demikian masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan perhatian yang optimal. Dengan adanya perlindungan hak-hak anak tersebut akan selaras dengan tujuan kesejahteraan sosial masyarakat.³⁵⁾

³⁵⁾ Wisnubroto, 1996 Badan Peradilan dalam Berbagai Perpektif, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Bentuk-bentuk kolusi peradilan pidana dapat dideskripsikan dalam bagan sebagai berikut :



Bentuk kolusi pada proses peradilan perdata pada hakekatnya sama saja, hanya peran yang menonjol ada pada diri Hakim (untuk menenangkan pemberi order) disamping Panitera/PP dan Juru Sita sebagai Eksekutor dan pengacara sebagai Kuasa Hukum.

Secara kriminologis bentuk-bentuk perbuatan kolusi tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan, karena dalam beberapa hal, apa yang dilakukan oleh

oknum-oknum penegak hukum tersebut secara umum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telah diatur / dirumuskan dalam undang-undang Hukum Pidana yang berlaku (penyuapan, pemalsuan, korupsi dan lain sebagainya). Disamping itu perbuatan yang menimbulkan kolusi tersebut sangat menjengkelkan, merugikan dan menimbulkan korban (dalam hal ini adalah korban kejahatan, keluarga korban dan masyarakat pada umumnya).

B. HAKEKAT PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan untuk sebuah masyarakat. Pembangunan nasional berusaha menciptakan manusia indonesia yang sehat jasmani sekaligus rokhaninya, dalam keseimbangan, keselarasan dan keserasian. Apa yang dicapai dari pembangunan masa kini akan terus berkeseimbangan dengan pembangunan di masa depan oleh generasi berikutnya.

Dalam pengertian masyarakat seluruhnya ini termasuk juga anak-anak sebagai generasi bangsa, dengan demikian anak-anak bukanlah sekedar sebagai obyek pembangunan, ia juga harus menjadi subyek pembangunan, ia juga harus menjadi subyek pembangunan. Dalam rangka menjadikan subyek pembangunan, anak-anak harus diprioritaskan dalam pembangunan.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak agar dapat

melaksanakan hak³⁶⁾, dan kewajibannya.³⁷⁾

Pada dasarnya perlindungan hak-hak anak ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, yang memungkinkan anak-anak bisa menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, kebangsaan atau status sosial.³⁸⁾

Anak-anak mempunyai hak-hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak manusia dewasa sebagai warga negara, dan dalam segala keadaan hak-hak anak ini harus didahulukan dari kepentingan yang lain. Anak-anak sejak dalam kandungan ibunya telah mempunyai hak hidup dan hak atas pemeliharaan dan perlindungan. Setelah ia

³⁶⁾Rousseau menegaskan bahwa dalam segala persoalan yang berhubungan dengan anak-anak. Seyogyanya kita lebih banyak membicarakan tentang hak-haknya daripada kewajibannya. Shanty Dellyana: **Wanita dan Anak Di Mata Hukum**, Yogyakarta : Liberty. 1988. catatan kaki nomer 1. halaman 45.

³⁷⁾Ibid, halaman: 37. Bandingkan : Arief Gosita melihat perlindungan anak sebagai suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepemimpinannya dan hak asasinya. Arief Gosita: **Masalah Perlindungan Anak**. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, halaman : 3.

³⁸⁾Komitmen keadilan bagi anak-anak ini bisa dilihat Pasal 34 UUD 1945: "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Demikian juga ditegaskan dalam GBHN. Secara khusus dalam Bab mengenai Pembangunan di Bidang ekonomi. Perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar dimasukkan sebagai salah satu ciri positif demokrasi ekonomi.

Tampaknya komitmen keadilan dalam GBHN terhadap fakir miskin dan anak terlantar, mengalami perubahan. Dalam GBHN 1993-1998, komitmen ini sudah berubah (fakir miskin) dan anak terlantar tidak dimasukkan lagi sebagai ciri dari demokrasi ekonomi.

lahir ke dunia, anak-anak berhak untuk memperoleh kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasar atas kasih sayang yang sangat diperlukan dalam proses tumbuhan dan berkembang secara wajar .

Dalam rangka proses tumbuh kembang itu pula, anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhannya, di samping hak-hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Bahkan bagi anak-anak yang bermasalah (fisik, psikis maupun sosial) tetap berhak atas pelayanan dan asuhan yang bertujuan mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan.

Perlindungan anak adalah suatu kewajiban dan ini adalah konsekuensi dari pembangunan manusia seutuhnya. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (hal ini ditegaskan dalam GBHN 1993). Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mempengaruhi hasil pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban. Keamanan, dan pembangunan nasional. Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang berkeselimbangan dengan baik.

Secara normatif hak-hak anak ini antara lain dirumuskan dalam Pasal 2 U.U. No. 4/1979 sebagai berikut:

- anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sehubungan dengan adanya hak anak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar tersebut, maka termasuk pula di dalamnya adalah bahwa anak harus dijauhkan dari segala kesempatan yang memungkinkan mereka menjadi nakal

(*Juvenile delinquency*)³⁹⁾

Mengenai kenakalan anak Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak memberikan pandangan sebagai berikut:

- a. Kenakalan adalah merupakan kelainan-kelainan dari tingkah laku, perbuatan atau tindakan yang bersifat a-sosial. Dalam hal mana terhadap pelanggaran norma-norma agama yang berlaku dalam masyarakat;
- b. Merupakan tingkah laku, tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, yang apabila dilakukan oleh orang yang belum dewasa yang normal disebut pelanggaran atau jabatan yang dapat dituntut dengan hukum menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Tingkah laku, perbuatan serta tindakan-tindakan oleh mereka yang tergolong remaja.⁴⁰⁾

Mengenai kejahatan anak-anak (*juvenile delinquency*), ini J.E. Sahetapy, berpendapat bahwa masalah ini menyangkut pelanggaran norma masyarakat.

³⁹⁾ *Juvenile Delinquency*. (juvenilis, = muda. bersifat kemudaan; *delinquency*, dari *delinquere* = jahat, durjana. pelanggar, nakal) ialah anak-anak muda yang selalu melakukan kejahatan, dimotivasi untuk mendapatkan perhatian status sosial, dan penghargaan dari lingkungannya. Perilaku mereka cenderung lemah, maka impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya jadi tidak terkendali, sehingga tingkah lakunya liar, agresif dan destruktif.

Kartini Kartono: *Patologi Sosial 3 : Gangguan Gangguan Kejiwaan*, Edisi 2 Cetakan 1, Jakarta : Rajawali Pers, 1986, halaman 211.

⁴⁰⁾ Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan anak. *Pola-Pola Penanggulangan Remaja di Indonesia*. Jakarta 1971, halaman : 15.

Sementara itu penyusun RUU Peradilan Anak (1988) merekonstruksikan anak nakal sebagai anak yang berperilaku menyimpang terhadap aturan/peraturan, adat, hukum, agama, sosial, peraturan sekolah dan sebagainya.

Selanjutnya anak nakal itu dibedakan ke dalam anak nakal yang melakukan tindak pidana dan anak nakal yang tidak melakukan tindak pidana.

Pelanggaran norma adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku ini ditentukan oleh sikapnya (*attitude*), dalam menghadapi situasi tertentu.⁴¹⁾

Dengan demikian jelaslah bahwa masalah kejahatan anak-anak (*juvenile delinquency*), adalah masalah yang meminta perhatian kita semua untuk menanganinya dengan seksama. Mengingat sifat dan pikiran anak-anak pelaku kenakalan yang masih belum sepenuhnya disadari oleh mereka sendiri, maka perlu dipahami bahwa perbuatan tersebut tidaklah semata-mata berasal dari niat anak, mungkin sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi penanganannya juga harus berhati-hati, tetap berorientasi pada kepentingan pertumbuhan jiwa dan masa depan anak. Sehingga tidak ada satu alasanpun yang bisa dipergunakan untuk memperlakukan secara sama antara pelaku kejahatan anak dengan pelaku kejahatan dewasa.

Hakikat perlindungan anak tidak lain adalah suatu masalah dasar dalam pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia (kecil) yang pada saatnya nanti tumbuh menjadi manusia (dewasa) yang seutuhnya. Mengabaikan masalah ini berarti akan menimbulkan berbagai macam masalah sosial yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan menghambat terciptanya kesejahteraan anak.

⁴¹⁾ J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro : *Parados dalam Kriminologi*, Jakarta : Rajawali, 1989, halaman : 46,

Perlindungan anak suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolok ukur peradaban tertentu. Jadi demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa.⁴²⁾

C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Dalam proses untuk tumbuh kembang anak menjadi manusia dewasa, seorang anak tidak dapat menghindarkan diri dari proses interaksi sosial yang mau tidak mau mempengaruhi pembentukan jiwanya. Adakalanya dalam proses interaksi sosial tersebut, anak-anak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan membawanya berhubungan dengan aparat penegak hukum.

Karena sifat dan keadaannya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan anak itu sendiri maupun masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Sri Widodojati Wiratmo Soekito.⁴³⁾ Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya

⁴²⁾Shanty Dellyana : *Op.Cit.*, halaman: 18.

⁴³⁾Sri Widodojati Wiratmo Soekitno, *Dokumen Dasar Sistimatika Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak*, Lokakarya Tentang Peradilan Anak. Binacipta, Bandung, 1979, halaman : 69.

berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, namun karena kualitasnya sebagai anak, maka pada umumnya keadaan sekitarnya yang menimpa pada dirinya lebih besar pengaruhnya dalam menentukan sikapnya daripada nilai pribadinya.

Anak-anak yang melakukan kejahatan memerlukan suatu penanganan tersendiri, berbeda dengan pelaku kejahatan dewasa. Mengenai perlunya penanganan khusus (Peradilan Anak) ini ditegaskan oleh **Mason P. Thomas**, Sebagai berikut:

*Legislature have passed laws to establish a sparate court system for children under certain ages because youths should not held accountable under the same standards as adults, and because there may be a better chance of reform or rehabilitation with young people.*⁴⁴⁾

Penyelenggaraan proses peradilan anak sebagai suatu sistem harus berorientasi pada kepentingan hari depan anak, karena anak nakal pada akhirnya harus diperbaiki kembali sifat, tingkah laku, kondisi-kondisi jiwa dan alam pikirannya. Untuk itu yang diperhatikan dalam penanganan masalah tersebut adalah mengembalikan keseimbangan jiwa anak. Mengembalikan kesadaran dan ketaatan anak pada aturan hukum dan tata nilai yang berlaku adalah berbeda dengan cara yang harus dilakukan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan tindak pidana. Oleh sebab itu wajar apabila diperlukan

⁴⁴⁾Robert C Troajanowiez dan Merry Morash : **Juvenile Delinquency Concept and Control**, Third Edition, New Jersey : Prentice-Hall, INC., 1983, halaman : 380.

pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dalam proses peradilan anak, seperti yang sering terungkap di dalam berbagai pernyataan antara lain :

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang;
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kewajiban atau psikologis yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*), serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.⁴⁵⁾

Sehubungan dengan proses stigmatisasi sebagaimana disebutkan di muka, secara teoritis dikupas dalam teori *Labelling*. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Howard Becker, yang menyatakan sebagai berikut :

kejahatan bukan kualitas perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang "pelanggar", sedangkan penjahat adalah seseorang yang kepadanya label tersebut telah berhasil dikenakan kepada seseorang.⁴²⁾

.....Bandingkan dengan Sri Widoyati : ...bagaimanapun tujuan peradilan anak pada dasarnya adalah untuk melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat ia (anak-anak, pen.) dapat kembali ke kehidupan masyarakat yang normal, dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Sri Widodojati : *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1983, halaman : xii.

⁴⁵⁾Barda Nawawi Arief : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan*, dalam Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1992. hal. 115.

⁴²⁾Lihat : I.S. Susanto : *Statistik Kriminal Konstruksi Sosial Penyusunan. Penggunaan dan Penyebarannya. Suatu Studi Kriminologi*, Disertasi, *unpublished*, 1990, halamn : 37.

Frank Tannenbaum, melihat ada dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang kena label (cap) untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya. Pertama, cap/label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap/label tersebut melekat pada diri orang itu. Kedua, label atau cap sudah diadopsi oleh seseorang dan membawa pengaruh pada didrinya. Sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap/label itu diberikan padanya oleh si pengamat.⁴⁶⁾

Seragh, lebih konkret lagi mengemukakan beberapa asumsi dasar dari teori labeling. Di antaranya adalah bahwa seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling, dan usia, tingkatan sosial-ekonomi dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP)⁴⁷⁾

Dengan demikian perspektif labeling

⁴⁶⁾...*the delinquent becoines bad because he is defined as bad because he is not believed if he is good.* demikian sebagaimana dari penjelasan Tannenbaum mengenai proses terjadinya labeling pada anak-anak. Hugh D. Barlow: *Introduction to Criminology*, 1984. Toronto : Little, Brown and Co., halaman : 51, dan Romli Atmasasmita : *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eressco, Bandung, 1992, hal. 40.

⁴⁷⁾Romli Atmasasmita, *I b i d*

mempersalahkan peranan orang lain, yakni penegak hukum dalam menjadikan seseorang sebagai "penjahat"⁴⁸⁾. Berdasar atas pemahaman labeling ini bisa diperoleh gambaran bahwa sebenarnya kejahatan adalah realitas sosial (*Social reality*), yaitu suatu hasil konstruksi dari masyarakat terhadap suatu gejala sosial.⁴⁹⁾

Realitas sosial ini sering kali tidak menguntungkan bagi pihak yang dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan masyarakat atau perbuatan yang melanggar hukum (kejahatan). Sehingga sering kali pula pelaku kejahatan tersebut harus menanggung cap sebagai penjahat, meskipun bertahun kemudian setelah kejahatan itu dilakukan atau bahkan berpuluh tahun kemudian setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Sementara itu konstruksi sosial itu sendiri bukanlah suatu hal yang bersifat terus menerus, dalam arti ia sangat tergantung pada masyarakat yang mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan. Dengan demikian orang-orang tertentu dan perbuatan tertentu pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan, namun pada waktu lainnya ia tidak lagi

⁴⁸⁾ I.S. Susanto ; *Op.Cit.*, halaman : 37.

⁴⁹⁾ Salah satu dalil dari Richard Quinney mengenai realitas kejahatan adalah: "kejahatan adalah batasan perilaku manusia yang diciptakan oleh penguasa dalam suatu masyarakat yang diorganisasikan secara politis", R. Quinner *The Social Reality of Crime*, Boston : Little, Brown & Corp, 1970). halaman : 15-24.

memenuhi batasan tersebut.

Inilah hakikat dari *labelling*, atau proses stigmatisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang merupakan hasil konstruksi sosial, di mana sering kali lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat baik bagi pelaku kejahatan (dan keluarganya) maupun bagi usaha pembinaan pelaku kejahatan.

Sehubungan dengan perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan anak, maka yang pertama kali harus diperhatikan adalah bagaimana usaha untuk menjauhkan anak dari kondisi *labelling* tersebut. Karena pada umumnya kondisi kejiwaan anak masih belum mantap, sehingga sering kali ia masih belum bisa bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Jadi apabila ia harus menanggung beban stigma, maka akan berdampak pada perkembangan jiwanya.

Dalam kaitannya dengan menjauhkan anak dari stigma tersebut, maka hak-hak anak dalam peradilan pidana haruslah dijamin dan dilindungi sejak saat sebelum sidang peradilan, pada saat sidang peradilan maupun sesudah sidang peradilan, baik dalam kedudukannya sebagai saksi, korban maupun sebagai terdakwa.⁵⁰⁾

Sehubungan dengan hal itu, maka ada beberapa hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan yang perlu

⁵⁰⁾ Hal ini dikemukakan dalam lokakarya Nasional : Perlindungan Anak dalam Masyarakat serta Pelaksanaannya dalam Sistem Peradilan Anak. tahun 1995, halaman : 2

diperhatikan dan diperjanjikan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu antara lain :

1. Sebelum Persidangan

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transpor, penyuluhan dari yang berwajib).

2. Selama persidangan berhak untuk mendapatkan :

1. Penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
2. Pendamping, penasehat selama persidangan;
3. Fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transpor, perawatan kesehatan);
4. Perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).

3. Setelah Persidangan

Sebagai pelaku berhak mendapatkan :

1. Pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai Pemasyarakatan.⁵¹⁾

⁵¹⁾Ide pemasyarakatan tersebut dituangkan oleh Sahardjo. dalam bentuk 10 Prinsip Bimbingan dan Pemidanaan di Indonesia, sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat (ditinjau dari segi hukum yaitu terpidana diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara;

2. Perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
3. Kesempatan tetap berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.⁵²⁾

Pada dasarnya kegiatan perlindungan (hak-hak) anak merupakan suatu kegiatan hukum yang membawa akibat hukum, sehingga diperlukan adanya jaminan hukum bagi kegiatan tersebut.

-
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan;
 4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke lembaga pemasyarakatan;
 5. Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak, ia harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat itu;
 6. Pekerjaan yang diberikan kepada si terpidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau kepentingan negara sewaktu saja, tetapi harus satu dengan pekerjaan masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional;
 7. bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;
 8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan kepada harapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia;
 9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak;
 10. Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sukar untuk disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan.

⁵²⁾ Arie Gosita, dkk. : **Hukum dan Hak-hak Anak**. Jakarta : CV Rajawali Tahun 1986, halaman : 50.

Jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak-hak anak itulah yang dinamakan sebagai perlindungan hukum bagi hak-hak anak. Sehingga masalah perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari masalah perlindungan hukum terhadap anak yang telah memperoleh perlakuan diluar kesewenangan dan berkaitan dengan hak anak sebagai subyek hukum.

Pembahasan mengenai perlunya perlindungan hukum bagi anak, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai fungsi hukum dan bekerjanya hukum itu sendiri di dalam masyarakat **Satjipto Rahardjo**, mengemukakan dua fungsi hukum, yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana rekayasa sosial.⁵³⁾

Dengan dirumuskan hak-hak secara tegas di dalam aturan hukum, akan memberikan rambu-rambu pada setiap anggota masyarakat (termasuk aparat penegak hukum) untuk berbuat sesuai dengan apa yang digariskan peraturan tersebut. Dengan kata lain, aturan hukum yang menjamin dilaksanakannya hak-hak anak menjadi sarana kontrol sosial bagi masyarakat. Di samping itu aturan-aturan hukum tersebut diharapkan bisa dipergunakan

⁵³⁾Hukum sebagai sarana kontrol sosial tidak lain adalah suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Sementara itu fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial menunjukkan makna sebagai suatu penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-ditakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. **Satjipto Rahardjo** untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. **Satjipto Rahardjo: Hukum dan Perubahan Sosial**, Bandung : Alumni, 1983, halaman : 127 dan 146.

sebagai sarana rekayasa sosial untuk lebih memperhatikan kepentingan anak.

Dalam memandang keberadaan peraturan perundangan hendaknya dilihat secara lebih kritis, yaitu diarahkan pada usaha-usaha untuk mempelajari proses-proses. Maksudnya hukum tidak semata-mata dilihat secara yuridis, tetapi juga dilihat dari sudut pandang sosiologi, filosofi⁵⁴⁾, dan kriminologi. Secara kriminologis, suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya mengandung ancaman atau bahaya bagi kemungkinan timbulnya suatu kejahatan.

Karena dunia kejahatan merupakan suatu proses sosial atau sebagai hasil konstruksi sosial, maka perlu dipelajari proses-proses kriminalisasi (dalam arti luas), yaitu mempelajari kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, hankam dan struktur-struktur yang ada dalam mempengaruhi lahirnya undang-undang maupun dalam bekerjanya hukum, termasuk di dalamnya mempelajari hubungan interaksi di antara subyek-subyek yang menghasilkan kejahatan seperti pelanggar, korban, masyarakat dan penegak hukum.

⁵⁴⁾Hukum berlaku secara yuridis, yaitu apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi. Hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Hukum berlaku secara filosofis berarti hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Soerjono Soekanto : **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1989. halaman : 56 - 57.

Dengan demikian dari sudut studi kriminologi akan mencakup studi mengenai (bekerjanya) lembaga-lembaga yang menciptakan, menafsirkan dan menjalankan perundang-undangan/hukum, atau lebih konkretnya, membahas proses kontruksi sosial tentang kejahatan, yakni proses sosial mengenai terbentuknya pengetahuan dan persepsi masyarakat, realitas sosial tentang kejahatan serta pengaruh yang ditimbulkan.⁵⁵⁾ Sahetapy, mengingatkan bahwa perumusan perundangan-undangan yang kurang baik akan menyebabkan timbulnya kejahatan.⁵⁶⁾

Kriminologi kritis yang menekankan arti pentingnya suatu proses, melihat hukum sebagai suatu proses yaitu bagaimana proses suatu undang-undang itu disusun dan dijalankan.⁵⁷⁾

C. SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI SISTEM INTERGRALISTIK

Proses peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat sistemik. Yaitu suatu kesatuan usaha yang terdiri bagian-bagian yang

⁵⁵⁾ I.S. Susanto. Pokok-pokok Pikiran Kriminologi Indonesia, Seminar Kriminologi VII, hal. 7, Semarang, 1994.

⁵⁶⁾ Diinginkan juga bahwa, pelaksanaan yang tidak konsekuen dari undang-undang, bahkan sikap dan tindak tanduk dari penegak hukum dapat pula merupakan rangsangan atau dorongan atau "sebab musabab" kejahatan. Sahetapy : Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Bandung: Alumni, 1982, halaman 282.

⁵⁷⁾ I.S. Susanto : Aliran Pemikiran Dalam Kriminolog Dan Pengaruhnya Terhadap Orientasi Studi Kejahatan, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang 1993, halaman : 10.

berkaitan (interrelated) satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan, dalam suatu lingkungan yang kompleks.⁵⁸⁾

Tatang M Amirin⁵⁹⁾, menjelaskan secara panjang lebar mengenai ciri-ciri sistem, dimana ciri-ciri tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, dijelaskan bahwa setiap sistem di samping mempunyai tujuan yang hendak dicapai juga mempunyai batas yang memisahkan dari lingkungannya. Sekalipun demikian batas tersebut bersifat terbuka, dalam arti tetap berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem terdiri atas beberapa sub sistem, yang biasa disebut bagian atau komponen yang merupakan satu kesatuan utuh (bulat) dan terpadu (Wholism). Dalam suatu sistem terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan antara sub sistem yang satu dengan sub sistem lainnya maupun antara sistem itu sendiri dengan lingkungannya. Setiap sub sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi, demikian pula proses ini juga dilakukan oleh sistem secara lebih luas. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan tersedianya umpan balik, oleh sebab itu sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan

⁵⁸⁾Wagiono Ismail : Pendekatan Sistem dalam Management Organisasi. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 1984. halaman : 5.

⁵⁹⁾Tatang M Amirin : Pokok-Pokok Teori Sistem, Jakarta : CV Rajawali: 1984. halaman : 23 - 24.

menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara otomatis.

Suatu sistem bersifat dinamis dan bergerak ke arah pencapaian tujuan, demikian ditegaskan oleh Wagiono Ismail. Secara umum tujuan ini dapat digambarkan sebagai penciptaan nilai-nilai, sikap menghasilkan keluaran (output) yang bernilai lebih tinggi dari pada kombinasi berbagai masukan (input) yang dipergunakan. Orientasi pencapaian tujuan inilah yang memberi sifat dinamis suatu sistem memberi ciri perubahan yang terus menerus dalam suatu usaha mencapai tujuan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem sebagai satu kesatuan keseluruhan yang bulat bukanlah sekedar kumpulan dari bagian-bagiannya. Kesatuan usaha atau sering disebut **wholism** dalam konsep sistem, mencerminkan suatu sifat dasar suatu sistem di mana hasil keseluruhan melebihi jumlah bagian-bagiannya (**synergy**). Bagaimanapun dinamika dan gerak perubahan yang terjadi, semuanya berlangsung dalam suatu kesatuan. Secara implisit kesatuan usaha ini menuntut sub optimalisasi dari tujuan bagian-bagian agar pencapaian tujuan secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan berhasil. Kebulatan keseluruhan (**wholism**) juga menekankan keterpaduan sasaran dan tujuan-tujuan yang memungkinkan berbagai bagian atau anggota sistem mengoptimalkan hasil karya sistem. Jelasnya menciptakan kemungkinan terbesar menghasilkan keluaran yang sejalan (konsisten) dengan tujuan atau sasaran sistem. Dengan

ini tersirat atau terkandung adanya keharusan melebihdahulukan kepentingan sistem sebagai keseluruhan dibandingkan kepentingan khusus bagian atau anggota.

Saling ketergantungan (*interrelated*) dari bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan sistematis dan serasi merupakan aspek yang penting dari setiap sistem. Di dalam sistem dikenal konsep-konsep sub-sistem dan supra sistem, menggambarkan lingkungan di mana sistem tertentu menjadi bagian dari padanya.

Sebagai suatu sistem penegakan hukum, SPP juga tidak lepas dari ciri dan sifat-sifat sistem pada umumnya. SPP bertugas melindungi masyarakat, yang tidak lepas dari sifat hakikatnya sebagai lembaga yang sebenarnya akan mengurangi kebebasan seseorang (pelaku kejahatan) dalam rangka memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Lembaga penegak hukum pada dasarnya adalah suatu lembaga sosial yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk melakukan tugas perlindungan masyarakat, dan didalam bekerjanya sangat dekat dengan sifat kekerasan. Sehingga apabila tidak diberi rambu-rambu secara tegas dan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, maka akan menyebabkan lembaga tersebut dengan mudah bertindak sewenang-wenang sesuai dengan kehendak sendiri. Dalam berbagai studi empiris mengenai lembaga penegak hukum (bekerjanya SPP) dapat dilihat bahwa banyak faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi bekerjanya SPP tersebut.

D. SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI ORGANISASI BIROKRASI

Blumerg⁶⁰⁾, misalnya melihat masing-masing lembaga yang terkait dalam SPP tidak lain adalah suatu organisasi birokrasi, yang mempunyai ideologi, struktur, personel maupun peraturan sendiri yang seringkali tidak berjalan seiring dengan ideologi, struktur, personel, peraturan dari sub sistem yang lebih besar, dalam hal ini adalah Peradilan Pidana.

Sementara itu Muladi, mencoba melihat sisi lain dari SPP yaitu sebagai faktor kriminogen. Dikatakan bahwa SPP merupakan bentuk suatu sistem yang unik, karena perbedaannya dengan sistem-sistem sosial lainnya terletak pada kesadarannya untuk memproduksi segala sesuatu yang sifatnya *unwelfare*, (perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda, bahkan kadang hilangnya nyawa orang) dalam skala besar, guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare*, (rehabilitasi pelaku kejahatan, pengendalian dan kesejahteraan sosial).⁶¹⁾

Utrecht⁶²⁾, juga menggambarkan adanya kondisi paradoksial dalam penjatuhan hukuman sebagaimana Muladi, menggambarkan adanya *welfare*, dan *unwelfare*,

⁶⁰⁾Blumerg : *Criminal Justice System*, Chicago. Quangdrale Books. 1970. halaman : 5.

⁶¹⁾Muladi : *Sistem Peradilan Sebagai Faktor Kriminogen*, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang 1988, halaman : 1.

⁶²⁾Gerson Bawengan, 1973, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Jakarta Pradnya Paramita, hal. 59-60.

pada SPP, sebagai berikut:

Pemerintah Negara harus menjamin *kemerdekaan* individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi kadang-kadang sebaliknya, Pemerintah Negara menjatuhkan hukuman, dan karena menjatuhkan hukuman itu maka pribadi manusia tersebut oleh Pemerintah Negara sendiri diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada satu pihak Pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap siapapun juga, sedangkan pada pihak lain Pemerintah Negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu. Kondisi ini oleh **Franz von List** digambarkan sebagai melindungi hak, kepentingan dan sebagainya dengan menyerang, memperkosa hak, kepentingan, dan sebagainya.

Sehubungan dengan sifatnya yang unik itu, maka perlu ada seperangkat aturan main yang harus diindahkan oleh segenap aparat penegak hukum yang merupakan bagian dari SPP dalam menjalankan tugasnya.⁶³⁾

SPP hendaknya dilihat dalam konteks baik sebagai *Physical System* dalam arti seperangkat element yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *Abstract System* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan teratur, yang satu sama lain berada dalam ketergantungan⁶⁴⁾. Sehingga SPP akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana

⁶³⁾ Namun demikian, baik kiranya diperhatikan pemikiran **Barda Nawawi Arief**, yang secara lebih khusus menyoroti perundang-undangan sebagai sub system dari SPP. Menurutnya undang-undang itu sendiri mempunyai potensi besar menjadi faktor kriminogen, yaitu apabila penyusunannya tidak secara berhati-hati.

⁶⁴⁾ Muladi dan Parada Nawawsi Arief : **teori-teori Dan Kebijakan Pidana**. Edisi Revisi, Bandung, Alumni, 1992. Lihat juga Muladi : ■ ■ OP.Cit ■ ■, halaman : 45.

substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Di samping itu dapat dilihat pula bentuknya, baik yang bersifat preventif, represif maupun kuratif.

Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub-sistem peradilan pidana yaitu lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, bahkan dapat ditambahkan Lembaga Penasehat Hukum dan Masyarakat Khusus pada Peradilan Anak, masih terkait pula di dalamnya adalah BISPA (Bimbingan dan Pengentasan Anak). Saling ketergantungan tersebut sifatnya sangat kompleks dan untuk menangani masalah yang timbul diperlukan adanya koordinasi antar faktor-faktor yang terlibat di dalamnya.

Dalam proses peradilan pidana, anak-anak juga harus berhadapan dengan lembaga penegak hukum sebagai suatu organisasi birokrasi. Sebagai suatu organisasi birokrasi, lembaga-lembaga tersebut dihadapkan pada suatu pilihan yang dilematis antara pencapaian tujuan organisasinya itu sendiri dengan pelaksanaan fungsinya sebagai pelindung hak-hak anak. Birokrasi mempunyai tujuan sendiri yang sering kali tidak sama dengan tujuan SPP yang sebenarnya. Maksudnya apa yang menjadi tujuan SPP akan diterjemahkan sendiri diarahkan untuk sesuai dengan tujuan dari organisasi birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini Sudarto, menginginkan bahwa citra kesatuan proses dalam sistem penyelenggaraan hukum

pidana itu (peradilan pidana-pen.) harus merupakan benang sutera yang menelusuri segala fase dari pemeriksaan perkara pidana sejak awal pemeriksaan pendahuluan, ialah penyidikan, sampai akhir proses itu, ialah pelaksanaan pemidanaan, yang bahkan sesudah selesainya perjalanan pidana oleh nara pidana.⁶⁵⁾

Untuk memahami hakikat peradilan pidana anak sebagai suatu proses, maka kiranya perlu diperhatikan adanya ajaran kriminologi kritis, yang menekankan arti pentingnya suatu proses. Ajaran ini melihat hukum sebagai suatu proses yaitu bagaimana proses suatu undang-undang disusun dan dijalankan. Adapun alasan yang mendasari dipergunakannya telaah kriminologi kritis ini dalam memahami bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana secara umum adalah sebagai berikut:

Perkembangan masyarakat modern yang cepat telah dan akan menghasilkan pergeseran-pergeseran dan perubahan kepentingan, nilai-nilai dan struktur yang akan berpengaruh terhadap sosok kejahatan. Oleh karena perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat modern terutama hasil buatan manusia/masyarakat atau sebagai konstruksi sosial, maka juga tindakan-tindakan manusia/masyarakat yang berupa reaksi yang juga merupakan bagian dari proses konstruksi sosial, penting untuk diungkapkan sehubungan dengan perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian studi tentang kondisi-kondisi yang mempengaruhi perilaku (anggota masyarakat dan penegak hukum dalam proses bekerjanya hukum, termasuk juga dalam proses pembuatan undang-undang sangat bermanfaat untuk dapat memahami fenomena kejahatan dengan lebih baik.

⁶⁵⁾ Sudarto : Uraian Pokok-pokok Permasalahan dalam Seminar Kriminologi ke-IV. Semarang : Fakultas Hukum UNDIP. 1984, halaman : 14.

Salah satu ciri utama hukum adalah sifatnya yang terbuka, artinya hukum tidak bekerja melalui kerahasiaan atau ketertutupan, sehingga studi mengenai proses penegakkan hukum merupakan konkretisasi dari negara hukum, khususnya dalam bidang kejahatan. Dengan demikian dapat dikaji seberapa jauh asas-asas hukum seperti persamaan dihadapan hukum, perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan korban serta masyarakat, dapat sampai di tangan atau dinikmati oleh anggota masyarakat.

Studi tentang proses bekerjanya hukum dapat mewujudkan hambatan-hambatan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menegakkan hukum, sehingga hal ini akan memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha perbaikan dalam bidang penegakkan hukum (pidana) serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Studi proses (sosiologos) mengenai perundang-undangan, akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Misalnya dengan menunjukkan tujuan undang-undang seperti adanya tujuan dan kepentingan yang tersembunyi di balik perundang-undangan tertentu justru dapat menghalang-halangi tercapainya tujuan masyarakat adil makmur.⁶⁶⁾

Dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana terhadap anak, maka apabila tidak berhati-hati dalam penanganannya justru akan menimbulkan akibat yang sebaliknya dengan tujuan peradilan pidana itu sendiri, yaitu sebagai suatu sistem peradilan anak adalah suatu bagian dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak di samping untuk melindungi kepentingan masyarakat. Makna utama dari rumusan tersebut adalah sistem peradilan anak adalah suatu forum di mana hak-hak dan kepentingan anak harus dilindungi dalam rangka mewujudkan kesejahteraannya tersebut. Di dalam peradilan ini anak-anak belajar tentang keadilan dan keluhuran hukum.

⁶⁶⁾ I.S. Susanto, *Op.Cit*, halaman 8.

Menurut Nursyahbani Katjasungkana, pengertian keadilan di sini hendaknya dipahami sebagai perlindungan terhadap hak-hak mereka yang tentu saja harus disesuaikan dengan kemampuan dan usia mereka atau sebagai suatu kondisi dimana setiap orang (anak) dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang (yang mengembangkan manusia seutuhnya yang berbudi luhur)⁶⁷). Hal ini berarti bahwa tuntutan-tuntutan terhadap diri anak harus disesuaikan dengan kemampuannya pada usia tertentu. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut dibutuhkan suatu kondisi tertentu, yaitu:

Adanya tatanan ekonomi dan sosial yang mampu mendistribusikan kemakmuran ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat.

Adanya iklim budaya (*culture climate*) yang memberikan suasana kemerdekaan dan kebebasan bagi perkembangan si anak.

Adanya semangat kebersamaan yang mewujudkan dalam bentuk ikatan solidaritas sosial yang kuat di antara anggota-anggota masyarakat.

Demikian bisa dipahami bahwa SPP adalah suatu sistem lembaga birokrasi, yang dalam bekerjanya tidak bisa saling berdiri sendiri. Ada interaksi dan saling ketergantungan di dalam organisasi SPP, untuk menuju pada suatu tujuan bersama SPP itu sendiri, sementara

⁶⁷) Nursyahbani Katjasungkana : Keadilan Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Anak, Suatu Pendekatan Kriminologis, makalah dalam Lokakarya Sosial Perlindungan Anak dalam Masyarakat serta Pelaksanannya dalam System Peradilan Anak, Jakarta tanggal 12 Juni halaman 2.

pada waktu yang bersamaan juga ada tujuan dari masing-masing sub sistem (instansi) yang juga harus dicapai. Pencapaian tujuan dari sub sistem tersebut justru cenderung mengedepan dibandingkan dengan semangat untuk mencapai tujuan organisasi SPP secara umum.

Sebagai organisasi birokrasi, maka SPP tidak bisa mengelak dari ciri-ciri yang melekat pada organisasi birokrasi. Weber⁶⁸⁾, mengemukakan adanya beberapa ciri ideal struktur birokrasi antara lain :

Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi. Adanya pembagian tugas secara tegas ini memungkinkan untuk mempekerjakan harya ahli-ahli dengan kekhususan tertentu pada jabatan tertentu dan membuat mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing secara efektif.

Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip **Hierarchi**, yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi. Setiap pejabat yang berbeda dalam hierarki administrasi dipercayai oleh atasannya untuk bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya atau dirinya sendiri. Agar dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bawahannya, ia diberi wewenang untuk mengatur mereka, mempunyai hak untuk memerintah dan bawahannya harus menjalankan perintahnya tersebut.

Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan abstrak yang konsisten dan mencakup juga aturan-aturan ini dalam kasus-kasus tertentu.

Pejabat yang ideal melaksanakan tugasnya dengan semangat **sinetra et sudio**, (formal dan tidak bersifat pribadi)⁶⁹⁾

⁶⁸⁾Peter M Blau dan Marshall W Meyer : Op.Cit., halaman 27-30.

⁶⁹⁾Dikemukakan oleh Weber, bahwa semakin besar dehumanisasi dalam lembaga birokrasi, maka semakin baik pula bekerjanya birokrasi itu. Blumberg : Op.Cit, halaman : 46

Sementara itu secara lebih realistis, E. Strauss⁷⁰⁾, melihat bahwa birokrasi lebih banyak muncul ketidaksempurnaan dalam struktur dan fungsionalisasi organisasi-oraganisasi besar, Gejala-gejala birokrasi olehnya ditunjukkan sebagai berikut : terlalu percaya pada preseden, kurang inisiatif, penundaan (lamban dalam berbagai urusan, terlalu banyak formalitas, duplikasi usaha dan departemenalisme.

Dalam praktik sehari-hari, birokrasi lebih banyak muncul dalam wujudnya yang tidak ideal, sehingga timbul kesan bahwa lembaga birokrasi, semacam SPP, bekerja secara lamban, bertele-tele dan penuh keruwetan. Orang cenderung memotong rantai birokrasi yang sebenarnya tindakan itu secara ideal justru memperlambat pekerjaan administrasi (inefisiensi), tetapi dalam kenyataannya yang demikian itu membawa kemudahan dan mempercepat suatu proses. Pemotongan rantai birokrasi itu sendiri hakikatnya tidak lain adalah:

Mempercepat pencapaian tujuan pribadi atau kelompok sebagai bagian dari suatu kelompok besar lainnya.

Dengan kondisi yang demikian, yaitu di samping sebagai suatu sistem juga sebagai suatu organisasi birokrasi, dalam kaitannya dengan peradilan anak, unsur dalam SPP diharapkan bisa memainkan peranannya dalam

⁷⁰⁾Martin Albrow : **Birokrasi**, Cetakan kedua, alih bahasa oleh M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 1989, halaman : 85.

melindungi hak anak secara proporsional sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Dalam kondisi adanya prioritas mensejahterakan anak sebagai pencapaian tujuan dalam peradilan pidana, menjadikan tidak lagi ada kepentingan atau orientasi lainnya dari aparat penegak hukum dalam melindungi hak anak, selain mensejahterakan anak. Sementara itu sebagai suatu organisasi tersendiri, mereka juga dihadapkan pada pencapaian tujuan organisasinya itu, yang sering kali tuntutan organisasi sedemikian tinggi, sehingga cenderung mengesampingkan tujuan mensejahterakan anak.

Ace
Sinto
28/5-27

BAB III

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. SIKAP APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Hakekat perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia tidak bisa lepas begitu saja dari kebijakan pembangunan manusia seutuhnya, sebagaimana digariskan dalam GBHN. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak bisa menjalankan hak dan kewajibannya. Pada dasarnya perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian dalam keadaan apapun, anak harus tetap memperoleh perlindungan akan hak-haknya sebagai anak, termasuk juga bagi anak yang terlibat dalam tindak kriminal.

Bagi anak yang terlibat dalam masalah kriminal tetap harus memperoleh hak-hak mereka sesuai dengan kondisi fisik dan (terutama) mental mereka yang masih belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang dilakukannya.

Pada saat ini, Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana (baca : undang-undang pengadilan anak Nomor 3 tahun 1997), namun permasalahannya apakah

perilaku aparat penegak hukum dapat melaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan jiwa dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Peradilan pidana pada dasarnya tidak berbeda dengan lembaga birokrasi pada umumnya, dimana ada keterkaitan antara sub-sub sistem didalamnya untuk mencapai tujuan bersama serta adanya kepentingan masing-masing sub sistem, disamping tidak bisa dilepaskan dari kepentingan masing-masing individu pelakunya. Jadi dalam melihat bekerjanya SPP hendaknya disadari terlebih dulu bahwa bekerjanya SPP adalah bekerjanya suatu lembaga birokrasi.

1. PERLAKUAN POLISI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Untuk melihat bagaimana perilaku polisi dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, kiranya terlebih dahulu perlu dipahami siapa dan bagaimana polisi itu sendiri, khususnya polisi sebagai penyidik. Hal ini perlu dilakukan karena dengan pemahaman tersebut bisa dilihat ada ciri lembaga birokrasi terlihat pada pekerjaan penyidik oleh polisi. Di samping itu juga bisa dilihat adanya ciri-ciri menonjol pada diri kepolisian sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana. Jadi dalam melaksanakan pekerjaannya, polisi tidak bisa lepas begitu saja dari aturan dan kepentingan sistem.

Pelaksanaan penyidikan oleh polisi tidak bisa dilepaskan dari U.U. No. 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang memberikan wewenang antara lain untuk melaksanakan tugas dalam bidang peradilan, yaitu mengadakan penyelidikan atas kejadian dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana⁷¹⁾, dan lain-lain peraturan negara (Pasal 2(2)).

⁷¹⁾ Dalam Pasal 7 UU No.8/1981 (KUHP) dirinci tentang kewenangan polisi sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang, tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang peradilan⁷²⁾, tersebut, berdasarkan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur kepolisian Negara R.I. tahun 1984, POLRI menyelenggarakan berbagai fungsi utama kepolisian⁷³⁾, antara lain fungsi Reserse Kepolisian. Adapun fungsi reserse kepolisian adalah menyelenggarakan penyidikan tindak pidana serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai sipil berdasarkan undang-undang, hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menyelenggarakan upaya

72) Di dalam organisasi kepolisian ada 2 (dua) macam kepolisian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu : 1. Polisi administratif, polisi keamanan atau polisi jalanan (lalu lintas dan sebagainya) yang disebut juga polisi wajib, polisi berseragam. Tugas polisi umumnya memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur baik dari pusat maupun daerah dan menjaga ketertiban. 2. Polisi keadilan, polisi rahasia atar reserse. Tugas umumnya menegakan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya diproses di pengadilan, oleh karena sifat tugasnya itu polisi ini disebut peradilan (*law police fudiciaire*). Mengingat tugasnya yang bersifat represif yang dilakukannya dengan rahasia dengan menggunakan teknik-teknik reserse seperti pengamatan/observasi maka polisi ini disebut polisi yang tidak beruniform. Karena di dalam tugasnya selalu mengenakan pakaian preman. Di Indonesia polisi ini disebut polisi reserse. M. Faal : **Penyaringan Perkara Pidana** oleh Polisi, Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan pertama, tahun 1991, halaman : 43-44.

73) Fungsi utama lainnya dari kepolisian adalah fungsi intelejen dan keamanan kepolisian (intelpam); fungsi kesamaptaan kepolisian (satpol); fungsi bimbingan masyarakat (binmas) dan fungsi selaku kekuatan sosial sebagai dinamisator dan stabilisator.

represif kepolisian lainnya. Satserse adalah unsur pelaksana pada tingkat Poltabes yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Reserse Kepolisian yang bersifat terpusat pada tingkat resot/antar Polsek termasuk memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan fungsi tersebut pada tingkat Polsekta.

Satserse Polda terdiri atas Urusan Pembinaan Operasi (UrbinoP) dan Unit . Dari dua bagian tersebut, perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai bagian kedua, yaitu yang dinamakan unit. Unit adalah unsur pelaksanaan pada Satserse Polresta yang bertugas melaksanakan secara bulat fungsi penyidikan terhadap tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dan kriminalistik lapangan.

Unit dipimpin oleh kepala Unit disingkat Kanit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kasat serse Poltabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasat Serse Polresta. Pembagian tugas akhir Unit didasarkan atas obyek/pengelompokan jenis tindak pidana yang dititik beratkan pada tindak pidana umum. Jumlah unit yang ada saat ini adalah sejumlah 7 (tujuh) buah, yaitu unit reserse ekonomi (ressek), reserse narkotik (restik), reserse mobil (resmob), kriminal umum (unit krimum), kriminal khusus (Krimsus), *crime squad*, dan korwas PPNS.

Demikian secara rinci bisa dilihat fungsi, struktur organisasi kerja kepolisian dan peranannya di bidang penegakan hukum. Dari tujuh unit dibawah oleh Kanit dalam lembaga serse, ternyata tidak ditemukan adanya unit yang secara khusus diserahi tugas peradilan bagi anak.

Sampai saat ini memang belum ada polisi yang secara khusus menangani perkara yang pelakunya adalah anak-anak. Oleh sebab itu selama ini penanganannya diserahkan pada masing-masing unit sesuai dengan jenis perkara yang bersangkutan. Dengan demikian, serse pada masing-masing unit tinggal melaksanakan tugas penyidikan tanpa ada kewenangan untuk menolak perkara yang masuk padanya, sekalipun menurut mereka perkara itu masih bisa diselesaikan oleh satbinmas. Kenyataan ini menjadikan polisi berorientasi pada jenis perkara yang masuk, bukan pada siapa pelakunya. Itulah sebabnya sejak awal pemeriksaan di kepolisian, sebenarnya anak sudah menjadi "korban" dari birokrasi kepolisian.

a. PERLAKUAN POLISI TERHADAP ANAK DALAM PENYIDIKAN

Untuk mengetahui bagaimana perilaku polisi dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku kejahatan yang masih anak-anak, bisa dilihat dari temuan di

lapangan⁷⁴⁾, sebagai berikut :

Perlakuan istimewa yang diterima oleh anak-anak pelaku kejahatan tidak banyak berbeda dengan apa yang diterima oleh pelaku kejahatan dewasa. Hal ini tampak, sejak saat anak-anak pelaku kejahatan ditangkap polisi, mereka tidak secara seketika diberikan surat penangkapan, bahkan pihak keluarganya pun tidak diberitahu tentang penangkapan tersebut. Selain perlakuan yang kasar, begitu dilakukan penangkapan mereka digunduli, juga dilakukan kekerasan secara fisik (ditempeleng, atau dipukul)⁷⁵⁾.

Dari gambaran yang demikian, menarik untuk dianalisa lebih lanjut mengapa kecenderungan itu muncul. Tindakan polisi tanpa memberikan surat penangkapan sering kali dikarenakan pelaku tersebut

74) Gambaran ini setidaknya dijumpai di Polresta Yogyakarta. Untuk memperoleh gambaran mengenai perilaku polisi dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan dilakukan observasi dan wawancara dengan tersangka anak-anak maupun penyidik dan Kasat Serse Polresta Yogyakarta. Di samping itu juga dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari media massa.

75) Hal semacam ini juga ditemukan pada beberapa kasus penangkapan anak pelaku kejahatan akhir-akhir ini, dalam beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai tempat. Misalnya dalam kasus Edi Sartono di Yogyakarta yang dituduh memperkosa anak gadis (yang ternyata berdasarkan putusan hakim, tuduhan tersebut tidak terbukti), ditangkap tanpa surat penangkapan (*Kompas*, 17 Juli 1995). Atau kasus MS, seorang anak negara di LPAN Kutoarjo, yang membunuh pamannya, pada waktu ditangkap tanpa disertai surat penangkapan dan keluarganya tidak diberitahu dengan segera. Andang di Yogyakarta juga ditangkap tanpa disertai surat penangkapan (*Kompas*, 18 Juli 1995)

tertangkap tangan sehingga dianggap tidak diperlukan surat penangkapan, atau karena polisi mengalami kesulitan untuk memperoleh alamat jelas dari orang tua (keluarga) pelaku kejahatan anak. Ini sering kali disebabkan si anak itu sendiri tidak dapat menyebutkan dengan pasti alamat keluarganya. Polisi menjadi lebih lagi untuk menyampaikan surat penangkapan apabila yang dihadapi adalah anak dengan status gelandangan, atau yang mempunyai kebiasaan pindah-pindah tempat tinggal.

Bagi orang tua atau keluarga anak pelaku kejahatan yang memperoleh perlakuan demikian dari polisi, tindakan tersebut tidak dipermasalahkan. Ketidaktahuan orang tua terhadap kewajiban polisi untuk memberikan surat perintah penangkapan, menjadi alasan utama sikap orang tua yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ada kecenderungan baik orang tua maupun pelaku kejahatan anak tidak mengetahui adanya prosedur yang demikian. Demikian pula mengenai hak anak untuk didampingi oleh orang tua atau keluarga selama proses pemeriksaan kepolisian, cenderung tidak diketahui. Walaupun orang tua mengetahui hak tersebut, sering kali mereka tetap tidak bisa mendampingi anaknya di depan pemeriksaan polisi karena ketidakmampuannya untuk hadir di kantor polisi, karena berbagai alasan seperti jaraknya jauh dari tempat tinggalnya. Atau memang orang tua (pihak keluarga pelaku kejahatan anak) sudah melepaskan tanggung jawab atas perbuatan anaknya,

sehingga menyerahkan sepenuhnya pada polisi.

Sementara itu juga ada kecenderungan pada polisi tidak memberitahukan hak anak untuk didampingi orang tua. Hal ini disebabkan polisi sendiri sudah mengetahui status anak sebagai anak gelandangan atau yang ditelantarkan orang tuanya (berdasarkan atas keterangan anak), sehingga dipandang tidak efisien apabila harus memberitahukan hak anak tersebut kepada orang tuanya, yang juga tidak diketahui dimana tempat tinggalnya. Atau karena dalam pandangan polisi kehadiran orang tua dalam pemeriksaan tidak memberikan pengaruh terhadap anak. Bahkan sebenarnya justru anak itu sendiri yang tidak menghendaki didampingi oleh orang tuanya selama pemeriksaan, sehingga oleh polisi hal ini dipandang tidak perlu memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya.

Terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi pada saat penangkapan, bagi anak dirasakan sebagai suatu hal biasa. Karena dalam pandangan mereka, memang demikianlah sifat polisi itu. Mereka beranggapan, bahwa setiap polisi melakukan suatu kegiatan cenderung diikuti dengan kekerasan. Polisi adalah sesuatu yang menakutkan, tidak bersahabat. Apalagi terhadap mereka yang jelas-jelas melakukan suatu kejahatan (pelanggaran).

Bagi polisi sendiri kekerasan yang dilakukan adalah untuk mempermudah atau memperlancar pekerjaan

mereka. Apabila polisi melakukan penangkapan tanpa kekerasan, maka pelaku kejahatan anak cenderung melakukan perlawanan, sehingga menyulitkan penangkapan itu. Atau hal itu dilakukan oleh polisi sebagai upaya pencegahan untuk melindungi diri dari perbuatan kekerasan yang mungkin dilakukan oleh pelaku kejahatan anak terhadap dirinya.

Anak-anak yang ditangkap oleh polisi cenderung untuk digunduli, walaupun sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengharuskan pelaku kejahatan anak harus digunduli, tetapi hal inipun dianggap sebagai hal biasa bagi anak yang memperoleh perlakuan yang demikian. Bahkan ada anak yang langsung minta digundul begitu diungkap oleh polisi. Tindakan polisi yang melakukan penggundulan ini secara tidak langsung akan mengakibatkan stigma bagi pelaku kejahatan anak, yaitu bahwa dia telah melakukan suatu kejahatan atau pernah ditangkap oleh polisi.

b. Perlakuan Polisi Terhadap Anak Dalam Pemeriksaan

Pendahuluan

Pada tahap pemeriksaan anak-anak juga mendapat perlakuan yang kasar (ditempeleng, disulut rokok, diinjak dengan kaki meja, dipaksa makan rokok yang menyala) dan tanpa didampingi oleh penasehat hukum atau orang tua. Pemeriksaan tidak dilandasi adanya laporan dari petugas sosial terlebih dahulu, bahkan mengenai

identitas si anak itu sendiri tidak diperiksa secara seksama, hanya di dasarkan atas pengakuan anak yang sering kali juga tidak tahu persis berapa usianya, di mana tempat tinggalnya dsb. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka bersamaan dengan pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan yang sudah dewasa, dan polisi yang melakukan pemeriksaan tidak berseragam, seperti juga halnya dilakukan terhadap pelaku kejahatan dewasa.

Melihat gambaran yang demikian ini, maka dapat dianalisis sebagai berikut, bahwa perlakuan kasar yang diterima anak-anak pada saat pemeriksaan oleh polisi, menurut pelaku kejahatan anak adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang pasti dialami oleh setiap orang yang berurusan dengan polisi. Hal tersebut timbul karena di dalam benak mereka sudah timbul suatu gambaran, bahwa polisi adalah identik dengan kekerasan.

Walaupun tidak selalu kekerasan digunakan oleh polisi di dalam pemeriksaan, tetapi ada kecenderungan digunakan kekerasan untuk memperoleh suatu keterangan maupun pengakuan. Hal ini nampak pada saat sidang di pengadilan, terdakwa menolak hasil pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan), dikarenakan mereka menganggap adanya paksaan dengan cara kekerasan untuk mengakui suatu perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan.

Ketidakhadiran orang tua atau penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan disebabkan beberapa hal, antara lain memang karena polisi tidak menginformasikan

hak tersebut. Di samping juga adanya ketidakmampuan orang tua pelaku kejahatan untuk hadir atau membiayai penasehat hukum dalam pemeriksaan tersebut. Dalam pandangan polisi, pemeriksaan tersebut tidak memerlukan kehadiran orang tua atau penasehat hukum.

Pada proses pemeriksaan pendahuluan ini anak tidak diperiksa di tempat yang terpisah dengan pelaku kejahatan dewasa, karena memang pada sebagian besar kantor polisi tidak memiliki ruangan khusus dan juga polisi khusus untuk menangani anak-anak. Dengan demikian anak diperlakukan seperti pelaku kejahatan dewasa, yaitu diperiksa secara terbuka dan bersama-sama dengan pelaku dewasa, tanpa didampingi orang tua atau penasehat hukum. Hal ini sudah barang tentu menimbulkan dampak tersendiri bagi si anak. Adapun dampak tersebut adalah si anak sering tidak memahami apa yang dituduhkan kepadanya dan apa maksud pertanyaan dari polisi. Bahkan anak juga terpaksa harus mengaku begitu saja sesuai dengan kemauan polisi, terhadap perbuatan yang mungkin tidak dilakukannya, agar terhindar dari kekerasan oleh petugas pemeriksa.

Akibat buruk dari tidak adanya pendamping anak dalam pemeriksaan ini setidaknya bisa dilihat pada kasus Edi Sartono yang terpaksa melakukan onani, dihadapan petugas, setelah penis, si anak digosok

dengan obat gosok.⁷⁶⁾ Walaupun harus menerima pukulan (sabetan) dengan kabel pada bagian pahak, perut, dada dan ketiak sampai bengkak. Muka bilur-bilur karena ditabok dan kaki ditendang dengan sepatu.⁷⁷⁾

c. Perlakuan Polisi Terhadap Anak Dalam Penahanan Sementara

Penempatan mereka di tahanan sementara tidak ada pemisahan dengan pelaku dewasa (anak dijadikan satu dengan tahanan dewasa) dengan fasilitas penahanan yang seadanya. Tempat tidur dalam sel tahanan berupa beton semen yang dialasi lembaran papan, dengan kamar kecil diluar ruangan. Kepada mereka diberikan makan berupa nasi sebanyak dua kali sehari (siang dan sore), sedangkan pagi hari diberikan singkong rebus. Untuk mengisi kegiatan selama dalam penahanan sementara, anak-anak diminta untuk membantu pekerjaan membersihkan (menyapu, membersihkan meja kursi, membersihkan kamar mandi) atau membersihkan sepeda motor petugas di sekitar (lingkungan) kamar tahanan dan lingkungan ruang pemeriksaan dikantor polisi.

⁷⁶⁾ Hal ini dialami oleh Edi Sartono, yang juga dipaksa untuk memelintir tokek di hadapan petugas. *Kompas*. 17 Juli 1995, halaman X.

⁷⁷⁾ Periksa : **Perlakuan Polisi Membuat Anakku Traumatik**. suatu ungkapan orang tua Andang, dimuat dalam Majalah *Forum Keadilan*. No. 7 Tahun IV. 17 Juli 1995, halaman : 56 - 57.

Anak yang ditahan dalam tahanan sementara (oleh Polisi) juga tidak luput dari perpeloncoan oleh sesama teman satu sel bahkan perpeloncoan tersebut diperintah oleh petugas itu sendiri.⁷⁸⁾

Ditempatkannya anak dalam satu sel bersama pelaku dewasa sebenarnya mengundang bahaya tersendiri bagi anak. Disamping ada kemungkinan terpengaruh untuk berbuat lebih jahat keluar dari tahanan, ada kecenderungan anak harus melayani kebutuhan pelaku kejahatan dewasa, termasuk kebutuhan seksual.

Demikian gambaran umum mengenai perilaku polisi dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap pelaku kejahatan anak. Ada beberapa hal yang kiranya perlu dijelaskan lebih lanjut dari kecenderungan di muka. Dari penjelasan berikut, bisa dilihat mengapa polisi cenderung berbuat demikian pada anak.

Polisi adalah ujung tombak dari SPP sebagai suatu proses yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Ada karakteristik tersendiri pada lembaga kepolisian yang tidak ditemukan pada lembaga lainnya atau sub sistem lainnya dari SPP. Polisi dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus bertindak sebagai penegak hukum dan pada

⁷⁸⁾Waktu masuk dalam tahanan Polres Bantul, polisi menyuruh tujuh tahanan lain memukuli Edi Sartono. Walaupun dalam keadaan terpaksa tahanan tersebut menjalankan perintah petugas tersebut. Karena dalam pandangan mereka salah atau benar mereka tetaplah pihak yang kalah. *Kompas*, 17 Juli 1995 halaman : X

waktu yang bersamaan sebagai penjaga ketertiban masyarakat. Dalam kaitannya dengan masalah dimuka, maka titik berat dari analisis ini diarahkan pada fungsi polisi sebagai aparat penegak hukum.

Polisi adalah perwujudan dari monopoli negara untuk melakukan kekerasan, demikian dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo⁷⁹⁾. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kekerasan dan polisi adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Ciri kekerasan pada polisi sudah bisa dilihat sejak awal dari tampilan polisi itu sendiri, yaitu melalui berbagai perlengkapan yang melekat pada seorang anggota polisi, seperti pistol, pentungan dan borgol.

Ciri kekerasan ini senyatanya memang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, yang dalam menghadapi penjahat polisi dihadapkan pada dua pilihan : ditembak atau menembak. Atau sekedar dipergunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti atau memberi peringatan pada pelaku kejahatan. Namun demikian disadari atau tidak (ada kecenderungan kekerasan ini untuk mencapai tujuannya. Dalam hal pemeriksaan terhadap anak, kekerasan dipergunakan untuk menekan agar anak memberikan pengakuan atau keterangan yang dibutuhkan polisi.

⁷⁹⁾Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, halaman 101 - 109.

Kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap anak seringkali melewati batas kemanusiaan (baca : anak) seperti memaksa untuk *onani*, dengan menggunakan obat gosok, meludahi pelaku kejahatan, menempeleng, menginjak ibu jari kaki dengan kaki meja yang diduduki, atau menyulut anggota badang dengan rokok menyala. Sebenarnya tindakan-tindakan yang demikian dilakukan secara sadar oleh polisi, bahkan mereka juga menyadari sepenuhnya bahwa hal itu merupakan pelanggaran dari aturan main dalam pemeriksaan tersangka.

Pertanyaan yang timbul dari kenyataan dimuka adalah mengapa polisi melakukan perbuatan tersebut. Ada beberapa hal yang bisa menjadi sebab, yaitu sebagai pelampiasan rasa kejengkelan polisi karena si anak memang berbelit-belit. Atau sekedar iseng untuk menghilangkan kejenuhan dalam menghadapi tugas rutin atau problem keluarga, tanpa memikirkan lebih jauh akibat dari keisengannya itu. Bisa juga perbuatan itu dilakukan karena untuk memberikan penjeratan agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sering juga hal itu dilakukan untuk menunjukkan kepada si anak maupun tersangka lainnya, bahwa ia (polisi) mempunyai kekuasaan yang bisa digunakan untuk memaksa mereka berbuat apa saja.

Cara kekerasan sering kali menjadi sarana efektif yang menunjang efisiensi pekerjaan polisi. Dari kaca mata menejerial, efisiensi merupakan salah satu aspek

penting dalam bekerjanya polisi. Disamping itu rasionalitas dan universalisme juga merupakan indikator dari profesionalisme kerja polisi.

Polisi merasa memiliki kemampuan yang tinggi untuk mempertimbangkan secara tepat apakah seseorang itu salah itu benar. Polisi melihat dirinya sendiri sebagai seniman dan sebagai pimpinan dari suatu perusahaan dagang, sehingga ia bebas bereksperimen dalam pekerjaannya.⁸⁰⁾ Polisi percaya bahwa sebagai seorang spesialis dalam menghadapi kejahatan, ia mampu membedakan antara yang salah dan yang tidak bersalah, dan kebanyakan diantara mereka merasa bahwa pelaksanaan peradilan merupakan suatu pemborosan dan penghamburan uang rakyat. Oleh karena itulah polisi menghendaki adanya efisiensi yang tinggi di dalam pelaksanaan tugasnya, ia lebih mementingkan asas praduga bersalah *presumption of guilt* dari pada asas praduga tidak bersalah *presumption of innocence*⁸¹⁾

Polisi yang dihadapkan tantangan untuk bersikap tindak profesional, mau tidak mau harus bisa bertindak secara rasional, efisien dan universal dengan tetap memperhatikan kepentingan organisasinya sebagai orga-

⁸⁰⁾Jerome H Skolnick : *Justice Without Trial; law Enforcement in Demorcratic Society*, Second edition, London : John Wiley & Sons . Inc. 1966. halaman : 902.

⁸¹⁾Herbert I, Packer : *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University, 1968, halamn :

nisasi yang birokratis. Untuk itulah polisi cenderung menekankan kepada keahliannya sendiri ia melihat dirinya lebih sebagai seorang tukang atau ahli (*craftsman*) daripada sebagai seorang *legal actor*, yang bekerja secara berhati-hati sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh sebab itu ada kecenderungan pada organisasi kepolisian, di dalam bekerjanya lebih menekankan kepada keahliannya sendiri untuk diterapkan pada penjahat.⁸²⁾

Dengan mengutamakan asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) daripada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), memang cenderung memudahkan kerja polisi, karena setiap orang dipandang bersalah, sehingga polisi tinggal mencari pembuktian saja. Dalam mencari pembuktian inilah segala cara dipergunakan olehnya. Apalagi dengan kekuasaan, kewenangan dan kekerasan⁸³⁾, yang melekat pada diri polisi, maka "godaan" untuk menyalahgunakan ketiga hal tersebut menjadi semakin besar.

⁸²⁾Kartini Sekartadji : **Ambivalensi Dalam Tugas Polisi, Suatu Analisis Yuridis Sosiologis**, artikel dalam Majalah *Hukum dan Pembangunan*. No. 6 Tahun XXIII Desember 1993, No. 0125-9687, halaman : 552.

⁸³⁾Penggunaan kekerasan sering kali disebut sebagai inti dari pekerjaan polisi, disamping adanya kekuasaan dan kewenangan. Pada dasarnya sebenarnya dalam menjalankan pekerjaannya, tindak kekerasan bisa dibenarkan sejauh tindakan itu dilakukan dalam kondisi yang digambarkan oleh Reiss. Sebagai berikut:

Dilihat dari segi peraturan, karena tidak ada pengawasan serta secara praktis juga lemahnya sanksi atas pelanggaran aturan tersebut, polisi menjadi tidak berfikir dua kali sebelum melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu dari kaca mata birokrasi, polisi dihadapkan pada tuntutan pemenuhan target penyelesaian perkara oleh organisasinya. Padahal pada waktu yang bersamaan ia juga harus memenuhi tuntutan masyarakat untuk melindungi korban dan perilaku, serta tuntutan dari diri sendiri (keluarga).

Disamping dilengkapi dengan kekuasaan, wewenang dan kekerasan, polisi dilengkapi juga dengan diskresi, yaitu kebebasan untuk mengambil keputusan yang bersifat individual, bagaimana dan kapan mereka memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan tugasnya.

-
1. apabila seorang polisi menyerang seseorang secara fisik dan kemudian gagal untuk melakukan penahanan, penggunaan kekerasan yang wajar diikuti oleh penahanan ;
 2. apabila seorang warga negara yang pada waktu ditahan tidak melakukan perlawanan, baik dengan perbuatan maupun kata-kata, kekerasan hanya digunakan jika diperlukan untuk melakukan penahanan.
 3. apabila seorang polisi sekalipun waktu itu ada perlawanan terhadap usaha penahanan masih bisa dengan mudah diatasi dengan cara-cara lain:
 4. apabila sejumlah banyak polisi ada di situ dan bisa membantu dengan cara menggiring warga negara bersangkutan ke kantor tempat penahanan atau kamar-kamar interogasi;
 5. apabila seorang yang ditahan diborgol dan tidak berusaha untuk lari atau melakukan perlawanan atau dengan kekerasan;
 6. apabila warga negara melawan tetapi penggunaan kekerasan masih saja berlangsung sekalipun orang itu sudah ditundukkan. Satjipto Rahardjo : *Op.Cit.*, halaman : 103.

Tindakan polisi dalam penyidikan merupakan salah satu tindakan represif di dalam menanggulangi kejahatan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik, maka apabila polisi mengetahui dan mendapatkan laporan tentang adanya kejahatan atau pelanggaran, tindakan polisi adalah melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Setelah selesai melakukan penyidikan kemudian polisi akan meneruskan perkaranya ke tingkat kejaksaan, dan dilanjutkan ke tingkat pengadilan untuk pemeriksaan perkara serta mendapatkan putusan hakim. Akan tetapi dalam hal pelaku tindak pidananya adalah anak-anak, maka tidaklah selalu demikian.

Polri didalam prakteknya tidak selalu meneruskan perkaranya ke kejaksaan meskipun tersangkanya ada dan tidak ada keragu-raguan tentang pelanggaran yang ia lakukan. Dengan demikian, maka sejak dalam fase dikepolisian sudah diperhatikan orang yang melakukan kejahatan beserta sifat dari kejahatan itu.⁸⁴⁾

Untuk meneruskan atau tidak meneruskan polisi melihat dan memperhatikan pelaku kejahatan/pelanggaran serta sifat dari pelanggaran atau kejahatannya.

Di Polda Yogyakarta mengenai kriteria anak sebagai pelaku kejahatan dan prosedur pemeriksaan yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

⁸⁴⁾ Sudarto : *Op.Cit*, halaman : 119.

- a. Masalah kriteria anak yang digunakan sebagai pedoman polisi adalah ketentuan dalam Pasal 45 KUHP, yaitu anak yang berumur tidak lebih dari enam belas tahun. Ketentuan dalam pasal 45 ini tidak mengatur batas umur anak, sehingga tidak menutup kemungkinan anak yang berusia masing sangat mudan (misalnya 12 ahun) melakukan tindak pidana akan diproses penyidikannya untuk diajukan ke polres peradilan pidana.
- b. Mengenai perkara kecil dan tidak membahayakan masyarakat sedangkan pelakunya masih anak-anak, apabila polisi memandang tidak perlu diteruskan, maka perkaranya tidak akan diteruskan ke kejaksanaan.
- c. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak-anak dipandang berat dan membahayakan masyarakat, polisi akan meneruskan perkaranya dalam proses peradilan pidana.
- d. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada dua alternatif cara penyelesaiannya, yaitu:
 - (1) Apabila sifat dari tindakan pidana tidak merupakan kenakalan bisa dan tidak mengenai perkara-perkara kecil, sehingga dianggap polisi sebagai perbuatan yang membahayakan masyarakat, maka perkaranya akan diteruskan ke kejaksanaan.
 - (2) Apabila sifat dari tindak pidananya merupakan kenakalan biasa, maka perkaranya tidak diteruskan ke kejaksanaan tetapi ditangani oleh bagian bimas (Bimbingan Kemasyarakatan) di kepolisian yang bersangkutan.

Dengan demikian sebenarnya di Porlresta Yogyakarta tidak ada kriteria khusus mengenai kejahatan/sifat kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai kenakalan dan mana yang masuk kriteria sebagai kejahatan serta juga tidak jelas tentang pelaku yang bagaimana yang mendapat perlakuan khusus dari Polisi. Namun apabila dilihat dari praktik sehari-hari dapat diliat bahwa anak dari orang tua yang mampu dan berasal dari keluarga baik-baik akan lebih memperoleh perhatian dari polisi. Terhadap anak-anak yang demikian ini

perkaranya cenderung tidak diteruskan ke kejaksaan, penyelesaiannya cukup sampai tingkat kepolisian.

Kewenangan polisi untuk tidak meneruskan perkara pidana anak karena sifat tindak pidananya dianggap merupakan kenakalan biasa atau juga karena alasan lain merupakan wujud penerapan diskresi. Diskresi merupakan kewenangan polisi yang melekat pada jabatannya di dalam melaksanakan tugas yang berupa mengesampingkan perkara untuk tidak meneruskan ke dalam proses penyidikan. Dengan demikian diskresi adalah kebijaksanaan bertindak petugas kepolisian dalam menghadapi masalah-masalah atas dasar pertimbangan individual dan kesuistis. Apabila polisi menganggap perlu meneruskan perkaranya ke kejaksaan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap penyerahan berkas perkara dan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Mengenai masalah *deskresi*, ini, lebih lanjut I.S. Susanto⁸⁵⁾, menjelaskan secara panjang lebar. Terhadap pelanggaran hukum yang ditemuinya, polisi dapat memberi tegoran, memanggil, mendamaikan, mengusut, menahan atau bahkan tidak mengambil tindakan sama sekali atau membiarkan. Dengan demikian polisi memiliki keleluasaan

⁸⁵⁾ I.S. Susanto : *Pemahaman Kritis terhadap Realitas Sosial*, artikel dalam Majalah Fakultas Hukum UNDIP *Masalah-masalah Hukum* No. 9 - 992. ISSN No. 0126-1389, halaman : 17.

untuk bertindak atau tidak, begitu pula dalam bertindak dia memiliki keleluasaan dalam memilih tindakan yang akan diambil. Namun adalah keliru apabila kita menyamakan diskresi ini dengan kesewenang-wenangan atau berbuat sekehendak hati polisi. Lebih-lebih apabila diingat bahwa dari organisasi kepolisian adalah sifatnya yang hirarkis dan semi militer, sehingga keberadaan kepolisian sebagai salah satu unsur ABRI lebih memperkuat sifatnya yang semi militer, yang ditandai dengan sistem atasan-bawahan yang agak ketat dan komando serta bersifat birokrasi.

Dengan *diskresi* yang melekat pada pekerjaan polisi, menjadikan polisi seakan-akan bebas berbuat apa saja dalam menafsirkan bunyi undang-undang. Bagi polisi di lapangan tidak mungkin pada setiap saat dan setiap kejadian selalu harus berkonsultasi pada atasan, apabila ia menghadapi suatu permasalahan yang mendesak untuk segera ditangani. Polisi harus bisa bersikap dan mengambil keputusan untuk bertindak secepatnya. Itulah sebabnya dalam kaitannya dengan tugas penyidikank sering kali membuat polisi mudah untuk berlindung dibalik *diskresi*, atas kekerasan yang dilakukan terhadap tersangka.

Mengenai masalah kekerasan oleh polisi ini ditanggapi secara kritis oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, yang melihatnya itu (di Indonesia) sebagai masalah struktural, karena kekerasan ini terkait dengan

kekuasaan penegak hukum menghadapi seseorang yang lemah, namun menyulitkan, maka terjadilah kekerasan itu.⁸⁶⁾

Demikian bisa dilihat perilaku polisi dalam proses penyidikan terhadap anak. Ada kecenderungan polisi melakukan tindak kekerasan, paksaan dan ancaman mulai dari penangkapan, pemeriksaan, penyusunan berita acara sampai pada tahap penahanan sementara. Sementara itu anak tidak berdaya dalam menghadapi perilaku yang demikian, karena ketidak beranian si anak dan juga karena tidak adanya pendamping dalam proses tersebut.

Penderitaan anak dalam pemeriksaan sebenarnya dimulai dari sistem pelimpahan dari bataud (bintara urusan administrasi) ke bagian serse. Bataud memegang peranan penting dalam memilah perkara, mana yang harus ditangani oleh binmas dan mana yang harus oleh serse. Sehingga tidak jarang perkara yang seharusnya bisa diselesaikan oleh binmas terpaksa masuk ke serse yang dengan sendirinya juga akan diselesaikan dengan cara serse, yang berbeda jauh dengan cara binmas.

⁸⁶⁾Informasi juga menjelaskan bahwa bagi anak orang yang mampu atau mempunyai kedudukan, biasanya perkaranya berhenti di kepolisian, karena adanya campur tangan orang tua atau instansi tempat orang tuanya bekerja. Dengan demikian jarang ditemukan adanya anak semacam itu dalam tahanan sementara polisi maupun LPAM.

Jadi dilihat dari kaca mata stigmatisasi pelaku kejahatan anak, maka awal mula seorang anak menanggung stigma dalam masyarakat adalah pada penanganan yang salah oleh polisi.⁸⁷⁾

Stigma ini bukan saja harus ditanggung oleh anak tetapi juga oleh orang tua, saudara, lingkungan tempat tinggal anak dan orang tua, bahkan juga apabila anak masih sekolah stigma ini akan melekat pula pada sekolahannya.

Apabila yang harus menanggung stigma buruk dari masyarakat adalah keluarganya, maka praktis keluarga tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk membela diri. Namun berbeda halnya dengan stigma yang melekat pada sekolah tempat anak menuntut ilmu, biasanya untuk membela diri dari kecaman masyarakat, sekolah dengan segera akan mengeluarkan anak yang bersangkutan, karena untuk menjaga nama baik sekolah itu sendiri dan takut apabila perilaku anak yang bersangkutan akan menular pada siswa lainnya.

⁸⁷⁾ Karena polisi salah dalam menangkap Edi Sartono, menjadikan ia berstatus sebagai terdakwa, yang ternyata oleh hakim ia dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Akibat dari proses peradilan tersebut. ES terus dihantui rasa takut, sering dicemooh teman bermainnya, terpaksa berhenti sekolah karena malu, sering melamun, bahkan terpaksa berpindah tempat tinggal karena sering didatangi bekas rekan tahanan yang meminta sesuatu darinya.

Setelah diputus Bebas : Edy Terus dihantui Rasa Takut, berita di Harian Umum *Suara Merdeka*, Senin 17 Juli 1995, halaman : 4, Periksa juga *K o m p a s. Op. Cit*

Dengan adanya stigma yang melekat pada anak di manapun ia berada jelas tidak akan membawa kebaikan bagi anak itu sendiri, terutama apabila dikaitkan dengan perkembangan mentalnya. Anak menjadi kurang percaya diri dan sebaliknya ia semakin merasa diasingkan lingkungannya, sehingga untuk menghilangkan keterasingannya itu jalan yang paling mudah ditempuh adalah bergabung ke dalam lingkungan bromocorah, kambuhan dan sebagainya yang tidak lagi memasalahkan masa lalu mereka.

Dengan demikian dapat dilihat betapa kejamnya stigma yang hidup di dalam masyarakat, yang seringkali menyebabkan seorang bekas pelaku kejahatan atau sekedar bekas tersangka kehilangan kepercayaan dirinya untuk hidup kembali di tengah-tengah masyarakatnya. Akibat ini menjadi semakin parah apabila menimpa anak-anak yang secara kejiwaan sebenarnya masih sangat membutuhkan perhatian namun terpaksa ditolak oleh lingkungannya, sehingga mereka melarikan diri dari kenyataan tersebut masuk ke dalam kehidupan hitam yang semakin merugikan perkembangan jiwa dan intelektual mereka.

Melihat kenyataan yang demikian, kiranya tugas polisi menjadi sangat penting dalam menentukan terjadinya prose stigmatisasi atau tidak terhadap anak. Apabila polisi kurang berhati-hati dalam menangani perkara anak, yang sebenarnya mereka mempunyai diskresi

untuk tidak meneruskan ke tingkat selanjutnya, maka tindakan tersebut akan berpengaruh besar terhadap kehidupan anak selanjutnya.

2. PERLAKUAN JAKSA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Sebagai bagian dari suatu sistem, bekerjanya aparat kejaksaan tidaklah lepas begitu saja dari interaksi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya. Itulah sebabnya dalam melihat perlakuan jaksa terhadap pembuatan surat penuntutan, pembacaan tuntutan dan pelaksanaan putusan hakim, hendaknya dipahami sebagai suatu kesatuan kerja yang utuh antara sub sistem yang ada.

Untuk mengetahui bagaimana perlakuan Jaksa terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak, terlebih dahulu perlu dilihat bagaimana fungsi dan peranannya di dalam proses tersebut. Hal ini berkaitan erat hubungan Jaksa dengan lembaga penegak hukum yang lain, dalam suatu sistem peradilan anak.

a. JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.

Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1991. Tentang kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun ketentuan-ketentuan tersebut yang berkaitan dengan masalah peradilan anak, diantaranya menyangkut tugas Jaksa, yaitu:

Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1991, menentukan bahwa:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.
4. Jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Juga di dalam Pasal 27 ayat (10) UU No. 5 Tahun 1991 di atur tentang tugas dan wewenang Jaksa di bidang pidana, yaitu:

- a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
- b. melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
- d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jaksa sebelum melakukan penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik, apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti-bukti bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut pendapatnya, berkas perkara tersebut kurang lengkap, maka ia segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.
- b. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka maka atas dasar itu Jaksa membuat surat dakwaan. Jaksa harus membuktikan surat dakwaannya itu di sindang pengadilan. Apabila dakwaannya itu terbukti, barulah Jaksa menyusun tuntutan pidana. Dengan demikian dasar untuk menyusun tuntutan adalah surat dakwaan.

Salah satu bagian yang fundamental dalam proses peradilan pidana, adalah keberadaan Jaksa penuntut umum sebagai lembaga yang harus membuat surat dakwaan. Karena dengan adanya surat dakwaan dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian Hakim dalam persidangan. Sehingga yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim adalah surat tuduhan yang dibuat oleh Jaksa dan berfungsi sebagai surat tuntutan.⁸⁸⁾

Sebagai penuntut umum Jaksa menduduki tempat yang utama sebagai penegak hukum dalam mengajukan perkara di depan pengadilan, karena tugas dan wewenangnya berhubungan dengan proses peradilan sejak penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di dalam sidang pengadilan sampai dengan eksekusi putusan pengadilan.

⁸⁸⁾A. Karim Nasution : **Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana**. PN Percetakan RI. Jakarta, halaman 27.

Sehubungan dengan tugas Jaksa sebagai penuntut umum dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana terhadap anak, maka ada beberapa langkah-langkah yang harus dilalui sebagai tanggungjawab terhadap tersangka, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara pidana anak yang diterima dari penyidik. Dalam hal ini pemeriksaan terhadap anak dilakukan dengan tidak memakai seragam serta melibatkan orang tua/wali anak untuk mendampingi. Pada kenyataannya, di dalam pemeriksaan berkas perkara Jaksa tetap memakai orang tua tidak selalu mendampingi anak. Hal ini karena beberapa hal, yaitu:
 - Pemakaian seragam dalam tahap pemeriksaan, merupakan sesuatu yang biasa, karena memang tidak ada aturan yang mengatur secara tegas.
 - Anak berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga tidak dapat mendampingi anak.
 - Walaupun berasal dari keluarga yang mampu, tetapi orang tua sudah tidak mau mengurus anak tersebut, sehingga anak harus mengurus dirinya sendiri. Dalam hal yang demikian, orang tua menyerahkan segala sesuatunya kepada pihak berwajib, terserah mau diapakan.
 - Alamat yang diberikan kepada pihak tidak benar sehingga Polisi maupun Jaksa kesulitan untuk menghubungi pihak keluarga si anak;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, segera mengembalikan berkas pada penyidik dengan memberikan petunjuk-petunjuk untuk kesempurnaan.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Dalam hal ini jaksa akan mempertimbangkan apakah perlu dilakukan penahanan terhadap anak atau tidak. Pada prinsipnya Jaksa tidak akan melakukan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi apabila anak tersebut tidak ada orang tua/walinya dan tidak ada yang bertanggungjawab, maka dengan terpaksa Jaksa melakukan penahanan dengan alasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya anak tersebut melarikan diri, pertimbangan lain dari Jaksa untuk tidak menahan adalah anak tersebut statusnya sebagai pelajar. Hal ini merupakan pertimbangan Jaksa agar anak masih dapat melanjutkan sekolahnya.

- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan persidangan dengan disertai panggilan kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan orang tua/wali tersebut;
- g. Melaksanakan penuntutan;
- h. Melakukan tindakan lain dalam ruang lingkup dan tanggung jawab penuntut umum.
- i. Melaksanakan penetapan Hakim.

Sehubungan dengan tugas Jaksa dalam penuntutan, sebagai tanggungjawab Jaksa dalam proses penuntutan harus didahului dengan surat dakwaan yang memenuhi syarat formal dan syarat material. Kegunaan syarat formal adalah untuk menentukan identitas terdakwa, sehingga surat dakwaan itu harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Sedangkan syarat material dimaksudkan bahwa surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran selengkap-lengkapnyanya tentang perbuatan yang telah dilakukan tersangka dan membuktikan bahwa tersangka bersalah atau tidak bersalah.

Adapun yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari

tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang apabila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁸⁹⁾

Tugas pokok Jaksa sebagai penuntut umum dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana merupakan sub sistem yang mencerminkan bekerjanya penegakan hukum pidana terutama dalam hal pembuatan surat dakwaan, dengan mendasarkan pada penghormatan atas hak-hak asasi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Jaksa harus mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan penyidikan perkara dalam arti Jaksa dibebani pengawasan dan koordinasi alat-alat penyidik demi kepentingan anak-anak yang kena perkara.⁹⁰⁾ Dengan tugas dan wewenang yang begitu luas, maka dapat dipahami bahwa antara penyidik dan penuntut umum serta Hakim dalam rangka melaksanakan penegakkan hukum di bidang hukum pidana dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang.

Bekerjanya Jaksa dalam proses peradilan pidana anak dimulai dari pemeriksaan berkas perkara yang diserahkan oleh Polisi. Dalam pemeriksaan ini diteliti

⁸⁹⁾ *Ibid*, halaman : 75.

⁹⁰⁾ Karyadi : Himpunan Undang-Undang Terpenting bagi Penegak Hukum Politea, Bogor, 1980 halaman 5.

mengenai unsur-unsur pidananya yang akan dituntut oleh Jaksa. Juga mengenai identitas tersangka apakah benar, sesuai dengan yang tercantum di dalam berkas perkara. Apabila ternyata unsur-unsur yang akan dituntut belum memenuhi kriteria tindak pidana, maka dikembalikan pada pihak polisi. Apabila hal ini berlangsung berkali-kali, berarti anak semakin lama berada dalam tahanan sementara. Hal ini akan berakibat buruk terhadap perkembangan jiwa maupun perilaku anak. Walaupun untuk kepentingan penuntutan terhadap anak yang melakukan penahanan. Tetapi jaksa juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penangguhan penahanan.

Dalam hal penangguhan penahanan terhadap anak diperlukan orang tua/wali anak yang dapat menjamin serta bertanggungjawab terhadap anak. Terhadap anak terlantar diperlukan adanya lembaga sosial yang mau bertanggungjawab terhadap anak. Tetapi di Indonesia hal ini belum dapat dilakukan karena belum ada undang-undang maupun peraturan yang mengatur mengenai hal ini, sehingga hal ini menyebabkan dilakukannya penahanan terhadap anak terlantar untuk kepentingan penyidikan benar, sesuai dengan yang tercantum di dalam berkas perkara. Apabila ternyata unsur-unsur yang akan dituntut belum memenuhi kriteria tindak pidananya, maka dikembalikan pada pihak Polisi. Apabila hal ini berlangsung berkali-kali, berarti anak semakin lama berada dalam tahanan sementara. Hal ini akan berakibat

buruk terhadap perkembangan jiwa maupun perilaku anak. Walaupun untuk kepentingan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Jaksa mempunyai kewenangan melakukan pemahaman. Tetapi Jaksa juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penangguhan penahanan.

Dalam hal penangguhan penahanan terhadap anak diperlukan orang tua/wali anak yang dapat menjamin serta bertanggungjawab terhadap anak. Terhadap anak terlantar diperlukan adanya lembaga sosial yang mau bertanggungjawab terhadap anak. Tetapi di Indonesia hal ini belum dapat dilakukan karena belum ada undang-undang maupun peraturan yang mengatur mengenai hal ini, sehingga hal ini menyebabkan dilakukannya penahanan terhadap anak terlantar untuk kepentingan penyidikan.

- (1). Anak akan melarikan diri
- (2). Anak akan merusak atau menghilangkan barang bukti.
- (3). Anak akan mengulangi melakukan tindak pidana.

Masalah yang timbul dengan dilakukannya penahanan terhadap anak adalah adanya pengaruh psycologis yang dapat menimbulkan anak menjadi frustasi dan merasa rendah diri.

Tugas Jaksa melaksanakan penetapan Hakm dan putusan pengadilan secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b U.U. No. 5 tahun 1991 yaitu, dibidang pidana, kebijaksanaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan

pengadilan. Tugas melaksanakan penetapan dan melaksanakan putusan tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana, sebagai realisasi dari kebijaksanaan penegakkan hukum pidana. Oleh karena terhadap semua bentuk kejahatan ataupun pelanggaran dari aturan hukum pidana ditetapkan sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sehubungan dengan tugas Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan, adalah berkaitan dengan sistem sanksi pidana.

Ada tiga sistem sanksi yang dapat digunakan, yaitu sistem hukm perdata, sistem sanksi hukum pidana, dan sistem sanksi hukum administrasi.⁹¹⁾ Di dalam putusan pengadilan atau penetapan Hakim yang bersifat pemidanaan akan mempunyai konsekwensi yang luas baik terhadap pelaku tindak pidana (dalam hal ini anak) maupun masyarakat serta korban tindak pidana. Oleh sebab itu Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan Hakim seharusnya memperhatikan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat, dan memperhatikan rasa perikemanusiaan berdasarkan demi kepentingan kesejahteraan pelaku kejahatan anak.

Putusan pengadilan yang harus dilaksanakan adalah putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam KUHAP Pasal 14 huruf j dinyatakan, bahwa

⁹¹⁾Sudarto : **Hukum dan Hukum Pidana**. Alumni, Bandung, 1986, halaman 76.

Jaksa berwenang melaksanakan penetapan Hakim, Sesuai dengan hal ini, di dalam menyebutkan, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu paniterad mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Salinan putusan dari panitera yang telah diterima oleh Jaksa harus segera dilaksanakan. Hal ini diatur di dalam Pasal 197 ayat (3) KUHP, bahwa putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Penetapan Hakim pada dasarnya dikeluarkan demi kelancaran dalam proses peradilan pidana. Dikeluarkannya penetapan Hakim pada saat sidang perkara pidana dimulai, dan dapat pula saat sidang perkara pidana berlangsung. Sedangkan pada saat sidang perkara pidana telah selesai, bentuknya bukan lagi penetapan melainkan keputusan.

3. PERSEPSI HAKIM TERHADAP ANAK DALAM SIDANG PENGADILAN ANAK

a. SIDANG PENGADILAN ANAK DALAM PERADILAN UMUM

Sekalipun terikat pada suatu sistem yang ketat, namun hakim dan peradilan tidak indentik dengan "mesin peradilan" yang dapat bekerja secara mekanis dalam menyelesaikan suatu perkara. Alasannya sebenarnya sangat jelas dan sederhana. Pertama, karena hakim adalah manusia yang mampu bekerja dengan akal budinya, sehingga dalam menyelesaikan suatu permasalahan/kasus/perkara tidak cukup dengan mengandalkan daya pikir dan ketrampilan dalam mengopersionalisasikan hukum, namun juga dengan berlandaskan moral yang muncul dari hati nuraninya (apabila dalam hal ini undang-undang menjamin kemandirian hakim dalam menangani suatu perkara). Kedua, kasus-kasus yang ditangani hakim sangat bervariasi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sehingga memerlukan penanganan secara individual.

Bervariasinya kasus dapat berpengaruh terhadap hasil keputusan hakim. Namun hal ini tentu saja masih tergantung dari banyak faktor, seperti situasi dan kondisi masyarakat, sistem pengawasan dan lain-lain. Faktor lain yang paling menentukan adalah sikap hakim itu sendiri dalam menghadapi kasus-kasus tersebut.

Jenis-jenis kasus di pengadilan jika dikaitkan dengan kondisi hakim yang dapat berpengaruh terhadap hasil putusan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika dikaitkan dengan profesionalisme hakim, maka ada perkara yang sederhana/mudah namun juga ada perkara yang sulit. Bagi hakim yang profesional (dalam arti memiliki keahlian yang memadai, berpengalaman), variasi perkara tersebut tidak menjadi masalah, namun bagi hakim yang "kurang" baik dalam hal keahlian dan pengalaman, seperti misalnya hakim-hakim yunior, maka akan berpengaruh sekali dalam menangani perkara yang sulit. Hal ini karena dalam menyelesaikan perkara tersebut biasanya disertai dengan faktor "baru belajar", masih "meraba-raba", "mencari pengalaman" dan sikap lainnya yang mengandung faktor spekulasi. Apalagi dalam undang-undang hakim tidak boleh menolak perkara yang dilimpahkan kepadanya, sehingga dengan kemampuan yang terbatas hakim (yunior) dipaksa untuk menyelesaikan setiap perkara, termasuk perkara yang sulit. Jika tidak diwaspadai maka kemungkinan akan menghasilkan keputusan yang mengandung "cacat".
2. Apabila dikaitkan dengan semangat hakim, maka ada perkara yang menarik dan membuka tantangan.

Perkara-perkara semacam ini dapat memacu semangat hakim untuk belajar, berkembang dan berusaha menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Apalagi bagi hakim yang "memiliki kegemaran" menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang kontroversial dan kasus yang ditangani telah menjadi perhatian masyarakat atau bersifat nasional, maka kesempatan seperti ini tentunya tidak akan disia-siakan.

Sebaliknya jika perkara yang ditangani banyak, tidak menarik/monoton, dan cenderung bersifat rutin, maka akan dapat menimbulkan kejenuhan pada diri hakim. Apalagi jika hakim terjebak dalam rutinitas dan tuntutan target penyelesaian perkara yang tidak seimbang. Kondisi ini jika berlarut-larut dapat menimbulkan pengaruh buruk yaitu membentuk perilaku hakim seperti kecenderungan bekerja secara mekanis, dengan pertimbangan yang tidak teliti, kurang memperhatikan aspek-aspek di luar aspek yuridis secara mendalam, menyamaratakan perkara yang satu dengan perkara yang lain, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada hasil putusan pengadilan.

3. Jika dikaitkan dengan kepribadian hakim, maka ada perkara yang menyangkut obyek perkara yang kecil, beresiko tinggi dan bersifat ketat, namun ada

juga perkara yang yang menyangkut objek perkara besar (biasanya perkara perdata), resikonya kecil atau tidak beresiko sama sekali dan banyak "lobang-lobangnya" dalam arti banyak memberikan peluang untuk menyimpang/berkolusi. Bagi hakim yang memiliki kepribadian yang kuat atau teguh berpegang pada komitmennya sebagai penegak hukum dan keadilan, maka jenis-jenis perkara seperti ini tidak ada pengaruhnya, karena yang menjadi tujuannya adalah bagaimana dapat menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya dan memutuskan seadil-adilnya. Sebaiknya bagi hakim yang memiliki kepribadian yang "rentan" maka jenis-jenis perkara tersebut sangat berpengaruh sekali, karena pertimbangannya tidak lagi sesuai dengan komitmennya, namun telah mengarah pada perhitungan "untung-rugi".

Kebanyakan hakim mengambil jalan tengah, yakni tidak menolak "bonus" tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keadilan⁹²⁾. Dalam kondisi yang parah ada beberapa oknum hakim yang tidak saja meminta

⁹²⁾Benyamin Mangkoedilaga, dalam ceramah dihadapan para tenaga edukatif di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Juni 1992, antara lain mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi hakim untuk menerima sesuatu dari orang lain asal tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang ia tangani atau tidak berpengaruh terhadap putusannya, tidak meminta dan tidak berharap.

namun berani menentukan "tarif" untuk sebuah order putusan tertentu⁹³⁾. Kondisi seperti ini jelas merusak konsep "adil dan tidak memihak" yang dijunjung tinggi dalam dunia peradilan.

Dari gambaran tersebut di atas, jelaslah bahwa jenis kasus/perkara dapat berpengaruh terhadap "output" lembaga peradilan, namun sekali lagi kajian tersebut di atas tidak dapat diperlakukan secara absolut, namun masih sangat tergantung dengan kondisi "input" lainnya, yang terutama adalah faktor integritas hakim.

Faktor-faktor Internal yang Mempengaruhi Hakim Dalam Mengambil Keputusan

Hal-hal yang baru saja dibahas dalam sub-sub tersebut di atas merupakan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam membangun citra peradilan. Kini penulis akan membahas faktor-faktor internal yang membentuk perilaku hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

⁹³⁾Akhir-akhir ini banyak kasus penyelewengan/penyuapan hakim yang muncul di permukaan dan dimuat di beberapa media massa, seperti misalnya kasus hakim Sarwono cs, (kasus restitusi pajak fiktif - PN Surabaya); kasus Hakim Soetrisno (kasus Edy Tansil/korupsi Golden key-Bapindo-PN, Jakarta Pusat) yang akhir-akhir ini merebak, serta masih banyak kasus-kasus lainnya seperti hakim-hakim Soemadiono, Hanny dan Loude, Heru Gunawan, Ruwiyanto dll. Periksa; "Banyak yang Disuap Sedikit yang Diadili" dalam *Forum Keadilan*, No. 24 Tahun IV, Maret 1996, Halaman 16-17.

Adapun faktor (internal) yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah:⁹⁴⁾

1. Faktor Subyektif:

a. Sikap perilaku yang apriori.

Sering kali hakim dalam mengadili suatu perkara sejak awal dihinggapinya suatu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa atau penggugat bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan modern, yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), terutama dalam perkara pidana. Sifat yang bersifat memihak salah satu pihak (biasanya adalah penuntut umum atau penggugat) dan tidak adil ini bisa saja terjadi karena hakim terjebak oleh rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.

b. Sikap dan perilaku emosional

Perilaku hakim yang mudah tersinggung, pendendam dan pemaarah akan berbeda dengan

⁹⁴⁾Lihat/bandingkan: Yaahya Harahap, *Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Untuk Penegakan keadilan*, PY Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1989, halaman 8, dan Loebby Logman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-co, Jakarta, 1993, Halaman 123-124.

perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. hal ini jelas sangat berpengaruh pada hasil putusannya.

c. Sikap Arrogance Power

Hakim yang memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain seperti Jaksa, Penasihat Hukum apalagi Terddakwa atau pihak-pihak yang bersengketa lainnya, seringkali mempengaruhi suatu keputusan.

d. Moral

Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi insan penegak keadilan, terutama hakim. Faktor ini yang berfungsi membentengi tindakan hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, penyelewengan daan sikap tidak adil lainnya. Cobaan seperti ini banyak sekali dijumpai di dunia peradilan, mengingat tugas hakim berkaitan dengan permasalahan/kasus/perkara yang dihadapi banyak pihak dan banyak kepentingan. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap hasil putusan hakim, sebab bagaimanapun juga, pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral prinadi hakim tersebut, terlebih dalam memeriksa serta memutuskan

suatu perkara.

2. Faktor Obyektif.

a. Latar belakang sosial, budaya dan ekonomi.

Latar belakang sosial seorang hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam beberapa kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan hakim yang berasal dari status sosial menengah atau rendah.

Kebudayaan, agama dan pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang keras, zaaklijk, dan liberal tentu akan berbeda dalam menangani suatu perkara, dibandingkan dengan hakim yang berasal dari lingkungan budaya halus, longgar dan kekeluargaan. Agama yang dianut juga sangat mempengaruhi hakim dalam memberikan dasar pertimbangan suatu perkara. Hal ini karena setiap agama memiliki dasar ajaran yang berbeda dan kewajiban setiap penganutnya untuk melaksanakan ajaran-ajaran tersebut dalam setiap tingkah lakunya. Disamping itu pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi sikap perilakunya. Hakim yang

rajin mengikuti berbagai pendidikan tambahan, seperti penataran-penataran, kursus-kursus atau bahkan melanjutkan kependidikan yang stratanya lebih tinggi tentu akan memiliki lebih banyak dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, dibandingkan dengan seorang hakim yang hanya mengandalkan peendidikan Sarjana Hukumnya saja.

Satu hal lagi yang dalam banyak hal mempengaruhi perilaku hakim adalah latar belakang ekonomi. Sebagai manusia biasa harus tercukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, faktor ekonomi seringkali mempengaruhi pola pikirnya. Bisa saja karena desakan ekonomi, seorang hakim pada awalnya memiliki pendirian yang teguh, memiliki komitmen yang kuat pada idealismenya, secara berangsur-angsur melemahkan pendiriannya atau melunturkan idealismenya dan menjadikannya bersikap pragmatis. Pada taraf yang paling parah faktor ini bahkan bisa mendorong hakim berani melakukan "unjustice action" hanya untuk mendapatkan imbalan materi. Faktor ini tentu saja tidak bersifat absolut, sebab hakim yang memegang teguh kode etik kehormatan hakim, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor apapun, termasuk desakan ekonomi.

b. Profesionalisme

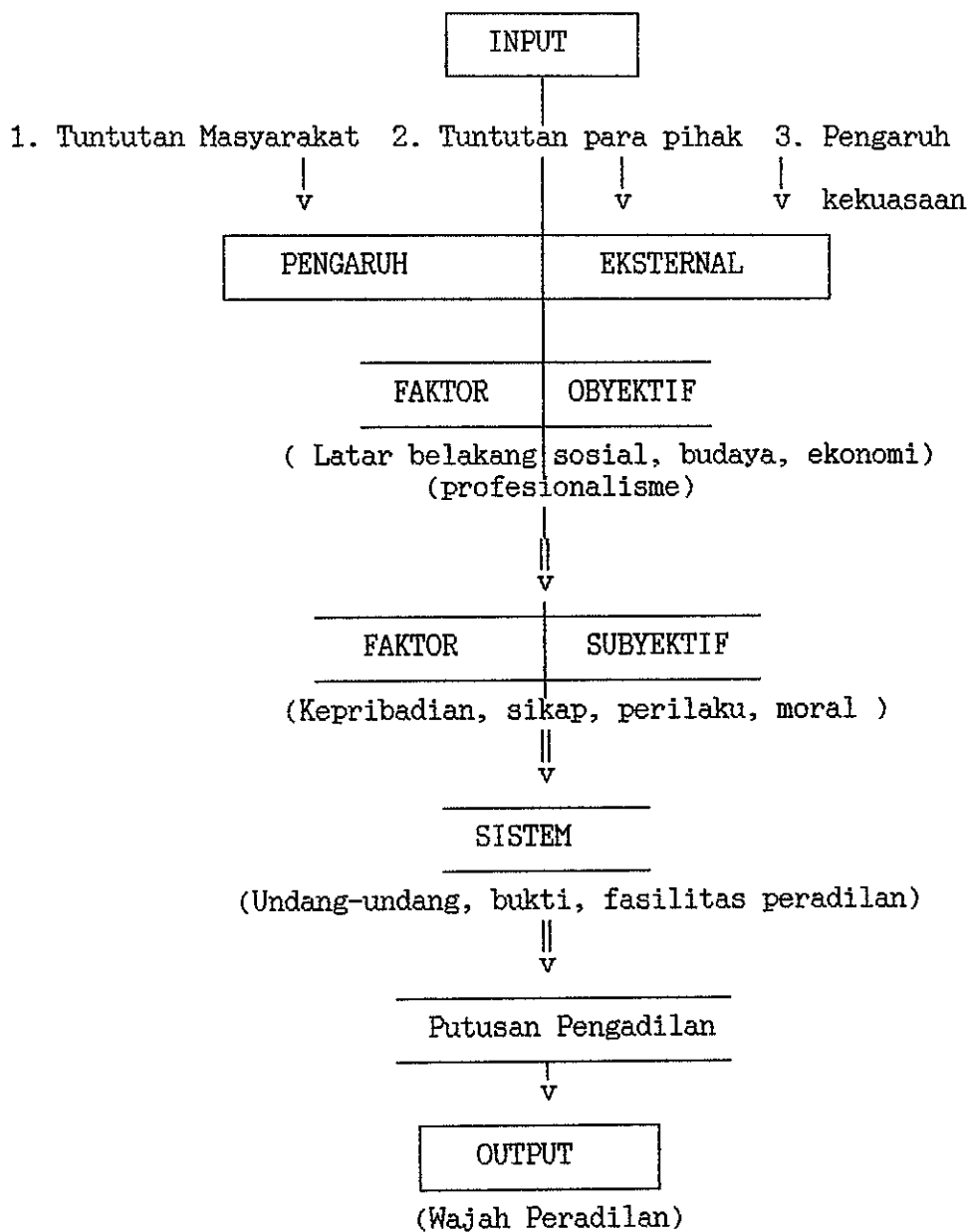
Profesionalisme yang meliputi knowledge (pengetahuan, wawasan) dan skills (keahlian, ketrampilan) yang ditunjang dengan ketentuan dan ketelitian yang merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga sering dikaitkan dengan kode etik dilingkungan peradilan. Oleh sebab itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, dibandingkan dengan hakim yang kurang mengindahkan etika profesi, sekalipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Perilaku Hakim dan Wajah Peradilan

Faktor-faktor eksternal (sistem peradilan, persepsi masyarakat, pengaruh eksekutif dll.) dan faktor-faktor internal (beberapa sikap perilaku hakim dan latar belakang kepribadian hakim) sebagaimana telah penulis uraikan di atas memang tidak berlaku secara eksak dan linear, namun harus dipahami secara kritis sebagai sebuah proses, dimana hasil output dari suatu putusan peradilan sampai

pada bagaimana *image* masyarakat terhadap wajah peradilan, sangat dipengaruhi oleh berbagai input dan kondisi fasilitas, sarana dan prasarana lembaga peradilan, terutama adalah eksistensi hakimnya.

Untuk memahami bagaimana proses pembentukan perilaku hakim yang memengaruhi pembentukan *image* wajah peradilan, berikut ini penulis akan mendiskripsikan dengan sebuah model :



Model tersebut diatas pada dasarnya merupakan rangkuman dari seluruh bahasan dari subbab-subbab terdahulu. Dalam realitabnya tentu tidak sederhana model tersebut, sebab faktor-faktor dalam model tersebut tidak berdiri sendiri namun saling terkait dan kaitannyapun tidak bersifat linier namun banyak oleh dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu. Dengan model tersebut penulis berusaha menjelaskan bahwa sikap atau perilaku hakim dalam menjatuhkan putusan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar diri hakim (eksternal) disamping faktor-faktor pada diri hakim itu sendiri (internal). Sikap atau perilaku hakim dalam taraf tertentu mampu membentuk pola perilaku di lingkungan peradilan yang akhirnya diterima oleh masyarakat sebagai wajah peradilan.

Masyarakat yang menerima output peradilan yang berupa putusab peradilan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu *interest group* atau pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya yang berada pada posisi netral. Pihak -pihak yang berkepentingan (tergugat, penggugat, terdakwa, penuntut, korban, pihak ketiga, dll) tentu memiliki pandangan yang berbeda terhadap wajah peradilan. Mereka yang perkaranya dimenangkan atau merasa diuntungkan oleh putusan pengadilan, biasanya memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka yang dikalahkan atau merasa dirugikan oleh putusan

pengadilan. Demikian pandangan masyarakat (opini publik) yang sekalipun secara langsung tidak berkepentingan terhadap suatu putusan pengadilan akan memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi suatu putusan pengadilan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya faktor seperti tingkat pendidikan, tingkat kesadaran hukum, lingkungan sosial, pengalaman-pengalaman empiris dan lain sebagainya.

Demikian cara memahami secara menyeluruh bagaimana wajah peradilan yang sebenarnya. Sesuai dengan sifatnya, maka pandangan sosiologis menjelaskan bahwa perbedaan persepsi mengenai suatu putusan pengadilan tertentu adalah wajar. Tulisan ini tidak bermaksud menilai wajah peradilan kita, namun berusaha menjelaskan bagaimana *image* mengenai wajah peradilan terbentuk. Dalam hal ini hakim dengan segala sikap dan perilaku sangat mempengaruhi proses pembentukan *image* tersebut.

Di dalam Pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan di Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan bahwa perbedaan empat lingkungan peradilan ini tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan

(defferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dlam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengaddilan lalu lintas, pengadilan anak-anak, pengadilan ekonomi dan sebagainya dengan undang-undang.

Melihat penjelasan Pasal 10 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pengadilan anak merupakan salah bentuk kekhususan di lingkungan Pengadilan Umum, yang secara khusus menangani perkara yang menyangkut kepentingan anak. Diadakannya secara khusus pengadilan anak, dimaksudkan agar anak-anak benar-benar terlindungi kesejahteraannya, demikian juga kesejahteraan masyarakat sekaligus juga memperhatikan faktor keadilan. Oleh sebab itulah membicarakan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari tujuan atau dasar pemikiran perlindungan anak itu sendiri. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Seperti halnya dengan belum adanya polisi khusus menangani perkara anak, sampai saat ini di Indonesia belum mempunyai Pengadilan Anak. Praktik pengadilan selama ini baru mengenal adanya Sidang Anak dengan perlakuan khusus terhadap anak pada waktu sebelum persidangan, selama persidangan dan

sesudah putusan Hakim.

Sidang anak ini bertujuan mendidik kembali (*re-educate*) dan memperbaiki (*rehabilitate*), bukan semata-mata menghukum (*not to punish the child*). Tujuan pemberian sanksi terhadap anak bersifat pembinaan dan perlindungan terhadap anak tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat, karena itu sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim sesuai dengan kebutuhan pembinaan si anak⁹⁵⁾.

Kedudukan sidang anak adalah bagian dari persidangan di lingkungan peradilan umum, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana (dan perkara perdata) mengenai anak. Adanya kekhususan dalam cara pemeriksaan perkara pidana yang terdakwa anak-anak dan berbeda pemeriksaan terhadap terdakwa dewasa perlu mendapat perhatian khusus.

Acara yang diserahkan polisi atau Bispa. Pentingnya Hakim untuk mengetahui keadaan anak adalah untuk dijadikan sebagai bahan untuk dijadikan sebagai bahan tambahan dalam melakukan pertimbangan sebelum memutus perkara. Putusan Hakim sangat

⁹⁵⁾Erna Sofwan Syukrie: *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang-undang Peradilan Anak*, makalah dalam Pelatihan Tehnis Yustisial Pengetahuan Hukum, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung R.I., Jakarta 1995, halaman : 27.

menentukan perkembangan jiwa anak di masa depan. Oleh sebab itu putusan yang tidak dilandasi oleh pemikiran yang bijaksana tanpa memperhatikan keadaan anak, dapat mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun mental.

Putusan yang bersifat menghukum dan tidak tepat akan mempengaruhi kelangsungan masa depan anak. Ketidaktepatan putusan Hakim ini dapat terjadi karena dalam proses pengambilan keputusan Hakim kurang atau tidak memperhatikan keterangan yang lengkap tentang penelitian masyarakat (litmas) si anak. Ini terjadi karena tidak dilibatkannya Bisma dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut. Ketidaktepatan keputusan tersebut dapat pula terjadi karena Hakim tidak memperhatikan pelaku kejahatan (yaitu anak), tetapi semata-mata hanya melihat sudah terpenuhinya unsur pidana dalam perkara yang diperiksanya.

Asas yang berlaku dalam sidang pengadilan anak tidak berbeda dengan asas yang dianut dalam Pengadilan Umum, yaitu asas terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa persidangan bersifat terbuka, siapapun boleh melihat dan mengikuti jalannya persidangan. Namun mengingat dalam persidangan anak, anaklah yang menjadi pusat pemeriksaan, maka dipandang perlu untuk dilakukan suatu pengeculaian dari asas tersebut demi kepentingan si anak. Pengeculaian itu

dituangkan dalam bentuk *kebijaksanaan lisan* antar instansi dari wakil-wakil Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan bahwa pelaksanaan sidang anak dilakukan secara *tertutup*.

Secara khusus Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA No. 3 /1959) yang ditujukan kepada Hakim sebagai berikut :

Oleh karena pemeriksaan dalam perkara pidana dimana dituntut sebagai terdakwa anak-anak yang dituduh melakukan salah satu tindak pidana pada umumnya dilakukan dihadapan umum, sehingga tidak jarang terjadi, bahwa pemeriksaan tersebut menjadi tontonan umum, hal mana sangat merugikan jiwa si anak yang bersangkutan, sedangkan ada banyak harapan untuk memperbaiki jiwa anak-anak yang nakal itu di bawah pimpinan yang baik, sehingga anak-anak tersebut kelak masih dapat dijadikan anggota masyarakat yang berguna, maka dengan ini demi untuk kepentingan anak-anak itu disarankan untuk memeriksa perkara anak-anak dengan *pintu tertutup*.

b. PEMERIKSAAN DALAM SIDANG PENGADILAN ANAK

Sampai saat ini belum ada Hakim khusus untuk menangani perkara anak. Hakim dalam persidangan anak adalah Hakim dari Peradilan Umum yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara anak. Penunjukan ini tidak bersifat tetap, dalam arti semua Hakim dalam lingkungan Peradilan Umum mempunyai kesempatan yang sama untuk menangani perkara anak.

Secara normatif perundang-undangan, sampai saat ini tidak ada satupun ketentuan yang mengatur

mengenai penunjukan secara khusus bagi Hakim untuk menangani perkara anak. Praktik penunjukan Hakim untuk perkara anak dilakukan di Pengadilan Negeri ini ditekankan pada Hakim yang mempunyai pengetahuan, setidak-tidaknya perhatian dan dedikasi terhadap masalah anak nakal dan terlantar⁹⁶⁾. Adapun dasar pertimbangannya adalah bahwa apabila Hakim tersebut mempunyai perhatian dan memahami anak, maka setidak-tidaknya ada harapan besar bahwa kepentingan anak dapat terjamin.

Penunjukan Hakim yang menangani perkara anak dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Biasanya yang ditunjuk mengadili perkara anak adalah Hakim wanita, dengan pertimbangan bahwa dilihat dari faktor kejiwaan, pada umumnya wanita mempunyai sifat keibuan yang dapat mengerti tentang kemauan anak, tentang perkembangan anak dan secara emosional mamapu melakukan pendekatan dengan anak. Sehingga diharapkan dengan wanita sebagai Hakim anak akan menghadirkan suasana kekeluargaan di dalam peradilan anak tersebut.

⁹⁶⁾Ini didasarkan pada Surat dari Hakim Agung Pengawasan Wilayah Pengadilan Tinggi di Bandung dan Semarang kepada Ketua Pengadilan Tinggi di Bandung dan Semarang, dan Ketua-ketua Pengadilan Negeri di Jawa Barat dan Jawa Tengah, tahun 1971. Bandingkan dengan Pasal 9 RUU Peradilan Anak 1988 : untuk menjadi Hakim Anak, selain telah berpengalaman menjadi Hakim dalam lingkungan peradilan umum, seyogianya mempunyai perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Menciptakan suasana kekeluargaan dalam persidangan anak, sebenarnya tidak hanya dengan menghadirkan Hakim wanita dalam persidangan semata-mata. Yang penting diperhatikan dalam persidangan anak, adalah bagaimana Hakim (wanita maupun laki-laki) melakukan pemeriksaan tanpa anak merasa takut atau merasa tertekan, sehingga anak benar-benar mengerti apa yang ditanyakan oleh Hakim kepadanya. Hakim harus mampu mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang dimengerti oleh anak, dan meyakinkan bahwa berterusterangnya anak akan sangat membantu jalannya persidangan, sehingga anak tidak terlalu lama menghadapi pemeriksaan oleh Hakim. Dengan demikian sebenarnya dalam persidangan anak, Hakim tidaklah mutlak harus wanita, Hakim laki-lakipun mempunyai kesempatan yang sama, sejauh ia dapat memahami tugasnya dalam persidangan anak, yang dalam banyak hal berbeda dengan persidangan orang dewasa.

Formasi sidang/susunan sidang dalam pengadilan anak cenderung dilakukan secara majelis, tidak dengan Hakim tunggal. Hal ini kurang menguntungkan bagi si anak. Anak menghadapi pada tiga orang Hakim sekaligus, yang menjadikann ia semakin takut dan tertekan karena harus menjawab pertanyaan yang bertubi-tubi dari tiga orang Hakim tersebut.

Pada persidangan anak, Hakim kurang memperhatikan subyek pelaku, tampaknya lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan, sehingga praktis tidak ada pengecualian apakah pelakunya anak-anak atau dewasa asalkan perkaranya sudah memenuhi unsur tindak pidana, maka akan diproses. Tampak bahwa sebenarnya dari pihak Hakim sendiri kurang ada kepedulian untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku anak-anak. Bagi Hakim yang menjadi pusat perhatian adalah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, bukan siapa yang melakukan perbuatan. Kurangnya perhatian Hakim pada masalah tersebut juga dapat dilihat dari persidangan anak yang Hakimnya tetap menggunakan toga dan bersikap formal sebagaimana menghadapi pelaku kejahatan dewasa.

Acara persidangan anak dilakukan secara terbuka, sehingga dapat diikuti dan dilihat oleh umum, termasuk pers dari media cetak maupun media elektronik. Dampak dari terbukanya persidangan anak tersebut segera dapat dilihat yaitu dicantumkannya secara terang-terangan nama dan bahkan juga disertai foto si pelaku kejahatan anak di dalam surat kabar, majalah atau ditayangkan di televisi. Nama pelaku tidak lagi dicantumkan secara singkat (inisial), bahkan juga diberitakan secara lengkap nama orang

nama sekolahnya. Dengan kata lain asas praduga tidak bersalah dalam kondisi demikian cenderung diabaikan.

Dimunculkannya kasus-kasus kejahatan anak secara terbuka di media massa sebenarnya bermakna ganda, yaitu sebagai kontrol sosial terhadap jalannya proses peradilan, namun sekaligus juga menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi pelaku maupun keluarga dan lingkungan si anak. Secara positif, dengan diberitakan secara terbuka oleh media massa, apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan di dalam proses peradilan dapat segera dilakukan koreksi. Sementara itu secara negatif, dapat menimbulkan stigma terhadap anak oleh masyarakat. Stigma sebagai penjahat (kecil) ini sudah barang tentu merupakan beban tersendiri bagi si anak maupun keluarganya, sekalipun mungkin ternyata dalam sidang pengadilan tidak terbukti bersalah. Dalam kondisi masyarakat seperti dewasa ini, dimana asas praduga tidak bersalah masuih belum tumbuh dengan baik, maka keterbukaan dalam pemberitaan mengenai pelaku kejahatan anak, baik sudah selesai diputuskan maupun sedang dalam persidangan, sudah barang tentu beban menjadi semakin berat disandang oleh anak. Anak menjadi terkucil dari pergaulan di lingkungannya atau selalu dicurigai, sehingga dapat mengakibatkan anak menjadi murung, tidak percaya diri dan perkembangan jiwanya

menjadi tidak optimal. Bahkan ada juga kemungkinan justru anak mengulangi kembali perbuatan buruknya dan bergabung dengan teman-temannya yang senasib dengannya, membentuk kelompok "penjahat kecil" untuk menunjukkan eksistensinya dirinya pada lingkungan mereka.

Persidangan anak dilakukan secara tertutup apabila ada permintaan dari orang tua atau penasihat hukum yang mendampingi anak dalam persidangan. Ini berarti bahwa anak baru terhindar dari tontonan umum apabila ada orang tua atau penasihat hukum yang mendampinginya. Padahal dalam praktik sudah hal biasa apabila anak maju seorang diri di dalam pemeriksaan pengadilan. Ketidakhadiran orang tua dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan juga disebabkan oleh banyak hal, sebagaimana ketidakhadiran mereka di pemeriksaan polisi. Anak yang berstatus gelandangan misalnya, susah diketahui alamat orang tuanya dengan jelas dan pasti, sehingga ini juga menyulitkan untuk menghadirkan orang tuanya di persidangan. Atau walaupun diketahui alamatnya tetapi letaknya terlalu jauh dengan tempat terjadinya perkara (proses peradilan pidana) sehingga orang tuanya tidak dapat mendampingi. Ketidakhadiran orang tua mendampingi anak di dalam persidangan dapat juga dikarenakan ketidakmampuan orang tua untuk hadir. Dapat pula terjadi orang tua

tidak tahu bahwa anaknya telah melakukann kejahatan. Hal ini dapat terjadi apabila si anak memberikan keterangan, sudah tidak mempunyai orang tua atau keluarga.

Kondisi yang demikian (ketidak jelasan keterangan anak) menjadi semakin parah apabila tidak ada keterangan penelitian masyarakat dari Bispa. Ketidakadaan keterangan tersebut dengan sendirinya akan terus berlanjut sampai pendataan di LPAN, dimana keterangan yang salah ini dianggap benar. Sehingga begitu dilepas oleh LPAN tidak dapat diserahkan kepada keluarganya.

Di samping berhak didampingi orang tua, dalam setiap persidangan, anak berhak didampingi oleh Bispa. Bahkan sejak pemeriksaan pendahuluan di kepolisian dapat meminta dilakukan penelitian masyarakat oleh Bispa tentang keadaan anak yang bersangkutan. Hal ini untuk menghindari penanganan yang salah terhadap anak, untuk mengetahui latar belakang sosial si anak. Pentingnya pengetahuan tentang keadaan si anak merupakan keterangan untuk menambah bahan pertimbangan Hakim di dalam memutuskan perkara pidana anak agar dapat dicapai prinsip di dalam mengadili anak, yaitu melindungi jiwa anak untuk kessejahteraan anak pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Dengan adanya keterangan tentang keadaan si anak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga diharapkan putusan Hakim benar-benar bijaksana dan sesuai dengan tujuan dalam peradilan pidana anak. Sebab apabila Hakim salah dalam memberikan putusan akan mengakibatkan penderitaan fisik dan mental si anak, bahkan lebih jauh dapat merusak masa depan si anak.

Kehadiran BISPA di sidang anak secara praktis hampir tidak pernah ada. Dikarenakan Hakim jarang menggunakan penelitian masyarakat dari Bispa, walaupun sudah ada penelitian masyarakat dari Bispa atas permintaan jaksa / polisi, Hakim tidak selalu menghadirkan Bispa sebagai saksi (berdasarkan permintaan jaksa/polisi).

Anak juga berhak didampingi penasihat hukum dalam persidangan anak jarang sekali terjadi. Dalam pandangan Hakim, tidak didampinginya anak oleh penasihat hukum, bukan kesalahan Hakim. Dalam arti Hakim tidak perlu menginformasikan kepada terdakwa anak bahwa dirinya dapat didampingi oleh penasihat hukum, maka dalam pandangan Hakim, penasihat hukumlah yang seharusnya aktif mencari informasi di pengadilan mengenai ada tidaknya perkara anak dan kapan perkara tersebut disidangkan. Penasihat hukum sendirilah yang kemudian seharusnya mempunyai prakarsa untuk mendampingi anak dalam persidangan.

c. PUTUSAN HAKIM DALAM SIDANG PENGADILAN ANAK

Idealnya persidangan anak dilakukan secara tertutup, baru untuk pembacaan keputusan Hakim dilakukan secara terbuka. Pembacaan keputusan Hakim dilakukan secara terbuka dalam sidang peradilan anak selama ini sudah berjalan dengan baik. Dalam membacakan keputusannya, sidang dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui bersalah tidaknya si anak.

Secara khusus di dalam Pasal 45 KUHP diatur bahwa jika orang di bawah umur dituntut karena peristiwa yang dilakukannya ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, Hakim dapat memutuskan :

1. Memerintahkan, supaya orang yang bersalah dikembalikan ke orang tuanya;
2. Memerintahkan, supaya si bersalah diserahkan kepada Pemerintah;
3. Menghukum si bersalah dengan pidana.

Ke tiga jenis sanksi tersebut merupakan alternatif sanksi yang dapat diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tetapi untuk menentukan salah satu alternatif tersebut tidak ada kriterianya. Pemilihan salah satu dari ke tiga alternatif sanksi tersebut merupakan kebebasan Hakim untuk menentukan putusan yang paling baik untuk dijatuhkan bagi si anak. Dengan demikian seolah-olah tepat atau tidaknya putusan Hakim akan berpengaruh

terhadap tercapainya tujuan peradilan anak.

Untuk alternatif pertama, yaitu anak dikembalikan kepada orangtua/wali, hampir tidak banyak menimbulkan permasalahan bagi Hakim maupun lembaga lainnya, karena kelangsungan pendidikan dan bimbingan selanjutnya berada pada tanggungjawab orangtua/walinya. Demikian juga bagi Jaksa sebagai pelaksana putusan Hakim, setelah tugas melaksanakan putusan Hakim yaitu mengembalikan anak kepada orangtua/walinya dilakukan, maka selesailah tugasnya. Masalah akan timbul apabila terdakwaanya adalah anak gelandangan atau anak yang tidak diketahui pasti alamat orangtua atau keluarganya. Menghadapi kasus yang demikian, anak diserahkan pada pihak keluarga yang mau menerima; atau apabila tetap tidak ada pihak keluarganya, maka diserahkan pada kemauan si anak.

Menghadapi kasus yang demikian, yaitu diserahkan kepada kemauan si anak sendiri, dilihat dari sudut pandang pembinaan anak sudah barang tentu hal tersebut sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan diri anak yang bersangkutan. Tanpa pengawasan, didikan dan arahan dari orang yang lebih tua, anak menjadi semakin tidak jelas masa depannya. Bahkan banyak kemungkinan ia akan kembali seperti semula, yaitu melakukan kejahatan untuk mencari makan dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Permasalahan ini sebenarnya dapat dihindari apabila ada koordinasi yang baik, antara lembaga peradilan dengan lembaga sosial yang juga melibatkan kepedulian masyarakat. Selama ini koordinasi tersebut belum ada, sehingga masalah anak pelaku kejahatan semata-mata menjadi tanggung jawab lembaga peradilan.

Mengenai alternatif yang ke dua, yaitu anak diputus dijadikan anak negara dan tidak dijatuhi hukuman tetapi diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan anak negara, maka ada beberapa syarat yang ditentukan da dalam Pasal 45 dan 46 KUHP.

Pasal 45 KUHP mengatur bahwa anak yang salah dapat diserahkan kepada pemerintahan tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan itu merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakannya salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana.

Pasal 46 KUHP mengatur bahwa :

- (1) Jika Hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan anak negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara

lain; atau badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari; atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain, dalam ke dua hal diatas paling lama sampai umur delapan belas tahun.

(2) Peraturan untuk menjalankan ayat (1) ditetapkan dengan ordonansi.

Dengan adanya persyaratan sebagaimana dituangkan kedua pasal tersebut, berarti Hakim mempunyai kebebasan tersendiri untuk menentukan batas waktu berapa lama anak menjadi anak negara, asal tidak melebihi batas maksimumnya. Tempat menjalani putusan Hakim bagi anak negara dapat dilaksanakan pada tempat-tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah, PAN, atau tempat pembinaan anak yang diselenggarakan oleh swasta, yaitu Yayasan atau Badan Hukum lain. Bahkan pendidikan tersebut dapat juga dilakukan dengan cara lain, misalnya lewat perorangan.

Khusus penempatan anak yang tidak dipidana semacam itu dalam LPAN, sebenarnya menimbulkan stigma tersendiri bagi yang bersangkutan maupun keluarganya, karena bagi masyarakat umum setiap orang yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (termasuk juga LPAN) adalah orang jahat. Padahal sebenarnya anak yang berada di LPAN tersebut tidak selalu dijatuhi pidana penjara.

Apabila diambil alternatif yang ke tiga yaitu anak diputus pidana seperti biasa, maka putusannya berdasarkan Pasal 47 KUHP, sehingga pasal ini merupakan pedoman bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana anak yang telah diperiksanya.

Pasal 47 KUHP menegaskan sebagai berikut :

- (1) Jika Hakim menjatuhkan pidana, maka maksimal pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiganya.
- (2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3 tidak dapat dijatuhkan.

Harus diingat, bahwa Hakim di dalam menjatuhkan hukuman kepada anak yang bersalah bukan sebagai akibat dari kesalahan yang dibuatnya sehingga ia harus menebus dosanya, tetapi Hakim menjatuhkan suatu sanksi yang telah dipertimbangkan matang-matang, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh si anak, sebab Hakim harus mengetahui si anak yang melakukan kejahatan itu adalah bukan karena ia memiliki bakat jahat tetapi karena berada dalam keadaan yang tidak stabil. Sehingga Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap seorang anak, bukanlah berdasarkan atas jenis kejahatan atau kenakalan yang dilakukannya, tetapi atas dasar bahwa anak itu memerlukan sanksi tersebut

untuk memperbaiki dirinya⁹⁷⁾.

Dalam hal terdakwa diputus Hakim dengan pidana, maka mengenai penempatan terdakwa, di dalam putusan memang tidak disebutkan terdakwa harus ditempatkan di mana, tidak disebutkan harus di LPAN. Sehingga ada kemungkinan napi anak terdapat di LP dewasa. Mengenai penempatan anak di LP atau LPAN merupakan wewenang Jaksa sebagai eksekutor (Periksa Pasal 270 KUHP).

Kesalahan dalam penempatan anak di LP dewasa ini, sudah barang tentu membawa pengaruh pada perkembangan jiwa anak. Di dalam LP dewasa anak akan melihat hal-hal yang sebetulnya belum boleh dilihat seorang anak atau perbuatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukannya. Perilaku-perilaku napi dewasa secara tidak langsung akan menambah wawasan terhadap perkembangan jiwa dan perilaku anak. Pengaruh ini sudah barang tentu ada dua hal, yaitu pengaruh positif dan negatif. Akibat dari pengaruh negatif inilah yang harus dihindarkan dari anak-anak.

Kerugian lain bagi anak apabila ia ditempatkan di LP dewasa, adalah berhubungan dengan masalah pembinaan selama berada di LP. Anak akan sulit berkomunikasi, beradaptasi dan menerima pembinaan

⁹⁷⁾Loebby Lugman: Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang 3-15 Desember 1995, halaman :1.

dari petugas, yang diprogram untuk pelaku kejahatan dewasa, karena belum dewasa dan matangnya pikiran anak⁹⁸⁾.

Dari sisi kelembagaan, penempatan napi anak di LP dewasa, juga akan mempengaruhi jumlah napi anak di LPAN. Semakin sedikit jumlah napi yang tinggal di LPAN, semakin sedikit pula anggaran pembinaan yang diterima oleh LPAN. Masalah ini merupakan suatu hambatan tersendiri bagi usaha pembinaan napi anak. Sehubungan dengan hal itu, dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan LP dewasa untuk memantau dan meminta apabila ada napi anak yang ditempatkan di LP dewasa, agar diserahkan ke LPAN untuk dibina lebih

⁹⁸⁾Sehubungan dengan pemidanaan terhadap anak ini, **Sutherland**, dan **Cressay**, mengingatkan bahwa:

- semakin muda usia seseorang pada saat ia pertama kali dipidana, semakin besar kemungkinan untuk dipidana lagi (jadi semakin besar kemungkinan terjadinya pengulangan);
- semakin muda usia seseorang, akan semakin pendek jarak waktu pengulangan antara kejahatan yang pertama kali dilakukan dengan kejahatan berikutnya.

Lebih ekstrem lagi dinyatakan oleh **A.G. Soemantri**, dalam salah satu dalil yang dikemukakan pada waktu mempertahankan disertasinya, yaitu bahwa anak di bawah usia 10 tahun tidak semestinya diajukan ke pengadilan.

Barda Nawawi Arief : Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan. Desertasi Doktor dalam Ilmu Hukum, *unpunished*, Tahun 1989, halaman : 272.

lanjut⁹⁹⁾.

Adanya batas umur delapan belas tahun, berdasarkan pada anggapan bahwa pada umur tersebut anak sudah dewasa, sehingga apabila sudah melebihi umur delapan belas tahun anak terpidana dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa. Dengan bekal pendidikan yang didapat selama dalam LPAN diharapkan sudah dapat menjadi bekal hidup dalam masyarakat. Selain itu pada umur delapan belas tahun dianggap anak sudah dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. Apabila putusan Hakim melebihi sampai dengan anak di atas umur delapan belas tahun, maka setelah anak berumur delapan belas tahun dipindah ke lembaga pemasyarakatan dewasa sampai masa pendidikannya selesai.

Dari gambaran di atas tampaklah bahwa masing-masing lembaga (dalam hal ini Hakim-pengadilan) yang terkait dalam persidangan anak mengutamakan kepentingan lembaganya sendiri yang merupakan sub sistem dari sistem yang lebih besar. Bagi Hakim sejauh ia sudah menjalankan pemeriksaan dan putusan perkara, maka hal itu dipandang sudah

⁹⁹⁾Informasi lebih lanjut menyatakan bahwa untuk memperoleh napi dari LP dewasa, sering kali dikeluarkan sejumlah biaya untuk pengganti biaya pembinaan napi anak tsb. selama berada di LP dewasa.

memenuhi tujuan dari lembaganya, yaitu lembaga Pengadilan. Padahal sebenarnya masih ada kepentingan lain yang harus mereka perhatikan, yaitu kepentingan dari sistem peradilan pidana, khususnya peradilan anak.

Disadari atau tidak Hakim mempunyai andil yang besar dalam mengantarkan seorang anak ke dalam kehidupan baru dalam Lembaga Pemasyarakatan, apabila Hakim memutus perkara semata-mata melihat pada jenis kejahatan yang dilakukan tanpa memperhatikan benar siapa pelakunya. Bagaimanapun Hakim sebelum memutus perkara perlu memperhatikan dengan penuh bijaksana apa dan bagaimana akibat dari keputusannya terhadap pelaku kejahatan anak. Hakim harus melihat lebih jauh ke depan tujuan pemberian putusan, karena yang dihadapi adalah anak-anak yang masih mempunyai masa depan yang panjang dan sering belum dapat bertanggung jawab penuh atas tindakannya.

4. PERANAN BISPA DI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK

a. GAMBARAN UMUM TUGAS DAN FUNGSI BISPA

Balai Bispa (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehakiman RI di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Ada dua tugas utama yang disandang oleh Bispa, yaitu tugas bimbingan kemasyarakatan dan tugas pengentasan anak. Bimbingan kemasyarakatan adalah pemberian bantuan oleh Pembimbing kemasyarakatan terhadap para kliennya dengan jalan memberi pengetahuan melalui latihan-latihan ketrampilan, pengenalan dan pengamalan tentang norma tertib hukum dalam masyarakat agar mereka bisa menentukan pilihan dalam masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sementara itu tugas pengentasan anak adalah tugas untuk memindahkan diri si anak dari tempat yang tidak baik ke tempat yang memenuhi kebutuhan perkembangan anak baik jasmani (makan, pakaian, tempat tinggal) maupun kebutuhan rohani (kasih sayang orang tua, rasa aman adanya perlindungan dan keadaan yang memungkinkan tumbuhnya rasa kenyamanan pada dirinya).

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor J.S.4/12/20 Tahun 1976. Pasal 22, tanggal 29

Desember 1976, Balai Bispa mempunyai fungsi, yaitu ;
Melaksanakan Penelitian kemasyarakatan untuk
peradilan.

1. Melaksanakan registrasi Anak Didik/Narapidana di
luar lembaga .
2. Melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan.
3. Melaksanakan Penyelenggaraan Tuntunan Kerja Anak
Didik / Di Luar lembaga.
4. Melaksanakan Pengentasan Anak.
5. Menyelenggarakan Pengelolaan dan urusan Tata
Usaha Balai Bispa.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral
Pemasyarakatan nomor : DDP.2/1/3 tanggal 13 Juni
1977, tugas-tugas balai Bispa meliputi :

1. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan.
2. Menyelenggarakan persidangan dengan pihak lain.
3. Menyelenggarakan Pembinaan Narapidana dan Anak
Didik di luar lembaga pemasyarakatan.
4. Menyelenggarakan Laporan dan Dokumentasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman
R.I. No. Y.S.4/12/20 Tahun 1976, Balai Bispa
digolongkan meenjadi tiga Klas, yaitu :

1. Balai Bispa Klas I
2. Balai Bispa Klas II
3. Balai Bispa Klas III

Wilayah kerja Balai Bispa Klas I Yogyakarta
meliputi : empat Kabupaten, yaitu : Kabupaten Dati

II Bantul, Kabupaten Dati II Kulon Progo, Kabupaten Dati II Sleman, dan Kodya Yogyakarta, serta Dati II Gunungkidul.

Bispa melalui Seksi Bimbingan Narapidana, menjalankan fungsi sebagai lembaga yang melaksanakan **Litmas**, (penelitian masyarakat) untuk peradilan, Registrasi, perawatan, dan tuntunan kerja di luar lembaga bagi narapidana. Untuk itu seksi bimbingan narapidana mempunyai tugas :

1. Melakukan litmas untuk sidang peradilan.
2. Melakukan registrasi narapidana di luar lembaga.
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan bagi narapidana.

Sebenarnya Bispa tidak hanya menjalankan fungsi sebagai litmas dalam perkara anak, namun sekaligus, pada kasus anak yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat, juga menjalankan fungsi penyuluhan rokhani, peningkatan pengetahuan, bimbingan asimilasi/lepas bersyarat bagi narapidana, penempatan pada panti asuhan/keluarga asuh, dan tuntunan kerja bagi anak didik.

Laporan Litmas berguna baik sebelum keputusan Hakim maupun sesudah putusan Hakim. Dalam hal sebelum keputusan Hakim diambil, laporan Litmas berguna bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, penasehat hukum dan Hakim) dan bagi klien atau

keluarganya. Disamping itu laporan Litmas juga masih diperlukan setelah adanya keputusan Hakim, yaitu untuk membantu usaha Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan. Dengan demikian dalam mengambil keputusan bahwa anak akan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan, harus dipikirkan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya kondisi Lembaga Pemasyarakatan untuk pembinaan anak. Sehingga secara sistematis ketelibatan Bispa di dalam perkara pidana anak sudah harus dimulai sejak pada pemeriksaan pendahuluan di tingkat kepolisian, dan terus berlanjut pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, bahkan sampai dengan pembinaan anak di LPAN. Kehadiran Bispa dalam proses peradilan anak didasarkan atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu baik oleh Polisi, Jaksa, Hakim maupun petugas LPAN. Dengan demikian, Bispa lebih bersifat pasif, dalam arti baru bergerak apabila ada permintaan. Sehingga apabila Hakim yang memeriksa meminta kepada Jaksa tentang laporann dari Bispa, baru kemudian Jaksa memberitahukan kepada Balai Bispa bahwa Hakim meminta laporan/membuthkan litmas tentang si anak. Dalam hal Hakim meminta laporan dari Balai Bispa, maka petugas Balai Bispa yang membuat laporan dapat hadir/tidak hadir di persidangan dalam kedudukan sebagai saksi. Apabila ada permintaan dari Hakim untuk hadir sebagai di persidangan, maka petugas

Bispa tersebut akan hadir. Tetapi apabila tidak ada permintaan dari Hakim untuk hadir, maka cukup laporan litmas dari Bispa diserahkan kepada Hakim yang menangani perkara pidana anak tersebut. Demikian pula halnya dengan kehadiran Bispa pada pemeriksaan pendahuluan oleh Polisi. Bispa aktif melakukan litmas apabila memang ada permintaan dari pihak kepolisian, yang pada kenyataannya ini jarang sekali dilakukan.

Informasi mengenai anak maupun latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak penting dalam praktik peradilan anak, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan Polisi maupun dalam pemberian putusan Hakim. Sehubungan dengan litmas oleh Bispa, maka data yang dikumpulkan oleh Bispa berisi hal-hal yang meliputi identitas anak, identitas orangtua/wali anak, masalah yang dialami oleh anak, riwayat hidup anak, pandangan masa depan anak, tanggapan anak terhadap masalah yang dialaminya, keadaan keluarga, keadaan lingkungan masyarakat, tanggapan pihak keluarga, pihak korban, pihak masyarakat dan pihak pemerintah setempat, serta kesimpulan dan saran dari Balai Bispa. Di dalam litmas tersebut juga diinformasikan mengenai sikap dan sifat anak tersebut dalam :

- a. Lingkungan di rumah, hubungan terhadap anggota keluarga seperti ayah, ibu dan saudara-

saudaranya.

- b. Lingkungan sekolah, hubungannya terhadap guru dan teman-temannya.
- c. Lingkungan di luar, seperti: rukun tetangga, kepramukaan dan lingkungan sosial lainnya.

b. KETERLIBATAN BISPA DALAM PERKARA PIDANA ANAK

Melihat demikian pentingnya pengetahuan penegak hukum mengenai latar belakang kehidupan anak yang terlibat dalam perkara pidana, seharusnya dalam setiap langkah pengambilan keputusan bagi anak tersebut melibatkan kehadiran Bispa sebagai lembaga pencari informasi latar belakang kehidupan anak. Pengambilan keputusan yang tidak disertai informasi yang jelas mengenai siapa dan bagaimana anak pelaku kejahatan, akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang cenderung kurang menguntungkan bagi masa depan anak tersebut.

Di dalam praktik proses peradilan pidana bagi anak, baik mulai dari pemeriksaan di kepolisian, pemeriksaan di pengadilan sampai dengan pengambilan vonis Hakim praktis tidak melibatkan Bispa untuk melakukan litmas. Berbeda halnya di LPAN, yang lebih banyak melibatkan Bispa dalam pembinaan terhadap napi anak, baik sejak mereka masuk ke LPAN maupun pada saat persiapan memasuki tahap asimilasi.

Bagi Polisi, litmas dapat dilakukan oleh

Polisi sendiri yaitu dengan jalan melakukan wawancara langsung terhadap tersangka anak. Ini bukan tanpa kelemahan, karena keterangan dari anak tersebut tidaklah selalu benar dan sangat tergantung dari kemampuan intelektual serta kejujuran anak itu sendiri, tanpa ada imbalan informasi dari pihak lain. Sementara bagi Hakim, keterangan yang ada di dalam berita acara dari Polisi dipandang sudah cukup memadai untuk mengetahui latar belakang si anak.

Ada kecenderungan untuk meninggalkan Bispa dalam penanganan perkara anak, baik oleh Polisi maupun oleh Hakim. Ada beberapa hal yang menjadi sebab timbulnya masalah tersebut.

Pertama, faktor perundang-undangan. Untuk menanggulangi pelanggaran hukum pendekatannya tidak cukup dari segi yuridis saja, tapi perlu pula dipertimbangkan segi non-yuridis, yaitu suatu informasi yang berisi tentang pengungkapan dan pemahaman latar belakang masalah, serta gambaran yang jelas tentang kehidupan klien serta lingkungannya yang disimpulkan dalam bentuk Laporan Penelitian kemasyarakatan (litmas).

Walaupun penggunaan litmas sangat diperlukan, tetapi belum ada sarana peraturan perundang-undangan yang dapat dipergunakan sebagai suatu landasan berpijak yang menetapkan agar laporan litmas tersebut wajib dibuat dan diperhatikan isinya.

Sebenarnya sudah ada surat dari Menteri Kehakiman, tetapi pada kenyataannya belum mampu mengikat aparat penegak hukum secara menyeluruh untuk melaksanakan kewajiban menyertakan litmas di dalam proses peradilan pidana anak, dikarenakan anjuran yang bersifat wajib tersebut tanpa disertai sanksi sebagai upaya pemaksaan di dalam pelaksanaannya.

Sifat dari aturannya sendiri, yang tidak memaksa. Maksudnya walaupun sudah ada kata-kata **wajib** tetapi apabila tidak dilaksanakan tidak ada akibat hukumnya. Sehingga hal ini yang kadang-kadang dikesampingkan oleh aparat penegak hukum di dalam proses peradilan pidana terhadap anak, tanpa menggunakan data litmas dari Bispa.

Sampai saat ini kewajiban untuk menyertakan hasil litmas dalam proses pemeriksaan perkara anak baru berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.06-01.06 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.03-UM.01.06 tahun 1991 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang. Ditegaskan dalam S.K. tersebut hal sebagai berikut :

Untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak, **Hakim wajib**, menugaskan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan anak tersebut kepada :

a. Bispa di wilayah hukum Pengadilan negeri yang menyidangkan anak tersebut; atau

b. Apabila di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang menyangkut anak tersebut tidak terdapat Bispa, maka Hakim dapat menugaskan kepada pembimbing kemasyarakatan Bispa terdekat atau Lembaga Pemasyarakatan setempat.

Dengan dasar hukum yang demikian, wajar kiranya apabila pihak kepolisian merasa tidak terikat pada peraturan tersebut, karena aturan itu dikeluarkan oleh menteri kehakiman yang menugaskan Bispa membuat litmas. Sementara bagi hakim itu sendiri aturan tersebut tidak mempunyai pengaruh apapun, tidak ada sanksinya apabila tidak dipenuhi. Bagi Bispa sebagai lembaga yang bersifat pasif, yaitu baru melakukan litmas apabila ada pihak lain yang memintanya, aturan tersebut juga tidak mempunyai arti penting, sekedar sebagai memperkuat kedudukan Bispa.

Kewajiban untuk melengkapi dengan laporan litmas dari Bispa, tidak ada aturannya dalam lembaga kepolisian, sehingga bagi Polisi hal ini lebih menguntungkan karena alasan efisiensi. Dari pihak Polisi sendiri menganggap apabila data yang diperoleh dari si anak sudah cukup, maka mereka pun tidak akan meminta litmas pada Bispa.

Kedua, faktor tenaga kerja (Personal). Untuk memperoleh data litmas yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan keuletan serta

dedikasi yang kuat dari para petugas. Untuk diperlukan suatu ketrampilan serta adanya minat/daya tarik dari para petugas guna mencapai tujuan yang dibebankan kepadanya.

Pada kenyataan untuk mendapatkan tenaga yang benar-benar siap untuk melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan waktu yang lama (antara 2 sampai dengan 3 tahun) sejak saat petugas diterima di Balai Bispa. Sedangkan petugas yang dirasakan belum memadai untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Petugas Bispa memperoleh ketrampilan berdasarkan kebiasaan dan pengalaman selama menghadapi perkara pidana anak yang masuk. Tidak berdasarkan suatu pendidikan khususnya yang harus ditempuh dalam kurun waktu tertentu. Sebenarnya ada pendidikan/kursus Bispa yang harus ditempuh oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan selama 6 bulan, tetapi hal ini masih dirasakan kurang memadai.

Ketiga, Faktor kesejahteraan pegawai. Faktor kesejahteraan pegawai merupakan salah satu unsur yang dapat memperkuat dedikasi dan minat kerja tersebut di atas, maka selain gaji yang diterima setiap bulan, diperlukan pemikiran intensif bagi seorang pembimbing kemasyarakatan apabila ia melaksanakan tugas membuat laporan litmas.

Keempat, Faktor Sarana Fisik dan Biaya. Pengumpulan informasi dari berbagai pihak dalam

rangka menyusun suatu laporan litmas diperlukan mobilitas kerja yang efisien dan tepat, terutama bila muncul kemungkinan-kemungkinan timbulnya masalah baru. Dengan keadaan seperti ini, tanpa didukung sarana fisik yang memadai dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan.

Kelima, dilihat dari efisiensi waktu, jelas keterlibatan Bispa akan memperpanjang waktu pemeriksaan, karena banyaknya tahap yang harus dilalui dalam melaksanakan litmas. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut :

1. Tahap Pengumpulan data

Tahap ini merupakan langkah awal dalam proses mendiagnose masalah yang dihadapi klien sehubungan dengan statusnya sebagai klien yang menjadi beban tugas Balai Bispa. Data yang digali ialah hal-hal yang berhubungan dengan :

- a. diri pribadi klien, meliputi identitas klien tersebut, serta hal lain-lain yang berhubungan dengan diri pribadi klien.
- b. keluarga, data yang digali disini mencakup identitas keluarga, struktur keluarga, hubungan keluarga. Pendataan tentang keluarga ini penting dilakukan karena masalah yang dihadapi klien juga merupakan bagian dari masalah keluarga. Jaringan keluarga dan komunikasi keluarga menjadi terganggu dan

dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

c. lingkungan masyarakat, klien sebagai anggota masyarakat yang secara langsung terlibat di dalam proses interaksi dengan warga masyarakat lainnya. Dalam hal ini data yang diperoleh adalah hubungan antara klien dengan lingkungan masyarakat di tempat klien tinggal, maupun melakukan kegiatan pendidikan dan sosial.

2. Tahapan Pengolahan Data

Langkah selanjutnya adalah mengolah data yang telah diperoleh, yaitu dengan memilah-milah masalah pokok yang dihadapi anak sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari masalah anak. Tindak pidana yang dilakukan adalah akibat dari suatu sebab-sebab tertentu. Akibat dari perbuatan tersebut tidak saja mengakibatkan dirinya menjadi klien akan tetapi berpengaruh pula terhadap sistem di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

Faktor-faktor penyebab/latar belakang dan motivasi yang mendorong klien sehingga bertingkah laku menyimpang, secara garis besarnya dapat digambarkan secara global yaitu faktor yang berasal dari diri klien (insight)/intern yaitu kekurangmampuannya untuk mempertahankan nilai positif yang dianut dirinya dan oleh masyarakat (iman dan taqwa). Kemungkinan lain berpangkal

dari faktor-faktor psikologi misalnya adanya kelainan dari organ sehingga berpengaruh terhadap intelegensinya.

Faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat berpengaruh pula terhadap timbulnya masalah yang dihadapi klien. Kondisi dan situasi keluarga yang tidak mendukung diri klien untuk bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Melihat demikian banyak dan kompleknya hal yang harus diteliti oleh Bispa, maka wajar kiranya di dalam tahap ini diperlukan kecermatan yang mendalam dan memerlukan bantuan dari berbagai disiplin ilmu dan norma-norma masyarakat. Kekeliruan dalam menganalisa data akan berakibat fatal di dalam membina klien sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu demi kepentingan anak.

Dilihat dari berbagai tahap dan demikian banyaknya hal yang harus diteliti, sudah barang tentu memakan waktu untuk melakukan litmas. Waktu ini akan menjadi lebih lama apabila Bispa harus menelusuri keluarga klien yang berada di tempat yang relatif jauh dari tempat klien anak disidik atau diperiksa. Bagi Polisi semakin lama waktu pencarian data untuk litmas berarti semakin lama pula waktu pemeriksaan terhadap anak, padahal Polisi tidak hanya menangani satu kasus tersebut. Demikian pula

lembaga konsultasi, yang baru bekerja apabila ada lembaga lain yang meminta jasanya. Sementara bagi klien atau keluarga klien juga tidak banyak mengerti akan kegunaan dan manfaat Balai Bispas dalam penanganan perkara pidana anak.

5. BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN ANAK

a. PERLUNYA BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK

Menurut Chan, dan Hoo, bantuan hukum merupakan suatu kebutuhan sosial, sehingga menjadi tanggung jawab masyarakat maupun warga-warganya. Bantuan hukum tersebut mungkin diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh individu-individu; disamping itu masih ada kategori lain, yakni bantuan hukum yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang disebut mereka suatu "...*quasi government organisation*"¹⁰⁰⁾.

Perlunya bantuan hukum dalam setiap proses peradilan pidana bukan sekedar di depan pengadilan, tetapi sudah harus dilakukan sejak pemeriksaan di tingkat kepolisian. Di dalam Pasal 35 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa "setiap orang yang tersangkut

¹⁰⁰⁾ Soerjono Soekanto: Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, halaman : 16.

perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Di dalam perumusan yang demikian singkat tersebut terkandung suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara hukum memperoleh suatu hak untuk memperoleh bantuan hukum¹⁰¹⁾. Hal ini dianggap perlu karena orang yang demikian itu wajib diberi perlindungan yang sewajarnya. Pemberian bantuan hukum adalah bentuk nyata dari asas praduga tidak bersalah, yang memandang setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, sehubungan dengan kehadiran Penasehat Hukum dalam setiap pemeriksaan perkara pidana, yaitu **pertama**, bahwa adanya bantuan hukum merupakan syarat pokok bagi terselenggarakannya peradilan yang baik. Artinya, agar fungsi peradilan berjalan baik dan mempunyai integritas, maka harus ada bantuan hukum. **Kedua**, perikemanusiaan menuntut adanya program

¹⁰¹⁾ Secara sederhana yang dimaksud dengan pengertian Bantuan Hukum adalah peembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang Penasehat Hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan. Sehingga bantuan hukum diberikan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, khususnya bagi mereka yang tidak/kurang mampu.

bantuan hukum¹⁰²⁾. Kehadiran bantuan hukum di dalam setiap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana merupakan suatu bantuan yang sangat besar artinya bagi klien, karena membantu untuk memahami dakwaan, tuntutan dan keputusan hukum yang memang sulit dipahami oleh orang awam. Begitu seorang pelaku kejahatan ditangkap Polisi maka sebenarnya sejak saat itu mereka sudah harus diberitahu haknya untuk didampingi Penasehat Hukum¹⁰³⁾. Apabila pelaku adalah orang yang tidak mampu, kepadanya diberikan Penasehat Hukum secara cuma-cuma yang didatangkan oleh Polisi, kejaksaan atau pengadilan.

Menurut **Cappeletti**, dan **Gordley**, pada dasarnya terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yaitu model **yuridis-individual**, dan model **kesejahteraan**, artinya, di satu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka

¹⁰²⁾ Soerjono Soekanto : *I b i d.* halaman : 14.

¹⁰³⁾ Di Amerika Serikat dikenal **Miranda Rule**, yaitu suatu aturan yang mewajibkan seorang Polisi untuk secepatnya memberitahukan hak tersangka untuk didampingi Penasehat Hukum begitu mereka tertangkap. Di samping itu juga ada keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang sangat dikenal yang dikenal dengan ***Gideon vs Wainright Case***, yang menetapkan bahwa negara harus menyediakan Penasehat Hukum bagi pelaku kejahatan yang tidak mampu untuk membayar jasa Penasehat Hukum.

perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan¹⁰⁴⁾.

Model yuridis-individual permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan hukum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya. Warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum menemui Penasehat Hukum, dan Penasehat Hukum akan memperoleh imbalan atau jasa-jasa yang diberikannya dari negara. Pada model bantuan hukum ini prosesnya tergantung calon-calon klien maupun keahlian yang ada pada para Penasehat Hukum.

Model kesejahteraan memandang bantuan hukum sebagai bagian dari bantuan sosial yaitu untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan. Pada model ini dituntut campur tangan yang intensif dari negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga masyarakat, menimbulkan hak-hak tertentu, di mana bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa kehadiran bantuan hukum di dalam proses peradilan pidana bukanlah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan pidana itu sendiri. Bahkan pemberian bantuan hukum oleh Penasehat Hukum

¹⁰⁴⁾ Soerjono Soekanto, *I b i d*, halaman : 12.

merupakan bagian dari terwujudnya kesejahteraan sosial.

Sebagaimana halnya dalam perkara pidana lainnya, dalam perkara pidana anak kehadiran bantuan hukum sangat diperlukan bahkan dapat dikatakan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Sesuai dengan hakikat dan sifatnya sebagai anak, yang belum dewasa dalam perkara dan belum dapat berpikir secara jernih bahkan seringkali juga tidak tahu persis apa yang dilakukannya, anak yang terlibat dalam perkara pidana sudah barang tentu memerlukan uluran tangan dari lembaga bantuan hukum.

Bantuan hukum bagi anak-anak akan memberikan banyak manfaat, anak merasa aman dan terlindungi dalam menghadapi aparat penegak, di samping hak-hak anak menjadi lebih menjamin untuk dihormati.

Meskipun demikian, seperti dikemukakan **Adnan Buyung Nasution**, bahwa di dalam praktek sehari-hari sampai saat ini, hak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum itu belum dapat berjalan lancar, oleh karena pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan umumnya masih menolak memberikan kesempatan tersebut. Alasan utama yang diberikan adalah karena sampai sekarang belum ada peraturan-peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut tentang cara-

cara pelaksanaan hak bantuan hukum yang diberikan oleh undang-undang tersebut¹⁰⁵⁾.

b. BANTUAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Seorang anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum. Hal ini sesuai dengan Kep.Men.Keh No.M.02.UM.09.08. tahun 1980 (Bantuan Hukum); KUHP Pasal 56, 69, 71, 114, dan pasal 35, 36, dan 37 UU No. 14 / 1970, serta RUU Peradilan Anak Pasal 51 dan Pasal 52.

Bantuan Hukum Khusus untuk anak terdapat di kota Medan, yang memberi bantuan hukum bagi anak secara cuma-cuma dengan nama *Lembaga Advokasi Anak*. Sedangkan di Jakarta oleh FKPPPI dan Prayuna telah disediakan juga bantuan hukum khusus untuk anak.

Sistem Hukum Acara kita yang tidak mewajibkan seseorang harus didampingi oleh Penasehat Hukum atau diberikan bantuan hukum kecuali bagi tindak pidana yang diancam hukuman mati atau 15 tahun atau lebih atau diancam pidana 5 tahun lebih bagi yang tidak mampu menghadirkan Penasehat Hukum. Ada perkecualiannya yaitu bantuan hukum diberikan kepada tertuduh tidak/kurang mampu yang diancam dengan pidana kurang dari 5 tahun tetapi perkara tersebut

¹⁰⁵⁾ *I b i d*

menarik perhatian. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, ada suatu kesulitan tersendiri dalam menentukan ukuran untuk mengatakan suatu perkara menarik perhatian.¹⁰⁶⁾ Sehingga dalam hal ini tergantung pada penegak hukum yang menangani perkara tersebut (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk menentukan suatu perkara perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum atau tidak. Melihat aturan tersebut nampak, bahwa orientasi pembuat peraturan sendiri masih berpijak pada perkara atau kejahatan yang dilakukan bukan pada obyek pelaku. Sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan bagi pelaku kejahatan di dalam proses peradilan pidana baik itu pelaku dewasa atau pelaku anak-anak, sebab titik beratnya adalah pada perkara yang menarik perhatian.

Pada hakekatnya memang terhadap anak yang perbuatannya diancam dengan pidana di atas 5 tahun

¹⁰⁶⁾ Akhir-akhir ini ada suatu kecenderungan di dalam masyarakat, perkara pidana yang pelakunya anak-anak menjadi perkara yang menarik dan dalam penanganannya banyak menimbulkan pro dan kontra. Ini disebabkan peran serta media massa dalam mengungkapkan penanganan aparat penegak hukum yang cenderung menyimpang. Ada dua konsekuensi dari pemberitaan pers tersebut. **Pertama** dapat dikatakan berakibat positif, yaitu timbul banyak simpati terhadap pelaku kejahatan anak tersebut. Simpati itu antara lain dalam bentuk bantuan hukum, di mana Penasehat Hukum dengan suka rela mendampingi anak dalam proses peradilan pidana, sekalipun pihak anak tidak memintanya. **Kedua**, dengan dieksposnya kasus anak secara luas dan terbuka, sebenarnya asas praduga tidak bersalah bagi anak telah terlanggar dan tanpa disadari sebenarnya inilah awal dari terbentuknya stigma buruk bagi anak tersebut.

yang didampingi Penasehat Hukum, sedangkan bagi anak-anak yang perbuatannya diancam dengan pidana di bawah 5 tahun tidak didampingi oleh penasehat Hukum.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian tentang bantuan hukum terhadap anak di dalam proses peradilan pidana, yaitu :

1. Belum adanya peraturan yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum khusus untuk anak-anak.
2. Hingga kini baru ada tiga lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma, yaitu Lembaga Advokasi Anak berkedudukan di Medan dan Lembaga Bantuan Hukum untuk Anak oleh FKPPI dan Prayuna.
3. Pemikiran bahwa pemberian bantuan hukum khusus untuk anak dipandang dari segi ekonomi dianggap tidak mendatangkan keuntungan.

Seorang anak yang harus menghadapi proses peradilan pidana sangat memerlukan bantuan baik moril maupun materiil. Secara moril bantuan tersebut dalam bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh seorang Penasehat Hukum. Dengan adanya pendamping baik dari orang tua atau Penasehat Hukum kedudukan anak menjadi lebih siap menghadapi proses peradilan pidana. Menghadapi suasana baru, orang-orang asing, ini membutuhkan kekuatan tersendiri. Apalagi yang dihadapi adalah orang-orang yang cara mengajukan pertanyaan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan disertai dengan kekerasan atau dengan cara seperti menginterogasi, tidak dalam suasana

kekeluargaan. Hal ini akan semakin membuat beban tersendiri, belum lagi stigma yang diberikan kepadanya baik terbukti atau tidak kejahatan yang didakwakan kepadanya. Disini peranan orang tua dan Penasehat Hukum untuk mendampingi anak didalam proses peradilan pidana.

Seorang Penasehat Hukum diharapkan akan membantu anak dalam memahami proses yang harus dijalani anak, memahami bahasa yang diajukan oleh para penegak hukum, memberikan rasa percaya diri yang akan memperlancar proses tersebut, sehingga tidak akan berbelit-belit dalam memberikan keterangan yang akan semakin menyulitkan kedudukan dirinya. Hanya saja hal ini belum disadari betul peranan seorang Penasehat Hukum di dalam proses peradilan terhadap anak. Ada kecenderungan seorang anak yang menghadapi proses peradilan pidana tanpa di dampingi Penasehat Hukum maupun orang tua.

1) BANTUAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN

Di tingkat Kepolisian pemeriksaan terhadap anak yang terlibat tindak pidana tidak selalu di dampingi oleh Penasehat Hukum. Hal ini terjadi antara lain karena pihak kepolisian lebih menitikberatkan pada jenis perkaranya, buka kepada pelaku dalam perkara tersebut. Sehingga apabila

tindak pidana yang dilakukan diancam pidana di atas lima tahun baru kepada tersangka (baik dewasa maupun anak) diberitahu haknya untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum. Akan tetapi apabila tindak pidana yang dilakukan diancam pidana dibawah lima tahun, maka terhadap anak tidak diberitahu tentang haknya untuk didampingi oleh seorang Penasehat Hukum.

Dengan melihat tindak pidana yang dilakukan tanpa memperhatikan subyek pelaku yaitu anak, hal ini akan merugikan kepentingan si anak, dikarenakan sebenarnya hak untuk di dampingi oleh seorang Penasehat Hukum adalah hak anak di dalam proses peradilan pidana tanpa melihat tindak pidana yang dilakukan. Sehingga setiap anak yang harus menghadapi proses peradilan pidana berhak di dampingi oleh seorang Penasehat Hukum.

Peranan seorang Penasehat Hukum di dalam proses peradilan pidana terhadap anak sangat penting, dikarenakan sebagai orang ketiga Penasehat Hukum dapat berfungsi sebagai perantara antara pihak kepolisian dengan anak. Apalagi apabila si anak tidak di dampingi oleh orang tuanya, maka peranan Penasehat Hukum ini dapat melakukan pendekatan terhadap anak agar anak tidak merasa seorang diri menghadapi pemeriksaan baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Penasehat Hukum dapat memberikan penjelasan apa yang harus dilakukan

dalam menghadapi proses peradilan pidana tersebut.

Dengan adanya Penasehat Hukum yang mendampingi anak di dalam proses peradilan pidana, maka diharapkan anak mendapat perlakuan yang sebaik-baiknya dari kepolisian selama proses pemeriksaan.

2) BANTUAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PEMERIKSAAN DI KEJAKSAAN

Pemeriksaan di tingkat kejaksaan memang tidak serumit pemeriksaan di tingkat kepolisian, dikarenakan Kejaksaan hanya memeriksa kelengkapan berita acara yang dikirim oleh Polisi serta unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. Sehingga apabila salah satu tidak dipenuhi, maka akan dikembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi. Maka peranan Penasehat Hukum pada tingkat pemeriksaan di kejaksaan praktis tidak ada.

3) BANTUAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

Kehadiran Penasehat Hukum di dalam Pemeriksaan dan pemberian putusan Hakim terhadap anak di tingkat pengadilan juga tergantung pada tindak pidana yang dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana di atas lima tahun maka anak yang bersangkutan diberitahukan haknya untuk didampingi oleh seorang Penasehat Hukum.

Kehadiran Penasehat Hukum di dalam proses peradilan pidana terhadap anak tergantung pada masing-masing penegak hukum, karena dari pihak anak tidak mengetahui tentang haknya untuk di dampingi oleh seorang Penasehat Hukum. Kecuali apabila perkaranya diancam dengan pidana di atas 5 tahun maka anak diberitahu haknya untuk di dampingi Penasehat Hukum, apabila anak/keluarganya tidak mampu menyediakan maka negara/pengadilan akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi anak di sidang pengadilan tersebut.

Dengan demikian selama belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang bantuan hukum terhadap anak di dalam proses peradilan pidana, maka tidak dapat diharapkan seorang anak akan memperoleh haknya tanpa adanya perbedaan tentang perkara yang dilakukan apakah para penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang menghadapi proses peradilan pidana.

Mengenai pola kerja apabila terhadap anak diberikan bantuan-bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data mengenai kasus yang sedang dihadapi. Pengumpulan data ini tidak terbatas pada mewawancarai klien-klien yang bersangkutan tetapi bila perlu sampai mencari alat-alat pembuktian dan menghubungi instansi-instansi tertentu.
2. Pengolahan data yang terdiri dari penarikan / penentuan masalah pokok dari kasus yang bersangkutan, penggolongan masalah-masalah tadi

serta penentuan rencana pemecahannya.

3. Kegiatan selanjutnya ditujukan pada penanganan perkaranya itu sendiri di sidang pengadilan.

Pada kenyataannya anak-anak yang melakukan tindak pidana di dalam proses peradilan pidana tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Anak berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga menyerahkan semua masalah pada Polisi tanpa tahu yang harus dilakukan dan tidak tahu tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum.
2. Anak berstatus gelandangan, sehingga tidak ada pihak keluarga yang mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung dan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dikarenakan dari pihak aparat penegak hukum sendiri tidak memberitahu hak tersebut. Dengan demikian anak mempersiapkan dirinya sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sampai ke sidang pengadilan dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan / LPAN.
3. Anak berasal dari keluarga yang mampu, tetapi pihak keluarga tidak mau ikut bertanggungjawab terhadap perbuatannya sehingga menyerahkan pada pihak penegak hukum untuk diproses. Akibatnya anak menghadapi sendiri penegak hukum didalam proses peradilan pidana tersebut tanpa didampingi pihak keluarga maupun Penasehat Hukum.
4. Tanpa adanya pendamping dari pihak keluarga maupun Penasehat Hukum, anak tidak tahu tentang upaya hukum lain yang dapat diberikan kepadanya, seperti misalnya upaya di luar pengadilan sehingga anak tidak perlu diproses melalui sidang pengadilan. Hal ini akan menguntungkan perkembangan jiwa dan mental anak, karena akan tidak melalui proses peradilan pidana.
5. Anak tidak di dampingi Penasehat Hukum dikarenakan tidak tahu tentang hak tersebut sedangkan aparat penegak hukum yang menangani perkaranya tidak memberitahu haknya, karena berpijak pada tindak pidana yang dilakukan, yaitu apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih maka kepada anak diberitahu tentang haknya untuk di dampingi oleh

Penasehat Hukum dan apabila tidak mampu maka akan ditunjuk oleh negara. Tetapi apabila tidak mampu maka akan ditunjuk oleh negara. Tetapi apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, maka anak tidak diberitahu (tidak berhak) untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

Kehadiran Penasihat Hukum di depan sidang peradilan anak, baik mulai dari pemeriksaan oleh Polisi sampai dengan sidang pengadilan oleh Hakim, bukan saja menghilangkan hak anak untuk didampingi Penasihat Hukum selama persidangan peradilan anak, tetapi juga menjadi sebab terjadinya sebab terjadinya kesalahan penahanan dan pengadilan anak. Menurut Penasihat Hukum hal ini diakibatkan beberapa hal. Pertama, belum terbitnya UU Peradilan yang menyangkut anak-anak dibawah umur. Kedua, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak jauh lebih sedikit daripada yang dilakukan oleh orang dewasa. Sehingga pemahaman hukum para Penyidik, Jaksa maupun Hakim di pengadilan tidak seluas pengetahuan mereka soal perbuatan orang dewasa¹⁰⁷⁾.

Dalam proses peradilan anak, sebenarnya kurang mampuan anak dalam menghadapi persidangan dapat sedikit teratasi dengan hadirnya Penasehat

107) Ini dikemukakan oleh Penasehat Hukum Senior: Victor D. Sibarani dan Amir Syamsudin, dalam : **Soal Peradilan Anak Di Bawah Umur : Diperlukan Lembaga Pembinaan Anak**, dimuat dalam Tabloit Mingguan Swadesi, Edisi No. 1047 Tahun XXVII, 1 Agustus - 7 Agustus 1995, halaman : 15.

Hukum yang akan menjembatani kepentingan penegak hukum dan anak. Namun karena kurangnya koordinasi yang baik antara Polisi atau Hakim dengan Penasehat Hukum, maka anak tetap saja diproses sekalipun tanpa kehadiran Penasehat Hukum. Dengan akibat anak kurang memperoleh perlakuan dan perlindungan terhadap hak-haknya. Anak menerima saja apa yang didakwakan dan diputus oleh Polisi, Jaksa dan Hakim tanpa adanya upaya hukum yang memadai untuk itu.

Bagaimana Penasehat Hukum baru dapat bertindak manakala ada permintaan, baik oleh pelaku, keluarga atau aparat penegak hukum lainnya, untuk mendampingi anak di depan sidang peradilan. Tanpa ada permintaan atau konsultasi dari pihak-pihak tersebut, Penasehat Hukum sulit mencari informasi mengenai adanya kasus kejahatan oleh anak yang memerlukan jasanya. Karena tidak semua perkara anak muncul ke permukaan yang dapat diketahui oleh umum, tanpa adanya pemberitaan oleh media massa.

Jadi dengan kata lain, perkara yang menarik perhatian umum (melalui berita di media massa) cenderung lebih besar kemungkinannya untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hukum yang akan menjembatani kepentingan penegak hukum dan anak. Namun karena kurangnya koordinasi yang baik antara Polisi atau Hakim dengan Penasehat Hukum, maka anak tetap saja diproses sekalipun tanpa kehadiran Penasehat Hukum. Dengan akibat anak kurang memperoleh perlakuan dan perlindungan terhadap hak-haknya. Anak menerima saja apa yang didakwakan dan diputus oleh Polisi, Jaksa dan Hakim tanpa adanya upaya hukum yang memadai untuk itu.

Bagaimana Penasehat Hukum baru dapat bertindak manakala ada permintaan, baik oleh pelaku, keluarga atau aparat penegak hukum lainnya, untuk mendampingi anak di depan sidang pengadilan. Tanpa ada permintaan atau konsultasi dari pihak-pihak tersebut, Penasehat Hukum sulit mencari informasi mengenai adanya kasus kejahatan oleh anak yang memerlukan jasanya. Karena tidak semua perkara anak muncul ke permukaan yang dapat diketahui oleh umum, tanpa adanya pemberitaan oleh media massa.

Jadi dengan kata lain, perkara yang menarik perhatian umum (melalui berita di media massa) cenderung lebih besar kemungkinannya untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum.

maupun tidak langsung dipengaruhi pula oleh tersedianya semua sarana dan prasarana perlindungan yang ada.

a. GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN

1) KONDISI BANGUNAN FISIK DAN FASILITAS YANG TERSEDIA

Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan merupakan peninggal Belanda, dibangun pada tahun 1875 dan baru sekali direnovasi (1982). Lembaga Pemasyarakatan ini terletak di pusat kota Yogyakarta yang masuk dalam wilayah Kotamadya Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga Pemasyarakatan yang semula merupakan Rumah Tahanan Negara ini berdiri di atas tanah seluas 6.195 km² (meliputi seluruh tanah dalam tembok keliling dan tanah sekitar tembok keliling), dengan ketebalan tembok 0,30 m.

Sarana fisik bangunan gedung yang digunakan adalah bekas Rutan dewasa. Kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan ini secara umum bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Rata-rata kondisi tembok blok hunian sudah tua, banyak rusak dan berwarna kusam, atap pada beberapa tempat mengalami kebocoran dan rapuh.

Lembaga Pemasyarakatan yang terletak di pinggir Jalan Tamansiswa Yogyakarta ini, bentuk bangunannya dilengkapi dengan tembok keliling

yang menggambarkan rumah tahanan (penjara). Bentuknya yang khas, mempertegas citra penjara, sehingga orang dengan mudah tahu (apalagi letaknya yang sangat strategis) bahwa bangunan tersebut adalah penjara. Pembagian ruangan dengan pintu dari jeruji besi yang tebal dan kuat, juga ditemui pada bangunan Lembaga Pemasyarakatan ini, suatu bentuk khas pula dari sebuah penjara. Hal ini sudah barang tentu akan mempengaruhi sosialisasi anak-anak ke dalam masyarakat, karena pada diri si anak sendiri sudah merasa berbeda karena keberadaan mereka yang berada di penjara. Sebaliknya masyarakatpun akan melihat mereka dari lingkungan yang berbeda, sehingga stigma itu seakan-akan melekat, walaupun mereka sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi yang demikian akan mempengaruhi perkembangan jiwa, mental dan kepribadian si anak, dan akan semakin mengukuhkan perasaan anak bahwa ia adalah bekas penjahat. Dengan demikian bisa diketahui bahwa suasana dan lingkungan tersebut tidak mendukung pembinaan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tujuannya adalah mengentaskan mereka menjadi "manusia baru" yang bisa diterima kembali oleh masyarakat.

Tujuan tersebut juga semakin jauh tercapai, melihat dari tersedianya fasilitas yang ada. Luas bangunan untuk kantor (seluruh bangunan untuk

melakukan kegiatan administrasi) dalam tembok adalah 95 m² sedangkan yang untuk bangunan hunian seluas 326 m². Ada 3 blok hunian, dengan jumlah kamar seluruhnya sebanyak 19 buah, yang mempunyai daya tampung sebanyak 116 sebanyak 116 orang.

Perbandingan antara luas bangunan dan luas tanah di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan tidak seimbang, karena luas tanah yang ada digunakan untuk taman pada bagian depan bangunan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan halaman di dalam bangunan Lembaga Pemasyarakatan di gunakan untuk tempat bermain badminton dan senam serta menjemur pakaian. Di samping itu di dalam halaman tersebut terdapat semacam pendopo untuk tempat menonton TV. Dengan pemanfaatan lahan yang demikian sempit dengan berbagai kegiatan tersebut, menjadikan tidak tersisa lahan tempat bermain olah raga yang lain, maupun untuk bercocok tanam, bertani dan berkebun. Hal ini sangat dirasakan oleh Anak-anak negara. Mereka menghendaki ada sarana bercocok tanam, bertani.

Keterbatasan fasilitas ini juga meliputi fasilitas ruangan, mulai dari pengadaan ruang tidur anak, ruang kesehatan, ruang ketrampilan untuk anak ruang perpustakaan dan ruang kerja pegawai.

Fasilitas tidur bagi anak hanya berupa tikar sebagai alas, diatas lantai tanpa dilengkapi dipan. Apabila penghuni cukup mampu, maka diperkenankan membawa kasur, bantal dan guling yang diletakkan di atas lantai juga. Selimut disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, demikian pula untuk baju seragam (hanya kemeja tanpa celana), handuk dan sabun, tanpa disertai sikat gigi dan obat gosok gigi. Setiap penghuni mempunyai "lemari" yang dibuat sendiri oleh penghuni dari bekas kota sabun untuk menyimpan barang-barang pribadi di dalam kamar.

Suasana di dalam kamar di Lembaga Pemasyarakatan terasa lembab. Bahkan salah satu sumur yang airnya digunakan untuk mandi ternyata dapat menimbulkan penyakit kulit (gatal-gatal). Keterbatasan dana menyebabkan para penghuni tidak mendapatkan sarana yang memadai untuk tidur, sehingga disini tidak mendapatkan perbedaan fasilitas yang di dapat berdasarkan kemampuan masing-masing anak (tingkat ekonomi keluarga masing-masing anak). Apabila si anak berasal dari keluarga yang mampu maka dia akan membawa kasur, bantal dan guling, maupun radio. Tetapi bagi yang tidak mampu tidak akan membawa perlengkapan tersebut. Hal ini jelas tidak sehat, baik secara fisik maupun psikhis. Secara fisik tidur tanpa

beralaskan apa-apa tidak baik bagi kesehatan (dapat mengakibatkan penyakit rematik, kelumpuhan). Secara psikhis antar anak akan merasa perbedaan tersebut, hal ini dapat menimbulkan rasa rendah diri yang dapat mempengaruhi perkembangan si anak.

Dengan penghuni sebanyak 38, blok hunian yang dipergunakan sebanyak 6 buah, dengan rata-rata penghuni sebanyak 7 orang. Untuk keperluan tidur, ruangan (blok hunian) di "kapling" seluas 200 x 70 cm untuk setiap penghuni. Kondisi kamar hunian belum sepenuhnya bisa menghindarkan penghuni dari serangan beberapa jenis serangga, misalnya nyamuk, lipas, dan kaki seribu (Jawa : kelabang).

Melihat kondisi kamar hunian anak-anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang demikian, maka dapat terjadi banyak kemungkinan yang dapat menimpa si anak pada saat tidur. Ruangan yang tidak sehat (didalam kamar ada WC), tembok yang tua, kusam, atap bocor.

Untuk keperluan MCK (mandi-cuci-kakus), fasilitas yang tersedia adalah sumur dengan air tanah yang terletak di luar blok hunian, serta WC yang terdapat pada setiap blok hunian (kamar). WC di dalam kamar tidak mempunyai pintu, hanya dipisahkan dengan kamar oleh tembok sekat

setinggi kira-kira 50 cm, sehingga apabila ada orang di dalam WC akan terlihat kepalanya oleh penghuni yang lain. Kondisi WC banyak yang macet (tersumbat) sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga tidak sehat bagi penghuni. Untuk pengadaan air di WC hanya tersedia panci, tanpa bak penampung air. Keperluan mandi di penuhi di sumur yang berada di luar kamar hunian, demikian pula untuk cuci pakaian. Penjemuran cucian dilakukan di halaman dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan, yang terlihat jelas ada waktu seseorang memasuki kantor Lembaga Pemasyarakatan.

Ruang kesehatan menempati salah satu ruang yang sebenarnya diperuntukkan tempat tidur anak (sel/tahanan), dengan fasilitas seadanya, yaitu satu buah tempat tidur dengan alas kasur, lemari kecil berisi obat-obatan yang sifatnya hanya pertolongan pertama pada kecelakaan. WC yang akan di dalam ruang itu, tidak dipergunakan dan disekat dengan kain putih.

Untuk kegiatan ketrampilan, juga menempati salah satu ruang yang seharusnya dipergunakan untuk ruang tidur anak. Fasilitas yang tersedia dalam bentuk alat pertukangan untuk kerajinan bambu dan alat-alat untuk kerajinan tangan menyulam. Demikian pula karena ketidakadaan ruang penyimpanan bahan baku latihan kerja (kayu,

bambu), maka dipergunakan pula blok hunian untuk tujuan tersebut.

Kondisi yang memprihatinkan ini juga terjadi pada bangunan kantor administrasi. Dengan jumlah karyawan sebanyak 80 orang, ruang yang tersedia tidak mencukupi untuk menampungnya. Untuk menutupi kekurangan ruang ini, dipergunakanlah beberapa blok hunian sebagai kantor dan mushola, cukup dengan sedikit modifikasi.

Pembagian dan penataan ruang terpaksa dilakukan sedemikian rupa sehingga penggunaan ruangan sangat terbatas, karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk pengadaan ruangan baru. Penataan ruang untuk kamar tidur anak-anak, ruang administrasi, ruang kesehatan, ruang ketrampilan berkesan seadanya, tanpa sarana dan prasarana yang memadai. Melihat kondisi yang demikian, maka dapat dibayangkan hasil yang akan dicapai.

2) SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERSEDIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIRUGUNAN

Jumlah pegawai yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan adalah : 80 orang (termasuk Kalapas dan staff Kalapas) dengan komposisi :

- | | |
|-----------------|------------|
| a. pria | : 65 orang |
| b. wanita | : 15 orang |
| c. KPLP/KPRUTAN | : 1 orang |

- Staf KPLP/KPRUTAN

(termasuk Kepala KPLP/KPRUTAN) : 3 orang

- Penjagaan : 35 orang

d. Administrasi Keamanan dan Tata

Tertib (Adkam) : 6 orang

e. Pembinaan : 9 orang

f. Kegiatan kerja : 6 orang

g. Pelayanan Tahanan : 13 orang

h. Tata Usaha/Pengelolaan : 9 orang

Latar belakang pendidikan pegawai adalah :

a. SD : 12 orang

b. SLTP : 3 orang

c. SLTA : 54 orang

d. Sarjana Muda : 2 orang

e. AKIP : 4 orang

f. Sarjana : 5 orang

Dari jumlah dan komposisi pegawai semacam itu, bisa dijelaskan lebih lanjut bahwa kondisi yang demikian dirasakan tidaklah ideal. Karena di dalamnya tidak terdapat tenaga ahli yang secara formal mempunyai bekal pendidikan sebagai pedagang ataupun psikolog dan juga tenaga ahli ketrampilan, maupun tenaga medis. Sehingga semua kegiatan yang berhubungan dengan masalah tersebut terpaksa tergantung pada tenaga ahli yang berasal dari luar Lembaga Pemasyarakatan. Sudah barang tentu ini menjadi suatu kendala tersendiri baik dalam

pencarian tenaga yang mau bekerja secara suka rela (karena keterbatasan dana Lembaga Pemasyarakatan), juga kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Dengan demikian agar kelihatan ada kegiatan, maka kegiatan pembinaan dilakukan secara apa adanya yang berkesan asal kegiatan tetap berlangsung.

Menarik untuk ditelaah lebih lanjut adanya sebagian besar dari jumlah pegawai (37%) adalah pegawai penjagaan. Ini menimbulkan kesan kuat bahwa orientasi Lembaga Pemasyarakatan adalah pengawasan terhadap penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Berarti ini tidak berbeda jauh dengan orientasi pengawasan dan pengamanan pada LP Dewasa. Kondisi ini tidak terlepas dari bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yang memang secara fisik dirancang sebagai tahanan yang membutuhkan banyak tenaga pengawas/penjagaan.

Bagi perkembangan jiwa anak, hal ini jelas tidak menguntungkan, karena anak merasa ia berada dalam suatu tempat yang tertutup, lepas dari masyarakat sekitarnya dan anak menjadi semakin rendah diri. Sekali lagi terjadi proses stigma terhadap anak, karena bagaimanapun dalam pandangan umum, adanya penjagaan dan pengawasan di suatu tempat tertutup, tidak lain adalah cinta dari penjara dan penjahat.

Dari gambaran umum mengenai kondisi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, ada beberapa hal menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Pertama, dengan kondisi bangunan seperti penjara, proses stigmatisasi anak menjadi semakin jelas. Bagaimanapun anak yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ini merasa asing dengan lingkungannya demikian pula ada kecenderungan masyarakat untuk menjauhi mereka. Hal ini setidaknya di Yogyakarta, yang melihat anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai penjahat kecil, yang bila nanti mereka dewasa akan berubah menjadi penjahat dewasa pula. Di samping itu juga ada keengganan untuk menampung anak eks Lembaga Pemasyarakatan untuk bekerja di tempat mereka.

Kedua, adanya keterbatasan dalam pengadaan fasilitas dan kondisi bangunan yang demikian memprihatinkan, membuat petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan tidak bisa secara optimal. Kondisi yang demikian semakin parah karena tidak didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang secara profesional seharusnya dipersiapkan untuk menangani anak-anak yang secara sosial mempunyai masalah.

3) PERLAKUAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Perlindungan hukum terhadap anak juga dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya-

upaya mengintegrasikan anak dengan masyarakat dan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan itu sesuai dengan sistem pembinaan yang dianut di Indonesia yaitu Sistem Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Sasaran pembinaan untuk perlindungan hukum terhadap anak adalah anak didik, yaitu anak yang telah melakukan tindak pidana, bertingkah laku merugikan atau berbahaya bagi orang lain yang oleh Hakim dijatuhi pidana/tindakan dan diserahkan kepada Pemerintah cq. Direktorat Jendral Pemasyarakatan untuk dilaksanakan keputusan tersebut.

Yang termasuk anak didik yang harus dibina adalah anak negara, anak sipil, dan narapidana anak yang berusia di bawah 21 tahun yang pembinaannya menjadi tanggungjawab Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman.

1. Anak Negara

Anak yang melakukan tindak pidana kemudian dalam sidang Peradilan diputus oleh hakim dengan dipidana.

2. Anak Sipil

Anak yang diputus oleh Haim diserahkan kepada Pemerintah menjadi anak sipil, atas permintaan orang tuanya karena sudah kewalahan mendidik dan membina anaknya yang nakal. Melalui sidang perdata.

3. Narapidana anak

Anak yang melakukan tindak pidana kemudian dalam sidang Peradilan diputus oleh Hakim dengan pidana

Dalam hal pembinaan khususnya di dalam lembaga pemasyarakatan harus dibedakan antara pembinaan terhadap narapidana dewasa dan anak. Karena anak dan orang dewasa berbeda baik secara fisik maupun mental seperti antara lain, fisik pada anak masih mengalami pertumbuhan sampai pada batas tertentu, sedangkan pada orang dewasa sudah menetap, artinya tidak mengalami pertumbuhan seperti pada masa anak.

Mengenai mental pada seorang anak, pada umumnya masih belum matang, belum banyak pengalaman dan sangat labil sehingga ia perlu bimbingan; sedangkan mental seorang yang sudah dewasa diharapkan sudah matang, bijaksana, dan mantap dalam mengambil keputusan, tahu apa yang harus dilakukan dan dicapainya karena ia telah banyak menimba pengalaman selama menjalani hidupnya.

Pembinaan merupakan upaya untuk menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan kepribadian yang seimbang, memiliki pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bakat, minat dan sebagai bekal untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah terca-

painya martabat dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yaitu :

1. PEMBINAAN KEPERIBADIAN YANG MELIPUTI:

a. Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilah dan sebagainya.

Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya.

Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal agar diupayakan cara belajar melalui program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

2. PEMBINAAN KEMANDIRIAN

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengelola rotan menjadi perabotan rumah tangga).
- c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
- d. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

- e. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor.

Pembinaan sebagai pelaksanaan tugas bimbingan kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (termasuk pula dalam Lembaga Pemasyarakatan) berdasarkan pola pembinaan narapidana dan tahanan (Kep.Men.Keh.RI.No.M.02.PK.04.10 th.1990) yang menetapkan sebagai berikut:

a. Pembinaan kesadaran beragama :

- Ceramah agama Islam : Hari Selasa, Jum'at dan Sabtu.
- Ceramah agama Kristen : Hari Rabu dan Minggu
- Ceramah agama Khatolik : Hari Kamis dan Minggu.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

- Penyuluhan P4, PMP dan penyuluhan tentang cinta tanah air melalui kepramukaan.
- Melaksanakan ibadah bagi yang beragama dengan menurut kepercayaan masing-masing.

c. Pembinaan kemampuan intelektual

- Pelaksanaan kejar usaha "Pengayoman" berupa pembuatan kerajinan tangan dan menjahit.
- Memasyarakatkan kegemaran membaca melalui pemanfaatan perpustakaan LP.
- Membina kesegaran jasmani melalui SKJ setiap pagi.

d. Pembinaan kesadaran hukum

- Melalui penyuluhan secara periodik kepada narapidana / tahanan pada saat diadakannya senam pagi maupun saat upacara bendera berlangsung.
- Melalui simulasi keluarga sadar hukum bagi narapidana/tahanan.

e. Pembinaan integrasi dengan memasyarakatkan bentuk asimilasi pada saat diadakannya asimilasi tersebut melalui olah raga, study banding, ibadah bersama dan lain-lain.

f. Pembinaan ketrampilan menjahit, kerajinan dari bahan bambu dan kertas yang hasilnya dapat dijual pada masyarakat luar.

g. Kegiatan lain-lain

- Penataan file napi dan arsip-arsip bagian bimbingan kemasyarakatan.
- Penyusunan laporan bulanan.
- Melalui mahasiswa yang mengadakan riset di LP Klas I Semarang.

3. PEMBINAAN ANAK DIDIK :

1. Proses pembinaan bagi anak didik yang masa pembinaannya melebihi 1 (satu) tahun, melalui 6 (enam) tahap :

- a. Tahap pertama, dimulai sejak diterima dan didaftar hingga enam bulan pertama.
- b. Tahap ke dua, dimulai sejak berakhirnya tahap pertama hingga akhir enam bulan kedua.
- c. Tahap ketiga, dimulai sejak berakhirnya tahap kedua hingga akhir enam bulan ketiga.
- d. Tahap keempat, dimulai sejak berakhirnya tahap ketiga hingga akhir enam bulan keempat.
- e. Tahap kelima, dimulai sejak berakhirnya tahap keempat hingga akhir enam bulan kelima.

f. Tahap keenam, dimulai sejak berakhirnya tahap kelima hingga :

- anak didik/anak negara mencapai batas umur 18 tahun
- anak didik/anak sipil mencapai batas umur 21 tahun.

Demikian pola pembinaan napi (termasuk juga anak didik) yang telah digariskan oleh departemen Kehakiman, yang harus dijadikan pedoman bagi lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap napi dan menyiapkan napi untuk kembali ke masyarakat.

Bertitik tolak dari pedoman tersebut, menarik untuk dilihat bagaimana petugas Lembaga Pemasyarakatan menterjemahkan ke dalam perilaku sehari-hari terhadap anak pelak kejahatan.

Sehubungan dengan pembinaan kepribadian, di dalam pembinaan kesadaran beragama diwujudkan dengan kegiatan beragama seperti sholat bersama pada waktu Jum'at, sholat wajib lima waktu. Pada waktu tertentu, yang tidak demikian rutin diadakan pelajaran mengaji, yang diajar oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Demikian pula untuk pendidikan agama juga dilakukan sendiri oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Ada kesulitan untuk mendatangkan orang yang memang benar-benar ahli di bidang pengajaran agama. Sekalipun sudah pernah diajukan permohonan

bantuan kepada Kandep Depdikbud maupun Kandep agama, namun tidak ada tanggapan.

Untuk mendidik kemandirian pada anak, diwajibkan untuk membersihkan tempat hunian mereka sendiri mencuci pakaian sendiri, dan membantu pekerjaan dapur (ini sekaligus juga dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan) serta membersihkan halaman dan ruang kantor Lembaga Pemasyarakatan. Juga ditujukan untuk menghargai kepentingan orang lain, dan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap kelompok. Serta diharapkan membiasakan mereka hidup teratur, dapat membagi waktu antara bekerja, belajar dan bermain.

Di bidang pembinaan kemampuan intelektual, salah satu kegiatan yang diintensifkan adalah kegiatan pendidikan sekolah yang dipersiapkan untuk mengikuti ujian persamaan (Upers) tingkat S.D. dan SLTP, yang diselenggarakan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan pendidikan sekolah yang bersifat rutin tidak bisa dilaksanakan, karena kesulitan pengadaan tenaga pengajar. Sehingga anak usia sekolah (SD sampai SLTA) tidak memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Dengan demikian sekiranya mereka dari Lembaga Pemasyarakatan, bisa dipastikan tidak melanjutkan sekolah lagi.

Kondisi yang demikian, dalam pandangan anak, itu merupakan hal yang wajar. Anak menyadari bahwa ia tidak mungkin melanjutkan pendidikannya, karena beberapa hal. Antara lain, karena ketidakmampuan orang tua untuk membiayai, keengganan anak itu sendiri untuk melanjutkan sekolahnya, atau juga karena anak sebenarnya berkehendak melanjutkan sekolah tetapi ia merasa malu sebagai bekas penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Atau anak tidak mengetahui dengan pasti apa yang harus diperbuat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Untuk kasus yang demikian biasanya dijumpai pada anak yang keluarganya berada jauh dari lokasi Lembaga Pemasyarakatan, atau bahkan yang keluarganya tidak mengetahui bahwa ia berada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

Melihat kondisi perpustakaan dan bahan pustaka yang tersedia, jelas bahwa anak tidak bisa memperoleh banyak pengetahuan, apalagi pengetahuan praktis, dari fasilitas tersebut. Jadi wajar kiranya jika anak yang berminat pada perpustakaanpun juga tidak banyak.

Untuk pendidikan non-formal, yang diajarkan adalah ketrampilan. Ketrampilan ini sifatnya sangat terbatas, lebih dititikberatkan pada kerajinan bambu. Hal ini disebabkan bahan baku

untuk ketrampilan itu relatif mudah diperoleh, demikian pula harganya juga tidak terlalu mahal. Ketrampilan ini diajarkan sendiri oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, yang sebenarnya mereka juga tidak memiliki bekal yang cukup untuk itu.

Ketrampilan membuat kerajinan bambu ini terbatas pada pembuatan sangkar burung dan miniatur menara. Sekalipun harganya tidak begitu mahal, bahan baku yang ada juga terbatas serta tidak secara terus menerus tersedia. Sehingga anak lebih sering tidak melakukan kegiatan apa-apa.

Kegiatan ketrampilan lainnya yang ada, yaitu menyulam kain, yang juga dilakukan secara apa adanya, yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Di samping itu bagi anak-anak tertentu, diberikan kesempatan untuk memelihara taman di halaman depan Lembaga Pemasyarakatan, yang luasnya tidak seberapa, demikian pula dengan tanaman hias yang sederhana.

Apabila dilihat hasil karya para anak didik, nampaknya tidak dapat dipasarkan secara baik, hal ini tampak dari diletakkannya begitu saja hasil ketrampilan anak di ruang ketrampilan. Kalaupun ada yang membeli hanya terbatas oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan sendiri. Dilihat dari kualitasnya, hasil ketrampilan

tersebut juga sangat jauh untuk bisa menembus pasaran.

Boleh dikatakan kegiatan ketrampilan tersebut yang sebenarnya dimaksudkan untuk melatih kemandirian anak, berkesan sekedar mengisi waktu dengan sarana yang ada, tanpa bermaksud benar-benar atau untuk memberikan bekal ketrampilan yang sesuai dengan kemampuan si anak, dan yang benar-benar bisa dipraktikkan untuk menghidupi dirinya bila kelak kembali ke masyarakat.

Disadari bahwa untuk mengadakan kegiatan ketrampilan yang seduai dengan kemampuan dan minat anak, serta yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat tidaklah mudah. Kegiatan ini membutuhkan tenaga trampil dan biaya yang tidak sedikit, sehingga untuk itu dibutuhkan kerjasama antar lembaga yang terkait dan berminat terhadap masa depan anak.

Mengenai pembinaan anak didik yang masa pembinaannya melebihi 1 (satu) tahun, bisa dijelaskan sebagai berikut: pada tahap pertama anak tidak diberikan kegiatan yang bersifat pemberian bekal ketrampilan yang diperlukan. Anak sekedar mengisi waktu karena memang tujuannya sebagai adaptasi bagi anak setelah sebelumnya menjadi anak yang bebas menjadi anak penghuni

Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan terbatas pada kegiatan rutin, seperti membersihkan kamar, halaman sekitar blok hunian.

Pada tahap selanjutnya, sekalipun secara apa adanya, kepada anak didik baru diberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat intelektual baik pembinaan formal dan non-formal serta ketrampilan yang bersifat menambah pengetahuan, yang pada kenyataannya nanti pengetahuan ini tidak begitu banyak memberikan bekal bagi kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas memberikan kesempatan bagi anak untuk dikunjungi oleh orang tua atau keluarganya. Sekalipun demikian tidak semua anak pernah dikunjungi orang tua atau keluarganya. Ketidaktahuan orang tua bahwa anaknya boleh dikunjungi atau mungkin sama sekali tidak tahu bahwa anaknya berada di Lembaga Pemasyarakatan, menjadikan anak tidak memperoleh kesempatan bertemu dengan mereka.

Pada tahap untuk mempersiapkan anak kembali ke masyarakat, anak memperoleh kesempatan untuk asimilasi. Kegiatan ini sebetulnya dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi persiapan mental anak. Akan tetapi pada kenyataannya anak hanya mendapatkan kegiatan yang sederhana, yaitu dengan mendapat

kesempatan membenahi taman, ataupun membersihkan lingkungan di halaman depan Lembaga Pemasyarakatan. Jadi anak diberi kesempatan keluar di halaman depan Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk menunjang terselenggaranya pembinaan yang baik, diadakan suatu peraturan yang harus ditaati oleh anak didik. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan keadaan menjadi tertib, teratur, tetapi pada kenyataannya bertolak belakang, salah satu larangannya adalah merokok, tetapi apabila anak ketahuan merokok, ternyata tidak ada tindakan apa-apa dari petugas. Bahkan untuk memenuhi kebutuhannya apabila anak tidak mempunyai uang (mungkin belum dikirim) anak dapat ngebon dulu ke kantor. Hal ini jelas tidak mendidik, kecuali apabila hal dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan yang penting dan mendesak.

Dari gambaran mengenai perilaku petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina anak sebagaimana dikemukakan, bisa diperoleh penjelasan bahwa petugas dihadapkan pada kondisi yang sedemikian kompleks, yang sering kali hal itu berada di luar jangkauan, bahkan juga diluar wewenangnya. Dengan fasilitas dan kemampuan yang ada (terbatas), petugas Lembaga Pemasyarakatan berusaha memberikan bimbingan pada anak,

sekali pun itu disadari sepenuhnya oleh mereka sebagai sekedar pengisi waktu sampai saatnya pembebasan nanti.¹⁰⁸⁾

Apabila dilihat ratio antara petugas dengan jumlah napi anak yang anak, tampak ada

¹⁰⁸⁾ Suatu gambaran yang sangat ideal mengenai kondisi suatu LPAN bisa ditemukan di Jerman, yang menyediakan fasilitas yang baik dan canggih. Tidak saja dari segi peralatannya/sarana tetapi juga dari segi manajemen pengelolaan dan pembinaan terhadap napi, yang dilakukan secara profesional.

Di Jugendstrafantstalt, Berlin, jadwal harian bagi napi remaja sudah diprogram dengan baik. Pukul 06.00 - 07.00, napi bangun, merapikan tempat tidur dan sarapan. Pukul 07.00 - 15.00 sekolah, diskusi dan kerja, kemudian pukul 15.00 - 21.00 acara bebas. Mereka bisa bermain di taman penjara, olah raga atau melakukan hobbinya masing-masing. Untuk olah raga tersedia gimnasium, lapangan sepak bola, tenis, tenis meja, voli, basket, softball hingga lintasan untuk atletik. Yang lebih menarik adalah fasilitas bengkel kerjanya. Ada lebih dari 25 bengkel ketrampilan, mulai dari bengkel otomotif untuk mobil, sepeda motor, bengkel mesin bubut, las, konstruksi, komputer, kebun percobaan, peternakan lebah madu dan sanggar seni. Semua fasilitas ini didukung oleh tenaga atau instruktur profesional. Oleh sebab itu lulusan dari bengkel kerja ini diakui oleh lembaga akreditasi Jerman. Apabila seorang napi sudah habis masa tahananannya tetapi belum selesai praktik kerjanya, ia bisa kembali ke penjara untuk merampungkan program latihan kerjanya.

Bagi napi tersedia kamar lengkap dengan tempat tidur, meja belajar, rak buku dan sebuah lemari pakaian. Penjara yang terdiri atas enam bangunan berlantai tiga, yang masing-masing lantai tersedia perpustakaan, telpon umum, mesin cuci pakaian dan dapur. Napi bisa memilih sendiri menu makanan yang tersedia diruang makan. Napi tidak berpakaian seragam napi, tampak bersih dan sehat. Satu-satunya pembatas kebebasan napi ialah larangan keluar dari penjara, selama ia masih berstatus sebagai napi. Periksa : Majalah Forum Keadilan No.9 Tahun IV, 14 Agustus 1995 : "Penjara" yang Bukan Penjara, halaman : 108

ketidakseimbangan. Jumlah petugas yang demikian banyak dengan fasilitas yang seadanya, ternyata tidak dapat berbuat banyak dalam melakukan pembinaan napi anak. Sehingga anak-anak benar-benar merasakan berada dalam kondisi yang serba tidak menentu, tanpa bekal pengetahuan dan ketrampilan untuk kembali ke masyarakat. Dari kondisi yang demikian, disadari atau tidak oleh petugas, yang sangat dirasakan napi anak adalah justru unsur pembalasan terhadap tindakan yang telah dilakukan, bukan perasaan diayomi untuk dibina demi masa depan yang lebih baik.

Melihat demikian kompleksnya permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, kiranya kita tidak dapat berharap banyak pada lembaga tersebut untuk mengentaskan anak-anak ke kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Sebenarnya tidaklah berbeda keadaannya dengan kehidupan dalam LP Umum (yang penghuninya adalah manusia dewasa), kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan pun penuh dengan kekerasan dan juga berlaku hukum : siapa yang kuat, dia yang menang. Keadaan yang demikian ini mau tidak mau mempengaruhi pula perilaku dan pribadi anak. Mereka cenderung individual, agrasif, penuh curiga dan a sosial.

Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan yang diharapkan menjadi benteng terakhir pembinaan anak dalam proses peradilan pidana, ternyata tidak selalu dapat memberikan bekal kehidupan (ketrampilan atau pendidikan) untuk menghadapi masa depan anak di tengah-tengah masyarakat setelah anak-anak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya. Justru sebaliknya yang terjadi, anak sekeluar dari Lembaga Pemasyarakatan cenderung kurang dapat diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu jalan keluar yang paling mudah dilakukan anak semacam itu adalah bergabung dengan orang-orang yang senasib dengan mereka, untuk mencari eksistensi diri dan menyambung hidup mereka.

Dengan melihat pada gambaran mengenai proses peradilan anak, semakin jelas terlihat bahwa sebenarnya SPP Anak belumlah dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang berorientasi kepada filsafat *wholism*, yang mengutamakan adanya kesatuan pandangan dan persepsi dalam mencapai suatu tujuan yang sama. Masing-masing sub sistem masih lebih menonjolkan fungsi dan perannya sendiri daripada kepentingan sistem yang lebih besar.

Adanya sifat ketergantungan sebagai salah ciri dari suatu sistem, menuntut adanya suatu

tindakan yang benar-benar profesional dari masing-masing sub sistem yang terkait satu dengan lainnya. Adanya penanganan yang salah pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, mau tidak mau membawa pengaruh terhadap pemeriksaan tahap selanjutnya. Dengan demikian dalam SPP Anak, Polisi benar-benar merupakan ujung tombak bagi terlaksananya kesejahteraan anak, karena hasil pemeriksaannya menjadi acuan pokok bagi sub sistem yang lain.

Di dalam SPP Anak yang sebenarnya memerlukan koordinasi antar instansi yang terkait dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, masih terkesan belum adanya jalinan kerjasama yang baik antar instansi tersebut. Proses peradilan pidana anak tampak sebagai suatu pekerjaan rutin dari masing-masing sub sistem yang ada, yang menitikberatkan pada jenis kejahatannya, sehingga kurang peka terhadap pelaku kejahatan yang masih anak-anak.

Dengan demikian sebenarnya apabila dilihat masih adanya berbagai kesalahan penanganan dan pengadilan terhadap anak, maka hendaknya itu dilihat bukan sekedar sebagai penyimpangan terhadap aturan hukum positif, melainkan lebih dari itu, yaitu pelanggaran terhadap kemanusiaan

anak-anak. Bagaimanapun anak-anak adalah manusia yang belum dewasa, masih belum sadar terhadap tindakan dan akibat dari tindakannya dan juga sering kali belum dapat diminta pertanggungjawabannya.

Dilihat dari sudut perlindungan hak anak, khususnya perlindungan akan hari depannya, maka dibawanya anak ke depan sidang peradilan anak (entah anak terbukti bersalah atau tidak) oleh aparat penegak hukum, akan menimbulkan stigmatisasi oleh masyarakat terhadap diri anak. Stigma ini sering kali mempengaruhi kejiwaan anak dan juga keluarganya, sehingga kemungkinan terjadi hal-hal yang lebih buruk terhadap anak.

C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang menciptakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan terhadap anak di dalam masyarakat, bangsa merupakan suatu tolok ukur peradaban masyarakat, bangsa tertentu. Sehingga demi

pengembangan manusia dan peradaban, maka diusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Diusahakan ada kepastian bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Diusahakan ada kepastian hukum untuk kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan di dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap anak tersebut.

Adanya persamaan persepsi mengenai pengertian perlindungan terhadap anak di antara pihak-pihak yang berwenang menangani proses peradilan pidana terhadap anak, merupakan suatu kondisi awal yang sangat menguntungkan bagi anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak. Dengan adanya persamaan persepsi akan dapat memberikan perlindungan yang dibutuhkan anak di dalam proses peradilan pidana yaitu dengan bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.

Secara luas proses peradilan pidana mencakup tiga tahap, yaitu **pertama**, sebelum sidang peradilan, **kedua**, selama sidang peradilan. **Ketiga**, setelah sidang peradilan. Dalam ketiga tahap tersebut, hak-hak anak meminta perhatian yang sungguh-sungguh untuk dihormati dan dilindungi. Sekalipun mereka adalah pelaku kejahatan namun dengan adanya berbagai karakteristik khusus pada dirinya sebagai anak, maka penghormatan dan perlindungan hak-hak anak tersebut tidak sekedar sebagai perlindungan terhadap hak pelaku kejahatan, namun sekaligus juga perlu diperhatikan adanya hak sebagai anak.

Adapun hak-hak anak sebelum sidang peradilan pidana mencakup hak-hak :

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat hukum dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transpor, penyuluhan dari yang berwajib).

Sementara itu hak-hak anak selama persidangan peradilan anak mencakup hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transpor, perawatan kesehatan).
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atas hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP (Pasal 1 ayat 22).
- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan / penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Setelah persidangan, anak mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai masyarakat.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Di samping anak mempunyai hak sebagai pelaku kejahatan, dalam proses peradilan anak, mereka juga harus memperoleh penghormatan atas hak-haknya sebagai anak. Mengenai hak ini, U.U. No.4/1979, antara lain merumuskan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selanjutnya ditentukan bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan (Pasal 3). Lebih lanjut Pasal 6 menetapkan :

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengantasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Bertitik tolak dari hak-hak anak di dalam sidang peradilan anak dan hak sebagai anak tersebut, kemudian dengan memperhatikan bagaimana anak diperlakukan oleh aparat penegak hukum, secara singkat dapat disimpulkan bahwa selama ini anak-anak belum memperoleh haknya di dalam proses peradilan pidana, baik haknya sebagai anak maupun hak sebagai pelaku kejahatan.

Dengan perlakuan-perlakuan yang tidak berbeda dengan perlakuan yang diperoleh pelaku kejahatan dewasa, sebenarnya bahwa aparat penegak hukum belum memahami pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Tampak sekali bahwa aparat penegak hukum lebih berorientasi pada jenis kejahatan yang dilakukan, bukan pada pelaku kejahatan.

Sejak pemeriksaan pendahuluan sampai dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, praktis anak belum memperoleh perlindungan hukum, yang sebenarnya merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi perkembangan jiwa dan rohani anak. Namun demikian ada sedikit perbedaan mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Sebenarnya petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah bertindak secara kekeluargaan dan melihat anak sebagai seorang

yang perlu dibimbing dalam menjalani kehidupan di masa depan. Akan tetapi kurangnya sarana dan prasarana pembinaan, menjadikan tindakan yang sudah dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan menjadi belum optimal dalam menyiapkan kehidupan anak.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa belum terlindunginya dengan baik hak-hak anak di dalam proses peradilan pidana anak, lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia (yaitu aparat penegak hukum). Dalam arti belum ada kehendak yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum untuk melihat pelaku kejahatan anak sebagai sumber daya manusia yang mempunyai masa depan yang masih panjang. Yang lebih penting lagi, tidak adanya mekanisme kontrol bagi pengingkaran hak-hak anak, merupakan suatu titik kelemahan tersendiri dalam proses peradilan pidana anak.

B. KETENTUAN INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Deklarasi Jenewa 1924 mengenai Hak-hak Anak, merupakan titik awal perhatian masyarakat internasional terhadap hak-hak anak, termasuk di dalamnya adalah hak anak dalam proses peradilan pidana.

Beranjak dari deklarasi tersebut, pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengesahkan kembali Deklarasi tentang Hak-hak Anak. Konsideran Deklarasi ini antara lain menegaskan "*karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan*".

Deklarasi ini pada prinsipnya telah memikirkan pentingnya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Dalam pengertian perlindungan hukum tersebut dengan sendirinya adalah perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana. Karena dalam perjalanan menjadi manusia dewasa, tidak tertutup kemungkinan anak terlibat dalam suatu pidana yang menyebabkan dirinya masuk dalam proses peradilan pidana.

Dalam konggres PBB ke-VI di Caracas (1980), masalah peradilan anak sebagai salah satu bagian dari perlindungan hak anak menjadi salah satu topik pembahasan. Dalam Konggres tersebut ditegaskan bahwa :

anak-anak yang mengalami masalah dengan hukum hendaknya ditangani dengan perlindungan hukum yang dikonsultasikan dengan hati-hati. Demikian pula penahanan sementara terhadap anak-anak sejauh mungkin dihindari, dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir, jangan hendaknya anak-anak dimasukkan ke dalam penjara atau tempat lainnya dimana anak-anak dengan mudah bisa terkena pengaruh negatif dari pesakitan

dewasa selama waktu penahanan tersebut. Setiap penahanan terhadap anak-anak hendaknya mempertimbangkan baik-baik kebutuhan khusus sesuai dengan umur sebagai anak-anak.

Salah satu hasil pada akhir Konggres adalah suatu resolusi mengenai *Development of Minimum Standard of Juvenile Justice* yang meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk menyelenggarakan Peradilan Anak dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak asasi anak yang terlibat dalam persoalan hukum. Resolusi ini merekomendasikan agar Komite PBB mengenai Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan mengembangkan *Standard Minimum Rules for the administrasi of Juvenile Justice* (selanjutnya ditulis SMR-JJ).

Di dalam konggres PBB ke-VII di Milan (Italia-1985) akhirnya disahkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, atau yang lebih dikenal dengan nama *Beijing Rules*.

SMR-JJ ini terdiri atas 6 (enam) bagian, yang masing-masing bagian terdiri dari beberapa *rules*, di mana pada setiap *rules* disertai dengan *commentary*. Disamping itu ada 4 (empat) prinsip utama dalam SMR-JJ, yaitu :

- a. Anak yang berurusan dengan hukum harus dilindungi oleh hukum yang dirancang secara seksama.

- b. Penahanan sebelum peradilan hanya dipergunakan sebagai jalan terakhir, kejahatan kecil oleh anak tidak harus menyebabkan anak ditahan di rumah tahanan, karena anak lebih mudah terkena pengaruh negatif dari napi dewasa dan pertimbangan-pertimbangan khusus perlu diperhatikan dengan mengingat usia anak;
- c. Anak sebagai pelaku kejahatan jangan sampai dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan, kecuali diputuskan bersalah melakukan kejahatan serius/berat. Pemenjaraan tidak perlu dilakukan kecuali memang itu untuk melindungi keamanan umum ataupun memenuhi tujuan peradilan dan terhadap hal ini anak harus diberi kesempatan untuk menjaga diri sendiri.
- d. Masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin, baik individu maupun kolektif untuk memberi kesempatan agar si anak dapat melihat hidupnya di masa depan.

1. HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Di dalam Hak-hak Anak yang dirumuskan dalam *Rule 7.1 SMR-JJ* ditegaskan, bahwa jaminan-jaminan prosedural yang pokok/mendasar harus dijamin pada setiap tahap proses peradilan pidana anak, yaitu antara lain :

- 1. hak untuk diberitahukannya tuduhan (the right to be notified of the charges);
- 2. hak untuk tetap diam (the right to remain silent);
- 3. hak memperoleh penasehat hukum (the right to counsel);
- 4. hak untuk hadirnya orang tua/wali (the right to the presence of a parent or guardian)
- 5. hak untuk menghadapi saksi dan pemeriksaan silang pada saksi (the right to confront and cross-examine witnesses)
- 6. hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas (the right to appeal to a higher authority)

Dalam *commentary* di bawah *Rule* 7.1 itu dijelaskan, bahwa *Rule* tersebut menekankan beberapa hal penting yang merupakan jaminan-jaminan prosedural yang mendasar dan bersifat umum. Di samping jaminan-jaminan hukum yang umum itu. SMR-JJ juga menekankan hal-hal yang patut mendapat perhatian khusus yaitu :

A. DALAM BIDANG PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

1. Pertama-tama SMR-JJ meminta perhatian khusus dalam masalah kontak awal (*initial contact*) dengan anak yang tersangkut masalah hukum (*Rule* 10). Dikemukakan, bahwa dalam hak dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap anak, orang tua atau walinya harus segera diberitahu atau diberitahukan dalam waktu yang sesingkat mungkin setelah penangkapan atau penahanan dilakukan (*Rule 10.1*), dan hakim atau pejabat/badan yang berwenang tanpa menunda-nunda waktu harus mempertimbangkan masalah pengeluaran anak itu dari penangkapan/ penahanan (*Rule 10.2*). Selanjutnya dalam *Rule 10.3* ditegaskan, bahwa kontak antara aparat-aparat penegak hukum dengan pelanggar-pelanggar anak (*juvenile offender*) harus dilakukan dengan cara :

- 1) menghormati kedudukan hukum si anak;
- 2) memajukan kesejahteraan anak;
- 3) menghindari hal-hak yang merugikan / merusak / membahayakan anak.

Termasuk ke dalam pengertian ini antara lain : menggunakan kata-kata keras (bentakan) atau tindakan kekerasan secara phisik (dalam arti luas). Hal ini dipandang sangat penting karena kontak pertama ini akan mempengaruhi sikap anak dan sangat menentukan keberhasilan proses selanjutnya.

2. Sehubungan dengan hal tersebut SMR-JJ memandang perlu adanya pendidikan dan latihan khusus bagi aparat penegak hukum yang berhubungan dengan masalah anak. **Rule 12.1** menekankan perlunya suatu unit polisi khusus yang terdidik dan terlatih.

3. Dalam menangani masalah anak ditingkat awal ini, SMR-JJ memandang perlu adanya jaminan bagi aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar-anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau pengembalian/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Dijelaskan dalam *commentary* bahwa tindakan-tindakan seperti itu (*diversion*) diperlukan untuk menghalangi akibat-akibat negatif dari proses selanjutnya, antara lain menghindari *stigma* dari pemidanaan.

4. Dalam masalah penahanan sementara menunggu proses pemeriksaan pengadilan (*detention pending trial*), SMR-JJ menegaskan hal-hal sebagai berikut :

Rule 13.1: harus digunakan sebagai tindakan terakhir dan dalam waktu yang sesingkat mungkin;

Rule 13.2: sejauh mungkin harus diganti dengan tindakan-tindakan alternatif lainnya seperti pengawasan yang ketat, perlakuan/pemeliharaan yang intensif, penempatan pada keluarga atau dalam lingkungan pendidikan atau di rumah;

Rule 13.3: selama penahanan memperoleh semua hak dan jaminan-jaminan menurut *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*;

Rule 13.4: penahanan ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa dan di dalam lembaga yang terpisah atau bagian yang terpisah dari lembaga yang juga digunakan untuk orang dewasa.

Rule 13.5: selama dalam tahanan tetap menerima asuhan, perlindungan dan semua bantuan individual yang diperlukan sesuai jenis kelaminnya dan kepribadiannya.

Didalam *commentary* dijelaskan, bahwa bahaya selama tersangka anak-anak berada di dalam sementara janganlah diremehkan. Oleh karena itu sangatlah penting perlunya tindakan alternatif, perlunya pemisahan dan tindakan lainnya seperti yang dikemukakan di atas.

Pada kenyataannya, dalam bidang penyidikan dan penuntutan, beberapa hal sudah dilaksanakan seperti pemberitahuan kepada orang tua/wali setelah penangkapan atau penahanan dilakukan terhadap anak (walaupun ada pula beberapa kasus mengenai surat penangkapan atau penahanan yang tidak diberitahukan kepada orang tua/walinya). Hal ini terajadi dikarenakan beberapa sebab diantaranya yaitu, tempat tinggal anak tidak diketahui (status anak gelandangan), memang tidak diberitahukan oleh petugas.

Ada kecenderungan aparat penegak hukum di dalam proses ini menggunakan kekerasan maupun bentakan-bentakan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang diduga

dilakukan oleh anak tersebut. Sebenarnya apabila dimungkinkan anak tidak perlu ditahan yaitu apabila ada pihak yang menjamin terhadap keberadaannya sehingga tidak akan menyulitkan selama proses penyidikan, tetapi ada kecenderungan anak-anak pelaku tindak pidana adalah anak-anak dengan status gelandangan atau tidak diketahui tempat tinggal orang tua / keluarganya. Dengan demikian tidak ada pihak yang mau bertanggungjawab, sehingga untuk memudahkan pemeriksaan anak terpaksa ditahan.

Walaupun sudah beberapa hal yang diatur di dalam Hukum Internasional dilaksanakan, namun sebenarnya hal tersebut bukan karena para penegak hukum tersebut benar-benar memahami tentang kecenderungan tersebut tetapi lebih dikarenakan memang hal tersebut diatur di dalam Hukum Nasional seperti KUHP, KUHPA. Sehingga apabila dikaitkan dengan Hukum Internasional sebenarnya didalam menangani masalah anak ada kecenderungan para penegak hukum belum memahami dan melaksanakan.

2. DALAM PEMERIKSAAN PENGADILAN DAN PUTUSAN HAKIM

1. Di dalam SMR-JJ ditegaskan, bahwa kasus anak tidak dilakukan tindakan diversi

berdasarkan ketentuan/rule 11, maka anak harus ditangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Rule 14.1*).

Selanjutnya ditegaskan, bahwa proses pemeriksaan harus bersifat kondusif bagi kepentingan anak yang terbesar dan dilakukan dalam suasana (saling) pengertian sehingga anak dapat berpartisipasi dan memberikan pernyataan secara bebas (*Rule 14.2*).

2. Mengenai bantuan hukum dan kedudukan orang tua/wali, SMR-JJ menegaskan bahwa :

1) selama dalam proses persidangan anak berhak diwakili oleh penasehat hukum atau berhak menggunakan/meminta bantuan hukum gratis (*free legal aid*) apabila ada ketentuan demikian di negara yang bersangkutan. (*Rule 15.1*);

2) orang tua atau wali berhak untuk berpartisipasi dalam proses pemeriksaan dan dapat diwajibkan untuk hadir oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan anak; sebaliknya mereka pun dapat ditolak untuk berpartisipasi apabila ada alasan demi kepentingan anak (*Rule 15.2*).

3. Sebelum mengambil keputusan akhir untuk pemidanaan, SMR-JJ menegaskan perlunya diteliti secara tepat laporan penelitian sosial mengenai latar belakang kehidupan dan keadaan-keadaan yang menyebabkan tindak pidana itu dilakukan (*Rule 16.1*).

4. Macam-macam tindakan.

Beberapa jenis tindakan untuk menghindari sejauh mungkin bentuk sanksi yang bersifat institusionalisasi, disebut dalam *Rule 18.1* sebagai berikut :

1) tindakan / perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan;

2) pengawasan;

3) perintah kerja sosial;

4) pidana yang bersifat uang dan ganti rugi;

- 5) perawatan lanjutan dan tindakan perawatan lainnya;
- 6) tindakan/perintah untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok-kelompok konseling dan kegiatan lain yang serupa;
- 7) tindakan-tindakan atau perintah yang berhubungan dengan perawatan untuk membantu perkembangan dengan tinggal di dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang bersifat mendidik;
- 8) tindakan-tindakan lain yang relevan.

Selanjutnya dalam *Rule* 18.2 ditegaskan :

Tidak seorang anakpun dapat dilepaskan dari pengawasan orang tua, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali hal itu diperlukan kasus si anak.

Dijelaskan dalam *commentery* bahwa *Rule* 18.2 ini menunjukkan pentingnya peranan keluarga dalam masalah pembinaan anak, oleh karena itu pemisahan anak dari orang tuanya harus merupakan tindakan terakhir.

Pada kenyataannya, di dalam proses pemeriksaan ada kecenderungan sidang di adakan dalam keadaan terbuka untuk umum sehingga dimungkinkan pers untuk meliput kasus tersebut. Hal ini dapat menimbulkan stigma terhadapnya. Bahkan selama sidang ada kecenderungan hakim, jaksa dan panitera menggunakan toga, dan tanya jawab dilakukan dengan suara keras (dibentak-bentak) sehingga

suasana sidang tidak bersifat kekeluargaan.

Mengenai bantuan hukum begitu pula halnya, ada kecenderungan selama sidang bahkan sejak penyidikan anak tidak di dampingi oleh penasehat hukum. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa selama tindak pidana yang dilakukan tidak di ancam dengan hukuman penjara lebih dari 5 tahun maka anak tidak di dampingi oleh penasehat hukum. Bahkan anak tidak tahu tentang haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum dikarenakan tidak diberitahu oleh polisi, hakim atau jaksa. Bahkan pihak orang tua / wali tidak mendampingi selama anak diperiksa di muka sidang. Begitu pula halnya mengenai laporan sosial tentang anak, tidak selalu dilampirkan oleh hakim. Sebenarnya dengan mengetahui latar belakang sosial anak diharapkan putusan hakim sesuai dan tepat dengan keadaan anak, karena tujuan peradilan anak adalah untuk kesejahteraan anak.

Secara keseluruhan sebenarnya ada kecenderungan aparat penegak hukum yang menangani masalah anak di dalam proses peradilan pidana belum menyadari dan memahami Hukum Internasional yang berkaitan dengan masalah hak-hak anak. Apalagi apabila

dikaitkan dengan masalah pedoman (*Guiding Principles*) yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan (*Rule 17.1*), yaitu :

- a. bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriosan/berat-ringannya tindak pidana, tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat;
- b. pembatasan - pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali tidak melakukan tindak kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
- d. kesajahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

Di dalam *commentary* dijelaskan, bahwa akibat-akibat negatif dari penempatan anak dalam suatu lembaga (perampasan kemerdekaan) tidak hanya karena hilangnya kemerdekaan itu sendiri tetapi juga karena dipisahkannya anak itu dari lingkungan sosialnya yang biasa, yang sudah barang tentu hal demikian lebih gawat bagi anak dibandingkan orang dewasa mengingat pertumbuhannya.

Adapun yang dimaksud dengan *Juvenile* adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Mengenai implementasinya dalam hukum nasional tergantung pada kondisi masing-masing

negara. Di bawah usia tersebut seorang anak tidak boleh dirampas kemerdekaannya. Dan ini harus ditentukan dalam aturan hukum. Adapun yang dimaksud perampasan kemerdekaan adalah setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan atau menempatkan seseorang di dalam tempat tahanan publik maupun privat, di mana orang tersebut tidak dapat hidup sesuai dengan keinginannya sendiri, karena adanya perintah dari suatu putusan hukum administratif atau pejabat publik.

Mengenai batasan umum anak ini di dalam hukum nasional memang belum ada keseragaman, tetapi di dalam RUU Peradilan Anak maupun Konsep KUHAP baru menetapkan batas usia minimal 12 tahun untuk dapat dijatuhi pidana, khususnya penjara.

Pada tahun 1990 melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990 dihasilkan *The Riyadh Guidelines* yang menegaskan, bahwa anak-anak mempunyai peranan yang aktif dalam masyarakat dan tidak bisa semata-mata dijadikan obyek dari sosialisasi atau pengawasan.

Di dalam *Riyadh Guidelines* ada 6 (enam) prinsip, yaitu :

- a. Pencegahan *juvenile delinquency* pada dasarnya adalah bagian yang essensial dari

pencegahan kejahatan dalam masyarakat umumnya. Dengan mengangkat ke dalam aturan hukum, mengikuti ke dalam kegiatan sosial yang bermanfaat dan berorientasi pada masyarakat yang humanis dan berwawasan kehidupan, maka anak-anak akan berkembang dengan sikap yang non-kriminal;

- b. Keberhasilan pencegahan *juvenile delinquency* menghendaki adanya suatu usaha dari masyarakat untuk menjamin perkembangan yang harmonis bagi anak-anak, dengan tetap menghormati dan memajukan kepribadian mereka sejak dini;
- c. Untuk keperluan interpretasi *Guidelines* ini, maka orientasi pada anak-anak harus lebih ditekankan anak-anak mempunyai peranan yang aktif di dalam masyarakat, mereka tidak boleh sekedar dijadikan sebagai obyek dari pengawasan;
- d. Dalam rangka implementasi *Guidelines* ini, sesuai dengan sistem hukum nasional masing-masing negara, kesejahteraan anak sejak dini harus menjadi fokus pada setiap rencana tindakan pencegahan;
- e. Kebutuhan dan pentingnya kebijakan pencegahan *delinquency* yang progresif, studi yang sistematis dan diperluasnya tindakan-tindakan terhadap pencegahan, bisa dibenarkan.
- f. Pelayanan masyarakat dan program sosial hendaknya dikembangkan untuk pencegahan *delinquency*, terutama di mana belum ada lembaga untuk pencegahan yang tetap.

Lembaga pengawasan yang formal terhadap anak-anak hanya dipergunakan sebagai sarana terakhir :

Pada waktu yang bersamaan dengan disahkannya *Riyadh Guidelines* disahkan pula *U.N. Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/113 tanggal 14

Desember 1990. Ditegaskan sekali lagi, bahwa pemenjaraan terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan hanya sebagai upaya terakhir dan Sistem Peradilan Anak hendaknya tetap menjunjung tinggi hak-hak dan keamanan anak serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental anak-anak tersebut.

Di dalam kenyataannya, ada kecenderungan anak yang diproses melalui peradilan pidana diputus pidana. Hal ini seakan menggambarkan bahwa perbuatan anak-anak tersebut memang benar-benar serius sehingga tidak memungkinkan pidana yang lain (tidak dipidana) sehingga memang jalan satu-satunya harus dipidana. Apabila demikian tentunya hakim sudah mempertimbangkan bahwa pembinaan di LPAN akan dapat mengembalikan anak ke keadaan semula dalam arti menjadi anak yang berkepribadian baik kembali ke masyarakat.

Pembinaan di dalam LPAN sendiri sebenarnya dilihat dari sarana fisik saja sudah tidak memenuhi syarat untuk tempat pembinaan anak, dikarenakan bentuknya adalah penjara. Juga sarana yang dimiliki tidak menunjang untuk melaksanakan pembinaan yang dapat digunakan bekal bagi anak setelah keluar dari LPAN.

3. PEMAHAMAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Secara umum dapat dikatakan bahwa perkembangan hukum internasional mengenai perlindungan hak-hak anak tersebut cenderung belum dipahami sepenuhnya oleh aparat penegak hukum yang terkait dalam proses peradilan pidana anak. Indikator yang paling jelas tampak dari temuan di lapangan bahwa aparat penegak hukum cenderung belum mengetahui informasi mengenai hal tersebut. Kalaupun ada yang pernah memperoleh informasi itu, baru terbatas pada lapisan atas dari jenjang kepangkatan dalam organisasi masing-masing aparat penegak hukum (khususnya Polisi dan Hakim), yang sebenarnya mereka itu bukanlah aparat yang menghadapi secara langsung kasus kejahatan anak.

Informan di Polda Yogyakarta, misalnya, menyadari bahwa SMR-JJ merupakan standar internasional untuk melaksanakan peradilan anak, namun didalam kenyataannya ada kendala tersendiri untuk menerapkan atau setidaknya memperhatikan dalam menghadapi kasus. Kendala tersebut pertama, adalah kurang atau bahkan tidak pahamiya petugas penyidik di lapangan

terhadap instrumen tersebut **kedua**, instrumen tersebut tidak dipandang sebagai peraturan nasional yang harus dipatuhi, sehingga tidak memperoleh perhatian lebih banyak berpedoman kepada KUHAP, walaupun KUHAP itu sendiri belum mengatur secara khusus mengenai penyidikan terhadap pelaku kejahatan yang masih anak-anak.

Setelah melihat praktik peradilan pidana bagi anak sebagaimana diuraikan di bagian muka, dan kemudian dihubungkan dengan berbagai kecenderungan internasional mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak dalam peradilan pidana, dapat dikatakan bahwa praktik peradilan pidana di Indonesia selama ini masih belum mencerminkan semangat dan isi berbagai instrumen internasional mengenai peradilan pidana anak. Indikator yang paling jelas dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir tidak ada perbedaan perlakuan antara pelaku kejahatan anak dengan orang dewasa. Anak-anak praktis tidak memperoleh perlakuan khusus sesuai dengan kondisi fisik dan mentalnya yang menuntut adanya perlindungan tersendiri. Langsung atau tidak hal ini menunjukkan lemahnya pemahaman penegak hukum terhadap instrumen hukum internasional tersebut.

Dengan diundangkannya Undang-undang tentang Pengadilan Anak maka Indonesia telah mengalami kemajuan dalam menangani perlindungan hak-hak anak pelaku tindak pidana. Dalam hal ini nampak bahwa pemerintah Indonesia dengan sungguh-sungguh menaruh perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak, mengingat sifat-sifat khusus pada anak yang memerlukan penanganan secara khusus pula demi kepentingan pembinaan anak yang bersangkutan.

Mengingat sifat khusus dan demi kepentingan anak, maka perkara anak nakal, perkara anak terlantar, perkara anak sipil, wajib disidangkan melalui pengadilan anak, yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum. Memperhatikan kekhususan dan kepentingan anak, maka proses perkara pidana anak, dari sejak ditangkap sampai diputus dan perlakuan selanjutnya dalam pembinaannya, wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang khusus ditugasi dan benar-benar memahami masalah anak.

Undang-undang Pengadilan Anak yang telah disahkan nampak selaras dengan ketentuan Internasional mengenai perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian nampak bahwa Indonesia mengikuti ketentuan masyarakat Internasional.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kesimpulan Umum

- 1) Masalah bekerjanya hukum dalam proses peradilan pidana merupakan persoalan yang selalu menarik perhatian masyarakat umum maupun kalangan akademis. Hal ini disebabkan karena faktor keterbukaan informasi yang memberikan peluang untuk mengungkapkan praktek peradilan yang dinilai tidak menghormati hak-hak anak.
- 2) Bekerjanya hukum dalam proses peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : manusianya; organisasi/lembaga; struktur organisasi tersebut, sarana yang mendukung. Dari faktor-faktor yang tidak sempurna memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian hak-hak anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai anak cenderung kurang diperhatikan.
- 3) Dari aspek bekerjanya hukum, nampak bahwa sistem peradilan pidana yang menangani anak-anak pelaku tindak pidana belum dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang integral/terpadu, karena dalam proses peradilannya masing-masing instansi, cenderung

berorientasi kepada kepentingan lembaganya sendiri. Kepentingan yang lebih besar yaitu melindungi hak-hak anak, kurang dapat diwujudkan.

- 4) Anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sebenarnya masih memerlukan kasih sayang, perlindungan dan pembinaan dari orang tuanya, karena berbagai hal ia terpaksa melakukan kejahatan yang membawa mereka ke dalam kondisi yang sama sekali lain dengan kehidupan sebelumnya, yaitu kondisi peradilan pidana yang serba menakutkan.
- 5) Aparat penegak hukum sebagai bagian dari jalannya organisasi/lembaga belum secara optimal dapat menjalankan fungsinya dengan baik, karena ketidak tahuan aparat penegak hukum mengenai berbagai ketentuan internasional yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

2. Kesimpulan Khusus

- 1) Terhadap permasalahan pertama, yang menyangkut bekerjanya hukum terhadap perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, dapat disimpulkan bahwa bekerjanya hukum yang terkait dengan aspek organisasi penegakan hukum, masih mengabaikan perlindungan hak-hak anak. Hal ini dapat dilihat dari proses peradilan pidana dari

tingkat pemeriksaan di kepolisian, dimana polisi cenderung memperlakukan anak pelaku tindak pidana sama dengan orang dewasa pelaku kriminal.

- 2) Terhadap permasalahan yang kedua yaitu tentang persepsi hakim terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut bahwa hakim sebagai salah satu unsur dalam penegakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh pandangan, pengetahuan yang dimiliki secara pribadi, pengalaman yang diperoleh melalui proses sosial. Dalam penelitian ini dapat diketemukan bahwa dalam proses persidangan dimana hakim mempunyai kedudukan penting, menunjukkan adanya pengetahuan yang sangat terbatas terhadap aturan-aturan internasional yang memberikan perlindungan hak-hak anak. Hal ini mengakibatkan ketentuan-ketentuan yang sifatnya internasional diabaikan begitu saja.

Hakim cenderung bersifat legistis, sehingga ada kecenderungan untuk bersikap lebih aman mengorbankan keadilan dari kepastian hukum. Pada hal seharusnya hakim harus mampu mengimplementasikan hukum dengan memperhatikan fungsi hukum itu sendiri yaitu adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan, jika terjadi benturan diantaranya maka keadilanlah yang harus diutamakan.

Kemudian sejak ditangkap sampai dengan putusan hakim, anak pelaku tindak pidana tidak didampingi penasehat hukum atau orang tuanya. Disamping itu berkas perkara anak tidak disertai dengan data dari BISPA.

Tata persidangan yang cenderung diadakan dalam keadaan terbuka untuk umum sehingga mengakibatkan pihak lain terutama pers mengetahui pelaku dan kejahatan yang dilakukan serta ada kemungkinan dimuat dalam surat kabar.

- 3) Terhadap permasalahan ketiga yaitu tentang faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam memberikan perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, secara khusus dapat disimpulkan bahwa hakim sebagai salah satu unsur dalam suatu proses peradilan, dalam menjalankan fungsinya tidak bergerak diruang yang hampa. Sekalipun secara konstitusional hakim diberi kedudukan yang mandiri dan terhormat, namun banyak faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi hakim dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada pada diri hakim itu sendiri, yang antara lain meliputi latar belakang sosial, budaya dan ekonomi hakim, profesionalisme hakim dan berbagai dorongan psikologis/moral yang

membentuk pribadi hakim.

Faktor ekstern adalah faktor yang berada di sekitar hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya, yang antara lain meliputi tuntutan masyarakat, tuntutan para pihak, pengaruh keleluasaan (eksekutif), sistem peradilan. Faktor-faktor tersebut pada taraf tertentu akan membentuk sikap dan perilaku hakim dalam mengambil keputusan.

B. Saran

1. Perlu dicari upaya untuk meluruskan persepsi aparat penegak hukum terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sarana pendidikan, penyuluhan atau pembinaan yang tepat, menyeluruh dan proporsional. Dengan persepsi yang benar dan kedewasaan berpikir diharapkan aparat penegak hukum dapat memberi reaksi yang positif terhadap anak pelaku tindak pidana. Dengan demikian akan terwujud adanya tindakan-tindakan yang cenderung untuk selalu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam setiap proses peradilan pidana.
2. Sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam hal ini termasuk hakim dapat terbentuk oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, oleh sebab itu perlu diupayakan suatu kondisi kerja yang baik/sehat disamping perlu kiranya diadakan pembenahan sistem dan pembinaan integritas aparat penegak hukum.

Dengan upaya ini diharapkan aparat penegak sebagai unsur terpenting dalam proses peradilan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Hal ini sangat membantu upaya untuk mengembalikan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi badan peradilan.

App
Sancto
11/7-99

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim Nasution : Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana, PN Percetakan RI, Jakarta, halaman 27.

Albrow Marthin (1989) : Birokrasi, cetakan kedua, alih bahasa oleh M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Yoygakarta : Penerbit Tiara Wacana.

Arief Gosita (1985) : Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademika Pressindo.

Arief Gosita, dkk. (1986) : Hukum dan Hak-hak Anak, Jakarta: CV Rajawali.

-----, 1986: Pengembangan Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana, (Beberapa Catatan), Rajawali, Jakarta.

Badan Koordinasi Nasional untuk kesejahteraan Keluarga dan Anak (1971). Pola-Pola Penanggulangan Remaja di Indonesia, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (1995) : Lokakarya Nasional : Perlindungan Anak dalam Masyarakat serta Pelaksanaannya dalam Sistem Peradilan Anak.

Barda Nawawi Arief (1986) : Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggu-langan Kejahatan. Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum. unpublished.

-----, Upaya Non Penal Dalam Lebijakan Penanggulangan Kejahatan, Seminar Kriminologi VI, Fak. Hukum Undip, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 1994, 1994: Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hakim Pidana, Ananta, Semarang.

-----, 1986: Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Penulisan Buku Kerjasama Indonesia-Belanda Bidang Hukum, 1995-1996.

Barlow Hugh D (1992) : Introduction to Criminology, 1984, Toronto : Little, Brown and Co., halaman : 51, dan Romli Atmassasmita : Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung.

Bimo Walgito, 1982: Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency), Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Jogjakarta.

Bismar Siregar, (1986) Telaah, Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak dan Wanita.

Blumberg, Abraham S. (1970) : Criminal Justice System, Chicago, Quangdrale Books.

Budiarti (1989) : Pemikiran Pengaturan Hukum Pidana Untuk Anak-anak di Indonesia di Masa yang Akan Datang, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari : *Prospek Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Proses Peradilan dan Pelaksanaan Hukuman Menyongsong Lahirnya Peradilan Anak di Indonesia* diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 14 Oktober.

Dirjosisworo, 1988: *Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Erna Sofwan Syukrie (1995) : *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang-Undang Peradilan Anak*. Makalah dalam Pelatihan Tehnis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung R.I., Jakarta.

Gerson Bawengan, (1973) *Pengantar Psychologi Kriminil*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Harahap, Yahya, (1989) *Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakkan Keadilan*, FH. Airlangga, Surabaya.

I.S. Susanto (1990) : *Kriminologi*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.

----- (1990) : *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya, Suatu Studi Kriminologi*, Disertai, unpublished.

----- : *Pemahaman Kritis terhadap Realitas Sosial*, artikel dalam Majalah Fakultas Hukum UNDIP *Masalah-Hukum*, No. 9-1992, ISSN No. 0126-1389.

----- (1993) : *Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi Dan Pengaruhnya Terhadap Orientasi Studi Kejahatan*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang.

----- (1994): *Pokok-pokok Pikiran Kriminologi Indonesia*, Seminar Kriminologi VII, hal. 7, Semarang.

- Irma Setyowati Soemitro, 1990 : **Aspek Perlindungan Anak**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial 3 (1986) : **Gangguan-Gangguan Kejiwaan**, Edisi 2 Cetakan 1, Jakarta : Rajawali Pers.
- Leoby Loqman, (1995): **Perkembangan Kebijakan Legislatif Tentang Peradilan Anak**; Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Lexy J. Moeleong, (1990) **Metodologi Kualitatif Remaja** Rodakarya, Bandung.
- M. Faal (1991): **Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi**, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, cetakan pertama.
- Muladi (1988): **Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen**, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang.
- (1995): **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992) : **Teori-teori Dan Kebijakan Pidana**. Edisi revisi, Bandung Alumni.
- Nursyahbani Katjasungkana (1995) : **Keadilan Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Anak**, Suatu Pendekatan Kriminologis, makalah dalam Lokakarya Nasional Perlindungan Anak dalam Masyarakat serta Pelaksanaannya dalam Sistem Peradilan Anak, Jakarta tanggal 12 Juni.

-----, 1990: **Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang**, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum UNDIP: Semarang.

-----, 1992: **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni Bandung.

Packer Herbert L. (1968) : **The Limits of the Criminal Sanction**, Standford University.

Peter Blau dan Marshal W Meyer (1987): **Bureucracy in Modern Socienty**, diterjemahkan oleh Gary R. Jusuf, Jakarta : UII-Press.

Reoslan Saleh, Tanpa Tahun, **Mengadili Adalah Proses Yang Terjadi antara Manusia dan Manusia**; Bahan Kuliah Kapita Selektta Hukum Pidana pada Program Pascasarjana (S-2) Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.

-----, 1971: **Mencari Asas-Asas Umum Yang sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional**, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana.

Romli Atmasasmita, 1996; **Bunga Rampai Kriminologi**, Rajawali, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro (1988): **Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta : Ghalia Indonesia.

R. Quinnexy (1970): **The Social Reality of Crime**, Boston: Life, Brown & Corp.

Robert C Troajanowicz dan Merry Morash (1983) : **Juvenile Delinquency, Concept and Control**, Third Edition, New Jersey : Prentice-Hall, INC.

- Sanapiah Faisal (1990): Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang : YA3.
- Sahetapy J.E. (1982) : Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Bandung : Alumni.
- Sahetapy J.E. dan Mardjono Reksodiputro (1989): Parados dalam Kriminologi, Jakarta : Rajawali.
- Satjipto Rahardjo : Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung : Sinar Baru, Sine Anno.
- Seidman, Robert B., (1984) Law and Poverty: Essays On Third World Perfective in Jurisprudence, raalayan Law Journal.
- Shanty Dellyana (1988) : Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Yogyakarta : Liberty.
- Skolnick Jerome H. (1966) : Justice Without Trial ; law Enforcement in Democratic Society, Second edition, London : John Wiley & Sons, Inc.
- (1983): Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto (1983) : Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- (1989): Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- (1970): Dokumen Dasar Sistimatika Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Anak, Lokakarya Tentang Peradilan Anak, Binacipta, Bandung.

Soedarto, 1981: **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung.

-----, 1977: **Pengerti Dan Ruang Lingkup Peradilan Anak**, Binacipta, Bandung.

-----, 1983: **Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana**, Sinar Baru, Bandung.

-----, 1990: **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto, Semarang.

Suwantji Sisworahardjo, 1986: **Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana**, Karya Nusantara, Bandung.

Soesilowindradini, **Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)**, Usaha Nasional, Surabaya.

Sri Widojati Wiratmo Soekito, (1983): **Anak Dan Wanita Dalam Hukum**, Jakarta : Rajawali.

Sudarto (1984): **Uraian Pokok-Pokok Permasalahan dalam Seminar Kriminologi ke-IV**, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.

----- (1986): **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung,

Tatang M Amirin (1984) : **Pokok-Pokok Teori Sistem dalam Management Organisasi**, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Peraturan Perundang-undangan :

Himpunan Undang-Undang Terpenting bagi Penegak Hukum,
Politik, Bogor.

GBHN 1993 - 1996, Pusaka Setia, Bandung.

Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
Banbinkum ABRI, MABES ABRI, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Peradilan Umum
dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat
Penyuluhan Hukum, Dirjenkumdam. Departemen
Kehakiman RI, Jakarta.

Resolusi PBB No. 138, (1958) Declaration of The Right of
Child.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, CV. Eka Jaya, Jakarta.

Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan
Peradilan Tata Usaha Negara, Departemen
Kehakiman, Nomor D-UM.01.04-01.95, perihal
Pengiriman Surat-Surat Keputusan Presiden Nomor
11 dan Nomor 12 Tahun 1995.

Majalah/Surat Kabar :

Abdul Hakim G. Nusantara : **Kekerasan dalam Penyidikan karena Masalah Struktural**, artikel dalam harian *Kompas*, Kamis 29 Juni 1975.

Forum Keadilan, Nomor 11 Tahun III, 15 September 1994

-----, Nomor 20 Tahun III, 19 Januari 1995.

-----, Nomor 24 Tahun IV, 11 Maret 1996.

Harian *K o m p a s*, 18 Juli 1995.

Harian Umum *Suara Merdeka*, Senin 17 Juli 1995.

Hennesy Bernard, **Pendapat Umum**, Penerbit Erlangga, Jakarta 1989.

Jawa Pos, 28 September 1996

Kartini Sekartadji : **Ambivalensi Dalam Tugas Polisi**, Suatu Analisis Sosiologis, artikel dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 6, tahun XXIII Desember 1993, No. 0125-9687.

Kompas, 23 Januari 1995.

Majalah Forum Keadilan No. 9 Tahun IV, 14 Agustus 1995 :
"Penjara" yang bukan Penjara.

Majalah Forum Keadilan, No. 7 Tahun IV, 17 Juli 1995.

Majalah Kompas, 17 Juli 1995.

Tabloid Mingguan *Swadesi*, Edisi No. 1047 Tahun XXVII, 1 Agustus - 7 Agustus 1995.